ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Disertasi
Program Doktor Ilmu Ekonomi

DISUSUN OLEH:
SARYANA
NIM 13931034

PROGRAM DOKTOR FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Disertasi untuk memperoleh derajat Doktor
dalam Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Oleh
SARYANA
NIM 13931034

PROGRAM DOKTOR FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, 20 Januari 2021

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Promotor

(Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.)

Co Promotor I

(Abdul Hakim, SE., M.Ec., Ph.D.)

Co Promotor II

(Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini nenyatakan bahwa disertasi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi, seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan disertasi program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanıksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2020



SARYANA

KATA PENGANTAR

-

Puji dan syukur Alhamdulillahirobbil ‘alamin atas Nikmat dan Karuina serta Hidayah-Nya yang telah dicurahkan kepada penulis, sehingga penulis dengan segala daya dan upaya bisa menyelesaikan tugas maha berat ini dengan baik, sehingga proses penulisan disertasi ini dapat selesai. Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Program Doktor pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini dapat selesai, berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE, M.Si, Ph.D, sebagai promotor, Bapak Abdul Hakim, SE., M.Ec., Ph.D, sebagai ko-promotor, Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D sebagai ko-promotor, yang dengan tulus dan sabar membimbing dengan segala kekurangan penulis. Penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya semoga jasa yang diberikan menjadi amal jariyah yang akan mengalir sampai hari akhir;
2. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, SE., MA, Bapak Dr. Rudy Badrudin, M.Si, dan Bapak Dr. Nano Prawoto, SE., M.Si, sebagai Tim Penguji yang telah memberikan arah dan inspirasi baru setiap tahap penyelesaian disertasi ini;
3. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Konsentrasi Kebijakan Publik Program Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
4. Nuryana Nurul Hasanah, anak tercinta yang telah membantu menyelesaikan tugas berat ini, dengan segala energi, kemampuan yang dimiliki, sabar dan kasih sayang kepada penulis yang tak terhingga, sekalipun sibuk di tengah-tengah penyusunan skripsinya;
5. Heni Nuryahayti, S.Kep isteri tercinta dengan kesabaran dan menerima segala kekurangan penulis serta seluruh biaya yang penulis keluarkan demi selesainya disertasi ini. Begitu juga Nuryana Adi Khoriul Adha anak ke dua yang telah menginspirasi dan memberi semangat baru kepada penulis;

6. Seluruh teman kerja dengan segala motivasi dan semangatnya kepada penulis, serta telah memberikan keleluasaan penulis ketika meninggalkan tempat kerja;
7. Ayah, kedua mertua yang telah mendahului sebelum disertasi ini selesai, semoga almarhum almarhumah diterima semua amal ibadahnya dan diampuni seluruh dosa-doasanya dan selama hidupnya selalu memberi motivasi, serta ibu tercinta yang selalu mengalirkan doa untuk penulis;
8. Keponakan, saudara, teman dan sahabat penulis yang telah memberikan dukungan moral dan bantuannya selama penyelesaian disertasi ini;
9. Teman-teman Angkatan XX Program Doktor yang setiap saat memberikan semangat dan memantau perkembangan penyelesaian disertasi ini;
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dorongan dan motivasi kepada penulsi;

Penulis menyadari bahwa disertasi ini tersusun jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala masukan dan kritik demi kebaikan disertasi ini sangat diharapkan. Akhirnya semoga disertasi ini dapat bermanfaat semua pihak khusunya dalam bidang kebijakan publik, dan dapat dijadikan landasan pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 30 Desember 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PRASYARAT GELAR DOKTOR ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME..... iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI..... vii
DAFTAR TABEL.....x
DAFTAR GAMBAR..... xi
ABSTRACT..... xiii
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 34
1.3 Pertanyaan Penelitian..... 35
1.4 Tujuan 36
1.5 Kontribusi Hasil Penelitian 37
1.5 Kerangka Berfikir 38
1.5 Sistematika Penulisan 43
BAB II KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.....44
2.1 Kajian Teori 44
2.1.1 Kemiskinan 44
2.1.2 Kebijakan Publik.....52
2.1.3 BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).....60
2.1.4 PKH (Program Keluarga Harapan).....65
2.1.5 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 70
2.1.6 Rata-rata Lama Sekolah.....76
2.1.7 IPM 81
2.2 Kajian Pustaka 84
2.3 Kerangka Teori 92
2.4 Hipotesis 101
BAB III METODE PENELITIAN 106

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 106
3.2 Jenis dan Lokasi Penelitian 107
3.3 Populasi dan penentuan sampel penelitian 107
3.4 Sumber data dan teknik pengumpulan data 108
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 109
3.5.1 Kemiskinan 109
3.5.2 BPNT 109
3.5.3 PKH 110
3.5.4 PDRB 111
3.5.5 Rata-rata Lama Sekolah 111
3.5.6 IPM 112
3.6 Alat Analisis 112
3.6.1 Uji F 122
3.6.2 Uji Hausman 122
3.6.3 Uji Lagrange Multiplier (LM) 123
BAB IV PANALISIS DAN PEMBAHASAN 124
4.1 Analisis Deskriptif 125
4.2 Analisis Pemilihan Model Panel Yang Tepat 147
4.3 Analisis Hasil Regresi 156
4.4 Hasil Analisis Pengaruh Variabel Independent terhadap Variabel Dependent pada Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia 168
4.5 Hasil Analisis Pengaruh antara Variabel Independent terhadap Variabel Dependent pada Kabupaten di Pulau Jawa 172
4.6 Hasil Analisa antara Variabel Independent terhadap Variabel Dependent pada Kabupaten Luar Pulau Jawa 177
4.7 Pengaruh Analisis antara Independent terhadap Variabel Dependent pada Kota di Pulau Jawa 181
4.8 Hasil Analisa antara Variabel Independent terhadap Variabel Dependent pada Kota di Luar Pulau Indonesia 185
4.9 Uji F 188
4.10 R-square di Semua Wilayah 189
4.11 Uji t 191
4.12 Pembahasan 198
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 244
5.1 Kesimpulan 244

5.2 Implikasi 249
5.3 Saran 250
DAFTAR PUSTAKA 253

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1 Mean, Median, Modus, Standard Deviasi Masing-Masing Variabel ..126
Tabel 4 2 Presentase Kemiskinan Tertinggi di Kota (ribu jiwa) 133
Tabel 4 3 Hasil Uji Chow Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 149
Tabel 4 4 Hasil Uji Hausman Variabel Indedpendent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia..... 150
Tabel 4 5 Hasil Uji Chow Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten di Pulau Jawa..... 151
Tabel 4 6 Hasil Uji Hausman Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten di Pulau Jawa 151
Tabel 4 7 Hasil Uji Chow Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten di Luar Pulau Jawa 152
Tabel 4 8 Hasil Uji Hausman Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten di Luar Pulau Jawa..... 153
Tabel 4 9 Hasil Uji Chow Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kota di Pulau Jawa 153
Tabel 4 10 Hasil Uji Hausman Variabel Independent dengan Variabel Dependent untuk Kota di Pulau Jawa 154
Tabel 4 11 Hasil Uji Chow Variabel Independent dengan Variabel Dependent untuk Kota di Luar Pulau Jawa..... 155
Tabel 4 12 Hasil Uji Hausman Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kota di Luar Pulau Jawa 155
Tabel 4 13 Rangkuman Hasil Uji dengan Model Fixed Effetct (LS) untuk Kabupaten dan Kota di Indonesia..... 157
Tabel 4 14 Rangkuman Hasil Uji dengan Model Panel Fixed Effetct Dinamis (GMM) untuk Semua Wilayah..... 158
Tabel 4 15 Hasil Uji Signifikansi Data Panel Least Squares (LS) 162
Tabel 4 16 Hasil Uji Signifikansi Data Panel Generalized Method of Moments (GMM) 162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2015 - 2019 16
Gambar 1 2 Grafik PDRB Provinsi di Indonesia tahun 2017-2018 19
Gambar 1 3 Besaran Garis Kemiskinan di Indonesia 23
Gambar 1 4 Kerangka Berfikir 41
Gambar 2 1 Kebijakan Peran Strategis Penanggulangan Kemiskinan 54
Gambar 2 2 Proses Pembuatan Kebijakan 59
Gambar 2 3 Arus Lingkar Perekonomian Daerah 72
Gambar 2 4 Kerangka Teori 96
Gambar 3 1 Langkah Mencari Model Terbaik 122
Gambar 4 1 Grafik Persentase Kemiskinan Indonesia 20015 – 2019 127
Gambar 4 2 Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 128
Gambar 4 3 Jumlah Kabupaten dan Kota dengan Kemiskinan di bawah 8% 129
Gambar 4 4 Kabupaten dengan Angka Kemiskinan 8% Tahun 2015 dan 2019 130
Gambar 4 5 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota 2015 dan 2019 131
Gambar 4 6 Kabupaten dengan Jumlah penduduk miskin Tinggi Tahun 2015 – 2019 132
Gambar 4 7 Jumlah Penerima BPNT Tertinggi pada Kabupaten 134
Gambar 4 8 Jumlah Penerima BPNT Terendah pada Kabupaten di Indonesia 135
Gambar 4 9 Jumlah Penerima BPNT Tertinggi pada Kota di Indonesia 136
Gambar 4 10 Perkembangan BPNT di Kota Sawah Lunto 137
Gambar 4 11 Kabupaten Penerima PKH Tertinggi 2015 – 2019 138
Gambar 4 12 Kabupaten Penerima PKH Terendah Tahun 2015-2019 139
Gambar 4 13 Kota Penerima PKH Tertinggi Tahun 2015 – 2019 140
Gambar 4 14 Kota Penerima PKH Terendah Tahun 2015 – 2019 141
Gambar 4 15 PDRB Tertinggi dan Terendah untuk Kabupaten 142
Gambar 4 16 PDRB Kota Tahun 2015 – 2019 143
Gambar 4 17 Angka RLS Kabupaten Tertinggi dan Terendah Tahun 2015-2019 144
Gambar 4 18 RLS Kota Tertinggi dan Terendah 2015 – 2019 145
Gambar 4 19 IPM Kabupaten Tertinggi dan Terendah 2015 – 2019 146
Gambar 4 20 IPM Kota Tertinggi dan Terendah 2015 – 2019 147

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Variabel penelitian terdiri dari BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM dan variabel jumlah penduduk miskin. Metode penelitian menggunakan regresi data panel *fixed effect* untuk menganalisis kebijakan kemiskinan pada 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, menggunakan data sekunder. Analisis menggunakan metode regresi data panel statis *fixed effect* (*Least Squares - LS*-) dan metode regresi data panel dinamis *fixed effect* (*Generalized Method of Moments –GMM-),*

Hasil penelitian; (a) kebijakan asimetris lebih tepat diterapkan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, agar program sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan penyebab kemiskinan masing-masing Daerah, mengingat keberagaman wilayah; (b) variabel BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM berpengaruh secara berbeda-beda terhadap jumlah penduduk miskin di setiap wilayah Indonesia; (c) *u*ji data panel LS menghasilkan: BPNT berpengaruh positif signifikan secara nasional, di kabupaten pulau Jawa dan tidak berpengaruh di Kabupaten luar pulau Jawa, Kota pulau Jawa dan Kota luar pulau Jawa; PKH berpengaruh positif signifikan di Kabupaten pulau Jawa dan tidak berpengaruh secara Nasional, kabupaten luar pulau Jawa, kota pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa; PDRB berpengaruh negatif signifikan secara nasional, kabupaten pulau Jawa, kota pulau Jawa dan tidak berpengaruh di kabupaten luar Jawa dan kota luar Jawa; RLS berpengaruh positif signifikan di kabupaten luar Jawa dan tidak berpengaruh secara nasional, kabupaten pulau Jawa, kota pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa; IPM berpengaruh negatif signifikan secara nasional dan seluruh wilayah Indonesia. Uji data GMM menghasilkan; (d) Uji data panel GMM menghasilkan BPNT berpengaruh positif signifikan di kabupaten pulau Jawa, kabupaten luar pulau Jawa dan tidak berpengaruh secara nasional, kota pulau Jawa dan kota luar Jawa. BPNT (-1) berpengaruh positif signifikan secara nasional di kabupaten luar pulau Jawa, berpengaruh negatif signifikan di kota luar pulau Jawa dan tidak berpengaruh di kabupaten pulau Jawa serta kota pulau Jawa. PKH berpengaruh negatif signifikan secara nasional dan di kabupaten luar pulau Jawa serta berpengaruh positif signifikan di kabupaten pulau Jawa, kabupaten luar pulau Jawa, kota pulau Jawa, dan. PKH (-1) berpengaruh positif signifikan di kota pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa, serta tidak berpengaruh secara nasional, di kabupaten pulau Jawa dan kabupaten luar pulau Jawa. PDRB berpengaruh negatif signifikan secara nasional, di kabupaten pulau Jawa dan kabupaten luar pulau Jawa, serta tidak berpengaruh di kota pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa. RLS berpengaruh positif signifikan di kota pulau Jawa dan tidak berpengaruh secara nasional, kabupaten pulau Jawa, kabupaten luar pulau Jawa, kota luar pulau Jawa. RLS (-1) berepngaruh negatif signifikan di kota pulau Jawa dan tidak berpengaruh secara nasional, kabupaten pulau Jawa, kabupaten luar pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa. IPM berpengaruh negatif signifikan secara nasional, kabupaten pulua Jawa, kabupaten luar pulau Jawa, kota pulau Jawa dan tidak berpengaruh di kota luar pulau Jawa.

Kata kunci : kebijakan publik, kemiskinan, bantuan sosial

ABSTRACT

The research aim was to analyze government policies in poverty reduction. The research variables consisted of BPNT, PKH, GRDP, RLS and HDI and the variable number of poor people. The research method used fixed effect panel data regression to analyze poverty policies in 514 districts/cities in Indonesia, with secondary data. The analysis uses the static fixed effect panel data regression method (Least Squares -LS-) and the dynamic fixed effect panel data regression method (Generalized Method of Moments -GMM-),

Research result; (a) asymmetrical policy are more appropriately applied in the acceleration of poverty reduction in Indonesia, so that programs are in line with the conditions, needs and causes of poverty in each region, given the diversity of regions; (b) the variables of BPNT, PKH, PDRB, RLS and HDI have different effects on the number of poor people in each region of Indonesia; (c) the LS panel data test results in: BPNT has a significant positive effect nationally, in the regencies of the island of Java and has no effect in the districts outside Java, the cities of Java and the cities outside of Java; PKH has a significant positive effect in the regencies of the island of Java and has no effect nationally, districts outside Java, cities on the island of Java and cities outside Java; GRDP has a significant negative effect nationally, in the districts of Java island, cities of Java island and has no effect in districts outside Java and cities outside Java; RLS has a significant positive effect in districts outside Java and has no effect nationally, districts on the island of Java, cities on the island of Java and cities outside Java; HDI has a significant negative effect both nationally and throughout Indonesia. GMM test data yields; (d) The GMM panel data test resulted in BPNT having a significant positive effect in the regencies of the island of Java, the districts outside the island of Java and has no effect nationally, the cities of the island of Java and the cities outside Java. BPNT (-1) has a significant positive effect nationally in districts outside Java, has a significant negative effect in cities outside Java and has no effect in districts on the island of Java and cities on the island of Java. PKH has a significant negative effect nationally and in districts outside Java Island and has a significant positive effect in districts on the island of Java, districts outside Java, cities on the island of Java, and. PKH (-1) has a significant positive effect in cities on the island of Java and cities outside Java, and has no effect nationally, in districts on the island of Java and in districts outside Java. GRDP has a significant negative effect nationally, in districts on the island of Java and districts outside Java, and has no effect in cities on the island of Java and cities outside Java. RLS has a significant positive effect in cities on the island of Java and has no effect nationally, districts on the island of Java, districts outside Java, cities outside Java. RLS (-1) has a significant negative effect in the cities of the island of Java and has no effect nationally, districts on the island of Java, districts outside Java and cities outside Java. HDI has a significant negative effect nationally, in the regency of Pulua Java, districts outside Java, cities on the island of Java and has no effect in cities outside Java.

Keywords: public policy, poverty, social assistance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi isu penting dan masalah pada negara-negara berkembang (Mohammad, 2015; Kwan, 2018; Jatmiko, 2018; Efendi, 2019; Supriyanto, 2019. Oleh karena itu isu dan masalah kemiskinan menarik perhatian akademisi, praktisi kebijakan, dan politisi di seluruh dunia. Kemudian muncul kebijakan, program dan berbagai kegiatan dalam jumlah besar untuk pengentasan kemiskinan telah dimulai dan diimplementasikan. Meskipun demikian, masalah publik tentang angka kemiskinan masih besar jumlahnya (Susanti, 2013; Hadna, 2017).

BPS menyebutkan bahwa salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah kemiskinan. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase kemiskinan pada tahun 1984 (BPS, 2016). Pada tahun itu penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976 sampai dengan 1981.

Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS mengeluarkan data jumlah dan persentase kemiskinan. dengan melakukan pendataan jumlah dan persentase kemiskinan (BPS, 2016). Data yang dihasilkan oleh BPS, menjadi bahan pengambilan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Bentuk

kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia salah satunya dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat miskin.

Kebijakan penanggulangan kemikinan selalu identik dengan bantuan, karena kemiskinan sering didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan yang paling banyak diluncurkan berbentuk bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial telah memberikan efek signifikan bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam pendidikan dasar, memenuhi kebutuhan dasar, seperti akses terhadap air bersih, listrik, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Namun kebijakan tersebut belum secara komprehensif mengentaskan kemiskinan dengan cepat dan menyeluruh terutama dari sisi ekonomi (Saragih, 2015).

Fenomena kemiskinan di Indonesia selalu menjadi isu menarik setiap suksesi kepemimpinan. Fakta menunjukkan para calon pemimpin selalu mengusung isu ketimpangan sosial (kemiskinan) menjadi komoditi politiknya. Ketika proses pemilu telah menghasilkan pemimpin, ironisnya, penurunan angka kemiskinan tetap lambat, sementara program dan kegiatan diimplementasikan dalam penanggulangan kemiskinan. Dukungan pemerintah melalui pendekatan politik yang memadai tersebut dan dukungan dana yang mencukupi, tidak menghasilkan penanggulangan angka kemiskinan yang memadahi (Fatony, 2011).

Peran politik yang cenderung memacu pertumbuhan ekonomi, tidak berpengaruh pada penanggulangan kemiskinan. Besar kecilnya kemiskinan tergantung pada ketidak stabilan ekonomi makro terutama tingkat harga. Tingkat inflasi yang lebih tinggi menyebabkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di negara ini (Afandi, *et al*, 2017). Peran politik pemerintah Indonesia dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan salah satunya dengan memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial ini seperti beras untuk keluarga miskin, bantuan langsung tunai, dan BPJS kesehatan. Namun pengentasan kemiskinan belum bisa dikatakan berhasil (Qurratu'ain, 2016).

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan bantuan sosial. Sejarah di Indonesia telah mencatat beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan bantuan sosial. Pemerintah terus menggulirkan bantuan sosial, namun angka kemiskinan nasional dibilang masih tinggi. Fenomena ini perlu diteliti, agar dapat diketahui penyebab lambatnya penurunan kemiskinan di Indonesia.

Bantuan sosial merupakan bantuan berbentuk uang, barang atau jasa yang bersumber dari pemerintah untuk diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakar miskin. Bantuan sosial berbentuk perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial dan pelayanan dasar (Diana dan Seprina, 2019). Bentuk-bentuk bantuan ini, sejak pemerintahan orde baru sampai orde reformasi menjadi alternatif kebijakan

penanggulangan kemiskinan. Program-program itu masih berjalan sampai sekarang, hanya terjadi perubahan nama tetapi bentuk dan tujuannya sama. Bantuan diarahkan baik untuk kelompok dan maupun individu masyarakat miskin.

Masa pemerintahan orde baru bentuk bantuan non tunai yang diberikan kepada masyarakat seperti KUT (Kredit Usaha Tani), Bandes (bantuan desa), Bandus (bantuan dusun), UEP-SP (Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam), IDT (Inpres Desa Tertinggal), BP3DT (Bantuan Pembangunan Prasana Perekonomian Desa Tertinggal). KUT bentuk bantuan berupa pinjaman kredit diberikan berbentuk pupuk untuk petani. Bandes diberikan kepada masyarakat melalui pemerintah desa dengan bentuk bantuan berupa uang, begitu juga Bandus.

UEP-SP merupakan bantuan keuangan untuk kelompok usaha ekonomi produktif, dengan kewajiban anggota menabung pada kelompok usahanya untuk mendapatkan pinjaman modal. IDT berupa bantuan uang tunai kepada kelompok usaha masyarakat miskin. BP3DT berupa bantuan dana pembangunan sarana prasaraana agar masyarakat miskin memiliki akses pasca produksi.

Masa orde baru tahun 2006 sampai masa reformasi tahun 2014, bantuan penguatan orang miskin diberikan melalui pemerintah kecamatan dengan nama PPK (Prongram Pengembangan Kecmatan), yang kemudian pada tahun 2010

berganti nama PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan). Bentuk bantuan PNPM MP sama dengan PPK diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemerintah kecamatan. Jenis kegiatan PNPM MP meliputi bantuan modal usaha, peningkatan kualitas manusia, dan pembangunan sarana prasarana mirip dengan IDT dan BP3DT.

Seiring dengan PPK dan PNPM MP, untuk mengatasi kemiskinan wilayah perkotaan diberikan bantuan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan). Program ini berupa bantuan uang tunai yang diberikan kepada desa di wilayah perkotaan. Setiap desa mendapatkan bantuan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk kegiatan usaha kelompok. Orang miskin yang ingin mengakses dana ini, harus berbentuk kelompok usaha.

Era reformasi bantuan sosial kembali menjadi pilihan kebijakan pengentasan kemiskinan. Raskin (beras miskin) yang kemudian berganti nama BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dibeirkan kepada rumah tangga miskin. Kenaikan BBM berdampak pada daya beli masyarakat rendah, maka pemerintah memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebersar Rp. 100.000,00 (sertarus ribu rupiah) per orang setiap keluarga. Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) diberikan kepada orang miskin agar mereka memiliki akses pelayanan kesehatan. Selain Jamkesmas, tersedia pula program Jamkesos (Jaminan Kesehatan Sosial) dan Jamkesta (Jaminan Kesehatan

Semesta), program ini kemudian berganti nama KIS (Kartu Indoesia Sehat). Jaminan untuk mendapatkan pendidikan murah, pemerintah memberikan program BOS (Bantuan Operasioanl Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Selain bantun sosial dan non sosial di atas, keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga lansia, balita, ibu hamil, disabiltas dan anak sekolah mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). Bantuan ini berupa uang tunai yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Pemerintah meluncurkan PKH agar keluarga miskin dapat mendapat akses kesehatan anggota keluarga serta anak-anak mereka dapat sekolah. Besaranya bantuan tunai ini:

1. Bantuan tetap Rp. 550.000,00 (sekali dalam setahun) per tiga bulan sekali.
2. Keluarga yang memiliki ibu hamil, anak usia dini, disabilitas, dan lansia sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per tiga bulan sekali.
3. Keluarga memiliki anak SD sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per tiga bulan sekali.
4. Keluarga memiliki anak SMP sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tiga bulan sekali.
5. Keluarga memiliki anak SMA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tiga bulan sekali.

Bantuan sosial dari era ke era, dari tahun ke tahun masih menjadi alternatif pengambil kebijakan di bidang kemiskinan. Walaupun, bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin belum menghasilkan penanggulangan kemiskinan yang signifikan (Saragih, 2015). Orang miskin masih diperlakukan sebagai obyek penerima bantuan, sehingga kurang mendorong sikap produktif.

Kemiskinan memang masalah yang komplek. Penyebab kemiskinan ditimbulkan oleh beberapa faktor, yang bersifat multidimensional, seperti korupsi, pendidikan, ketidakstabilan politik, geografis, karakteristik, pemerintahan lokal yang tidak efektif dan kebijakan pemerintah, sebagai penyebab kemiskinan (Hong Ng, 2013). Efektivitas kebijakan pemerintah baik pusat maupun lokal, menjadi peran penting penyebab kemiskinan.

Kemiskinan selain tergantung pada keadaan ekonomi makro yang stabil, kemiskinan juga terkait dengan kebijakan mikro mengenai penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan merupakan fenomena global yang dinamis, kompleks dan multidemensi, sehingga dalam pengentasannya diperlukan tiga faktor besar yaitu korporasi, pemerintah dan LSM (Adepoju, 2014). Gerakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, korporasi dan LSM saja, tetapi yang paling penting justru, masyarakat miskin dijadikan subyek penanggulangan kemiskinan.

Peran masyarakat miskin menjadi strategis, jika mereka bisa berperan sebagai subyek pembangunan dan subyek kemandirian hidupnya, melalui upaya peningkatan pendapatannya. Masyarakat miskin dituntut untuk memiliki produktivitas tinggi agar memiliki pendapatan dan meningkatkan daya beli. Produktivitas masyarakat baik menciptakan pekerjaan sendiri maupun menjadi tenaga kerja yang produktif yang difasilitasi oleh swasta maupun pemerintah salah satunya melalui padat karya, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika hal itu terjadi maka ketimpangan pendapatan tidak terjadi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang stabil, melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan teknologi padat karya adalah obat aktif untuk menyelesaikan kemiskinan (Vijayakumar, 2013).

Pendapat di atas, membangun ide masyarakat miskin tidak hanya sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya akan menjadi gerakan sinergi antara pemerintah, masyarakat/lembaga, dan masyarakat miskin itu sendiri. Alur pikir ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulan Kemiskinan, yang mengamatkan percepatan penanggualangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan sosial (Bappeda Gunungkidul, 2018).

Pemerintah Daerah selayaknya mendapatkan kewenangan utuh dalam menanggulangai kemiskinan di daerah masing-masing. Pemberian kewenangan ini agar pemerintah Daerah memiliki otoirsasi dalam penentukan kemiskinan, sehingga tidak terjadi program kemiskinan salah sasaran. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat mendorong penargetan kebijakan atau program agar lebih tepat sasaran karena sangat diperlukan untuk pengentasan kemiskinan (Samudro, 2018).

Fenomena sosial yang terjadi di lapangan, berdasarkan pengamatan penulis menunjukkan bhawa bantuan sosial menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi terjadi konflik horizontal. Alasannya klasik, penerima bantuan dari berbagai sumber diterima oleh orang yang sama. Sementara perubahan kondisi kemiskinannya untuk menjadi keluarga mampu sangat lambat sekali. Akibatnya, banyak orang melaporkan dirinya sebagai orang miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial Hal ini menimbulkan ketergantuangan orang miskin kepada pemerintah.. Ketergantungan masyarakat kepada pemeintah semakin tinggi, disebabkan peran negara sangat dominan dalam memerangi kemiskinan.

Kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih menekankan bidang ekonomi, melalui peran negara yang sangat dominan, dengan kebijakan terpusat sesungguhnya memiliki beberapa kelemahan, diantaranya orang yang sudah terdata kondisi riilnya sudah mampu, karena jeda waktu antara

pendataan dengan turunnya bantuan agak lama, sehingga dalam jeda waktu itu telah terjadi perubahan ekonomi yang tidak terpotret oleh pusat. Revitalisasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang terpusat tersebut tampaknya menjadi hal yang urgent. Untuk itu perlu dilihat secara dekat tentang faktor-faktor non-ekonomi dan juga hal yang mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu mengentaskan orang miskin (Yamin, Dartanto, 2016). Peran negara yang dominan ini tercermin dari banyaknya bantuan sosial untuk kemiskinan. Asumsi ini berangkat dari cara pandang kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Kemudian, muncul kebijakan berupa program penanggulangan kemiskinan berupa bantuan sosial dan non soial. Bantuan sosial di Tunisia berupa sistem jaminan sosial yang mencakup tiga kategori utama dalam intervensi terhadap kemiskinan, pengucilan, dan ketidaksetaraan, dan berupaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan mengurangi konsekuensi dari risiko pasar. Sistem jaminan sosial Tunisia mencakup pekerja bergaji terhadap berbagai risiko, termasuk pengangguran. Skema sosial dapat memberikan bantuan dan membantu melindungi individu dan keluarga dari kemungkinan-kemungkinan tertentu, seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka (Khemili, Mounir , 2018).

Bantuan sosial di Tunisia, benar-benar dapat melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengurangi ketimpangan. Skema sosial berada di bawah payung Kementerian Urusan Sosial dan Solidaritas. Lembaga-lembaga jaminan sosial diatur dalam jaringan badan-badan nasional, regional, dan lokal. Bantuan sosial yang ada di Tunisia ada dua jenis dana jaminan sosial (*National Social Security Fund*), yaitu Dana Pensiun Nasional dan Dana Kontinjensi Sosial (*the National Pension and Social Contingency Fund*) (Khemili, Belloumi, 2018) yang berada di bawah pengawasan Negara.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial (Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017). Amanat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tersebut merupakan konsekuensi negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian pemerintah memiliki kewajiban dalam melindungi dan melayani orang miskin, untuk dapat berkembang menjadi keluarga yang bebas dari jeratan kemiskinan. Pelayanan yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah bantuan sosial, yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Pelayanan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan

berbagai kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan, namun masih belum optimal. Program yang dicanangkan pemerintah dari tahun ke tahun, namun jumlah penduduk miskin tidak mengalami penurunan yang signifikan (Ramdani, 2015).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 di atas, bantuan sosial diberikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar (Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017). Dengan demikian ilustrasi di atas menunjukkan bahwa bantuan sosial merupakan bantuan pemerintah yang berupa barang, uang atau jasa yang diperuntukkan untuk orang miskin.

Pemerintah pusat telah menetapkan penerima bantuan sosial berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan. Bentuk bantuan sosial di Indonesia salah satunya program Program Keluarga Harapan (PKH). Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial (Permensos Nomor 1 tahun 2018). Penerima PKH memiliki kewajiban salah satunya mengikuti jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA untuk tetap bisa mengakses dana PKH. Disinilah keterkaitan antara kebijakan belanja

pemerintah melalui subsidi (PKH) dengan kewajiban masyarakat untuk melaksanakan pendidikan.

Selain bantuan PKH, pemerintah mengeluarkan program pengentasan kemiskinan berbentuk Bantuan Pangang Non Tunai (BPNT). BPNT diberikan kepada warga miskin. Kriteria yang mendapatkan bantuan ini, warga yang memiliki keterbatasn memenuhi kebutuhan dasar. Pada tahun 2015, bantuan BPNT berbentuk beras, kemudian tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bantuan berupa transfer uang dalam bentuk kartu gesek (kartu combo). Kartu combo yang diterima penerima manfaat senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan. Kelompok penerima manfaat dalam menggunakan kartu combo dengan menggesek di e-warung yang ditunjuk, untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras, telur dan minyak goreng. Penerima manfaat menggesekkan kartu di e-warung setiap bulan.

Upaya penanggulangan kemiskinan perlu melihat definisi kemiskinan. Definisi kemiskinan yang terukur jelas, dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui penyebab kemiskinan. Kemiskinan tidak dapat didefinisikan secara baku yang diakui secara universal, hal ini karena terjadinya perbedaan penyebab kemiskinan. Perbedaan itu disebabkan oleh beberapa aspek, seperti faktor demografi, faktor geografi, dan keragaman budaya (Beik dan Arsyianti, 2015).

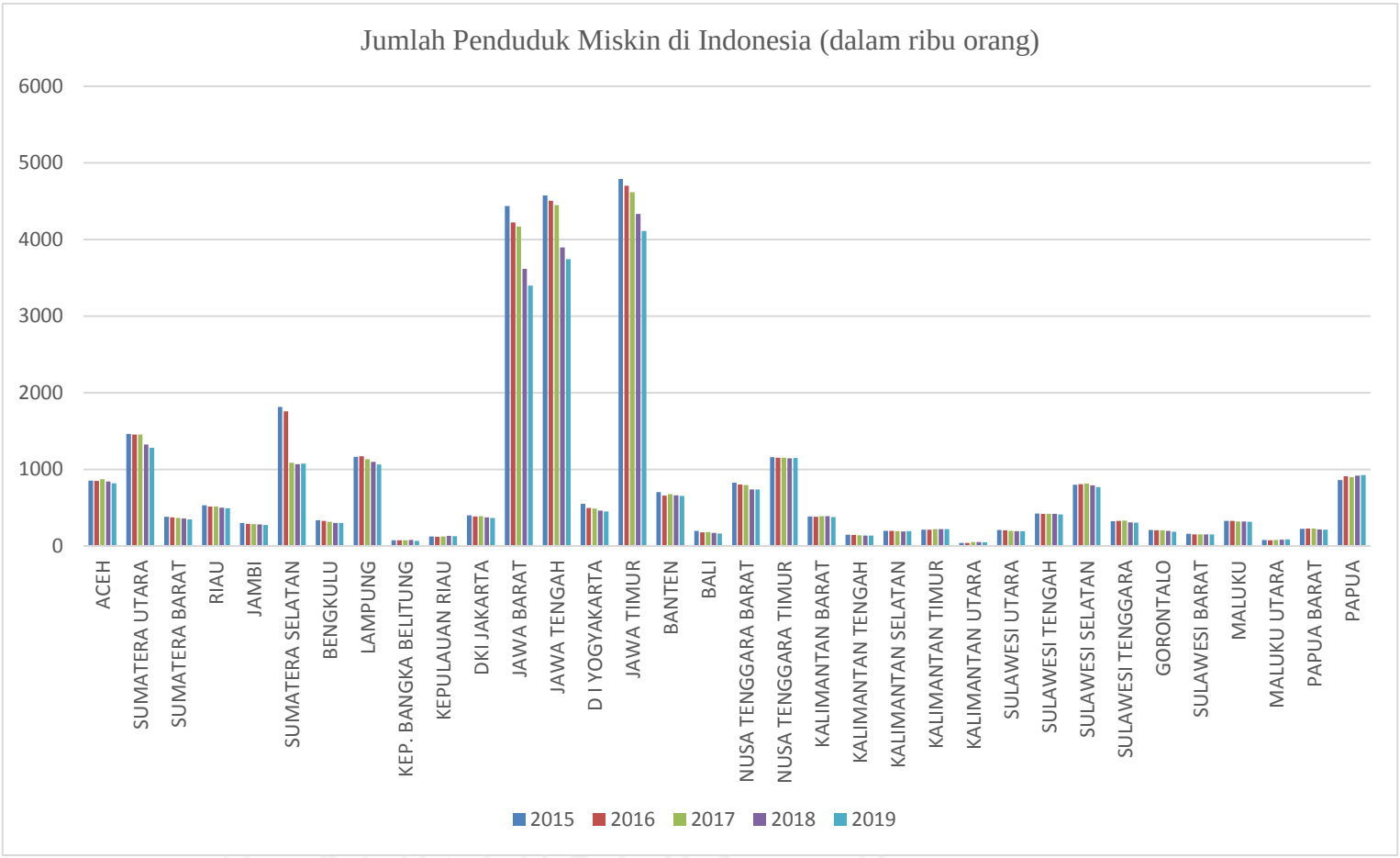
Penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan efisien, tidak seluruhnya menjadi peran pemerintah saja, melainkan harus melibatkan pihak ketiga. Keterlibatan lembaga non pemerintah swasta) salah satunya melalui pinjaman kredit usaha mikro tanpa bunga (Adepojua dan Oyesanyaa, 2014). Tanggung jawab penanggulangan kemiskinan yang hanya dibebankan kepada pemerintah, akan terjadi inefektivitas dalam menanggulangai kemiskinan, artinya sederatan program pemerintah belum mampu menjawab persoalan kemiskinan sesuai dengan target RPJMN 2015-2019.

Data dapat dilihat dalam capaian penanggulangan kemiskinan pada dokumen RPJMN 2015 – 2019 sebesar 7% - 8%. Sedangkan realisasi capaian angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 9,82% (Bappenas, 2020). Realisasi capaian ini ternyata masih jauh dari harapan. Angka kemiskinan masih terlihat jauh dari target. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia dibilang lambat, sehingga kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan bangsa.

Penyeragaman penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui bantuan sosial, baik bentuk maupun besarannya kepada penduduk miskin di seluruh Indonesia. Penyeragaman ini belum tentu menghasilkan *out came* yang nyata. Menurut BPS penduduk miskin di Indonesia mengalami naik turun dalam dekade tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Gambat 1 di bawah ini, menunjukkan persebaran jumlah penduduk miskin, mayoritas bertempat tinggal di perdesaan sebesar 14,11 % dari total penduduk miskin di Indonesia sebesar 27,76 juta orang, sedangkan sebanyak 10,70% berada di wilayah perkotaan per September 2016 (http://setkab.go.id/, diakses tanggal 20 Oktober 2017). Penduduk miskin yang berada di wilayah perkotaan sejumlah 10,70% di atas merupakan penduduk urban dari desa ke Kota (Sugiyarto dan Seleky, 2015). Tingginya urban dari desa ke Kota disebabkan faktor ekonomi, sehingga urbanisasi ini terjadi karena adanya faktor pendorong (*push faktor*) dari daerah asal dan faktor penarik (*pull faktor*) dari daerah tujuan (Adam, 2015).

Pada tahun 2018 terjadi penurunan, penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018) (https://www.bps.go.id, diakses 20 Oktober 2018).



Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2015 - 2019

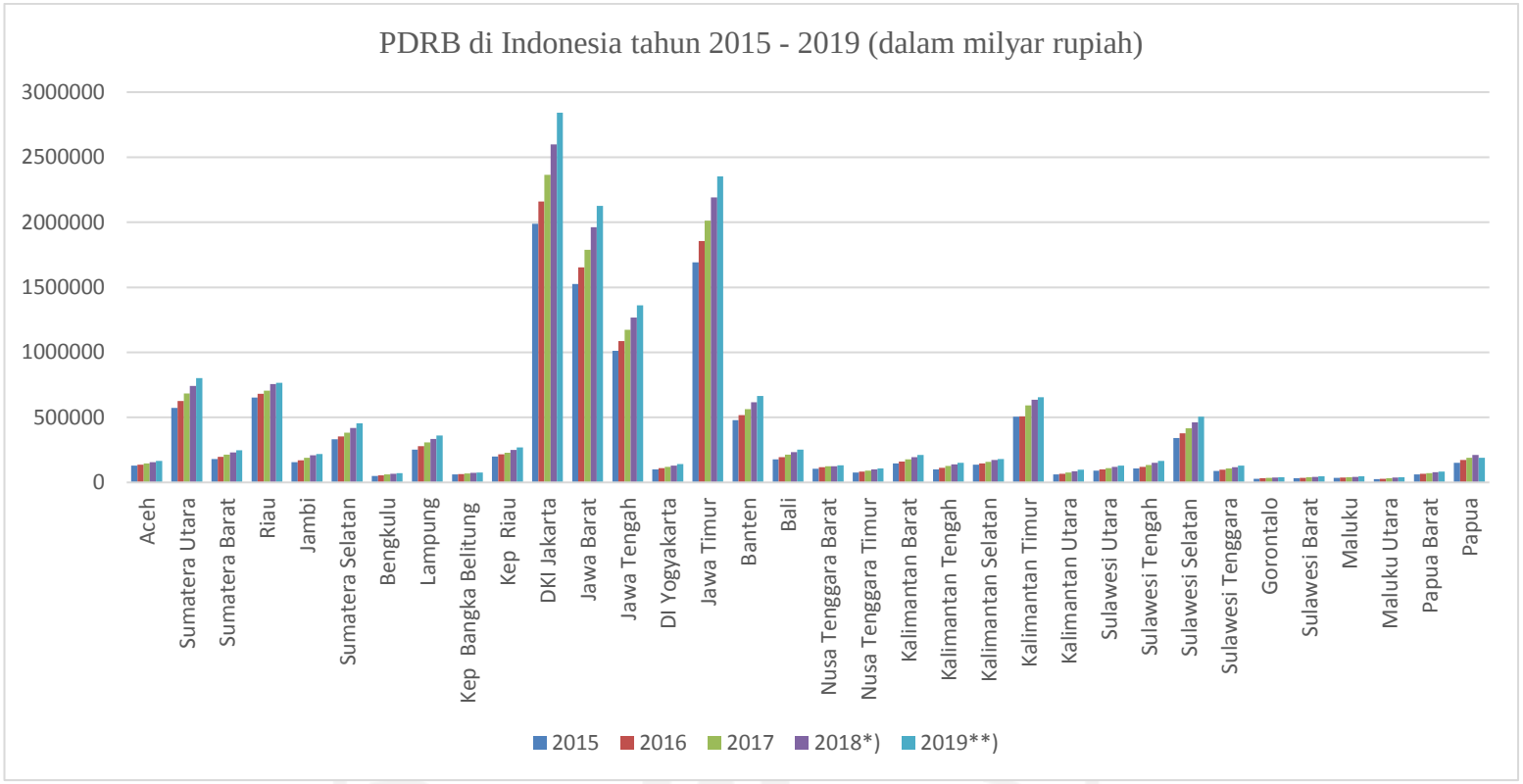
Gambar 1.1 di atas, menunjukkan bahwa angka kemiskinan mengalami naik turun dalam dekade 5 (lima) tahun terakhir di setiap Provinsi. Angka kemiskinan tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan angka di atas empat juta orang, sedangkan jumlah orang miskin terkecil ada di Provinsi Kalimantan Timur hanya sekitar empat puluhan ribu orang. Angka kemiskinan tertinggi di seluruh provinsi terjadi pada tahun 2015.

Bantuan sosial sebagai salah satu bentuk peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Selain peran pemerintah, pananggulangan kemiskinan juga menuntut pemerintah daerah, dan masyarakat miskin agar menjadi gerakan yang menghasilkan angka kemiskinan signifikan. Maisng-masing level pemerintah dan masyarakat bisa berperan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Upaya menanggulangi kemiskinan, juga membutuhkan kesadaran masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan. Kesadaran masyarakat untuk bersekolah juga perlu diperhatikan agar masyarakat memiliki kualitas yang baik.

Peran pemerintah Daerah salah satunya dengan mencipatakan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi itu dapat menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan domestk bruto dari tahun sekarang dibandingkan pendapatan domestk bruto tahun sebelumnya (Ginting *et al*, 2013).

Penelitian ini menggunakan variabel PDRB berdasar harga konstan dengan tahun dasar 2010. Pemilihan variabel PDRB dan tidak memilih variabel pertumbuhan ekonomi, karena PDRB menggambarkan total out put yang dihasilkan suatu daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi suatu daerah masyarakat suatu daerah. Salah satu penyebab kenaikan PDRB adalah kenaikan penghasilan masyarakat termasuk masyarakat miskin, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan out put total suatu daerah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pengaruh total out put barang dan jasa terhadap jumlah penduduk miskin, tetapi bukan peningkatannya, sehingga penelitian ini memilih PDRB sebagai variabel penelitian dan bukan laju pertumbuhan ekonomi.

Data yang digunakan, diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh BPS. Data PDRB di seluruh Indonesia, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 2 Grafik PDRB Provinsi di Indonesia tahun 2017-2018

Data pada gambar 1.2 di atas, menunjukkan bahwa PDRB di setiap Provinsi mengalami kenaikan dari tahun 2015 – 2019 dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahun tumbuh dengan baik di daerah. Dengan hadirnya bantuan sosial tentunya semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dengan bantuan sosial daya beli masyarakat meningkat baik. Bantuan sosial dan bantuan ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Putra, *et al,* 2015).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka hubungan pertumbuhan ekonomi dan bantuan sosial memiliki korelasi. Keduanya memiliki peran dalam memutar aktivitas ekonomi daerah. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada orang miskin, akan dimanfaatkan untuk mendapatkan barang dan jasa di daerah. Namun, ironisnya penanggulangan angka kemiskinan di Indonesia belum mencapai target RPJMN. Target angka kemiskinan tahun 2015 diharapkan sebesar 9,0% – 10,0%, capaian dalam tahun 2015 baru sebesar 11,13%. Sementara target Nawacita pada tahun 2019 sebesar 5,0%, dibandingkan dengan target tahun 2019 yakni hanya sebesar 7-8% (Iryanti, 2016).

Pada tahun 2015, Indonesia memiliki PDRB sebesar USD 861,93 milyar dengan PDB perkapita 3834,06. Namun, angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi dan ketimpangan pendapatan yang buruk (Rustiadi

dan Nasution, 2017). Kemiskinan masih menjadi persoalan dan perhatian berbagai pihak.

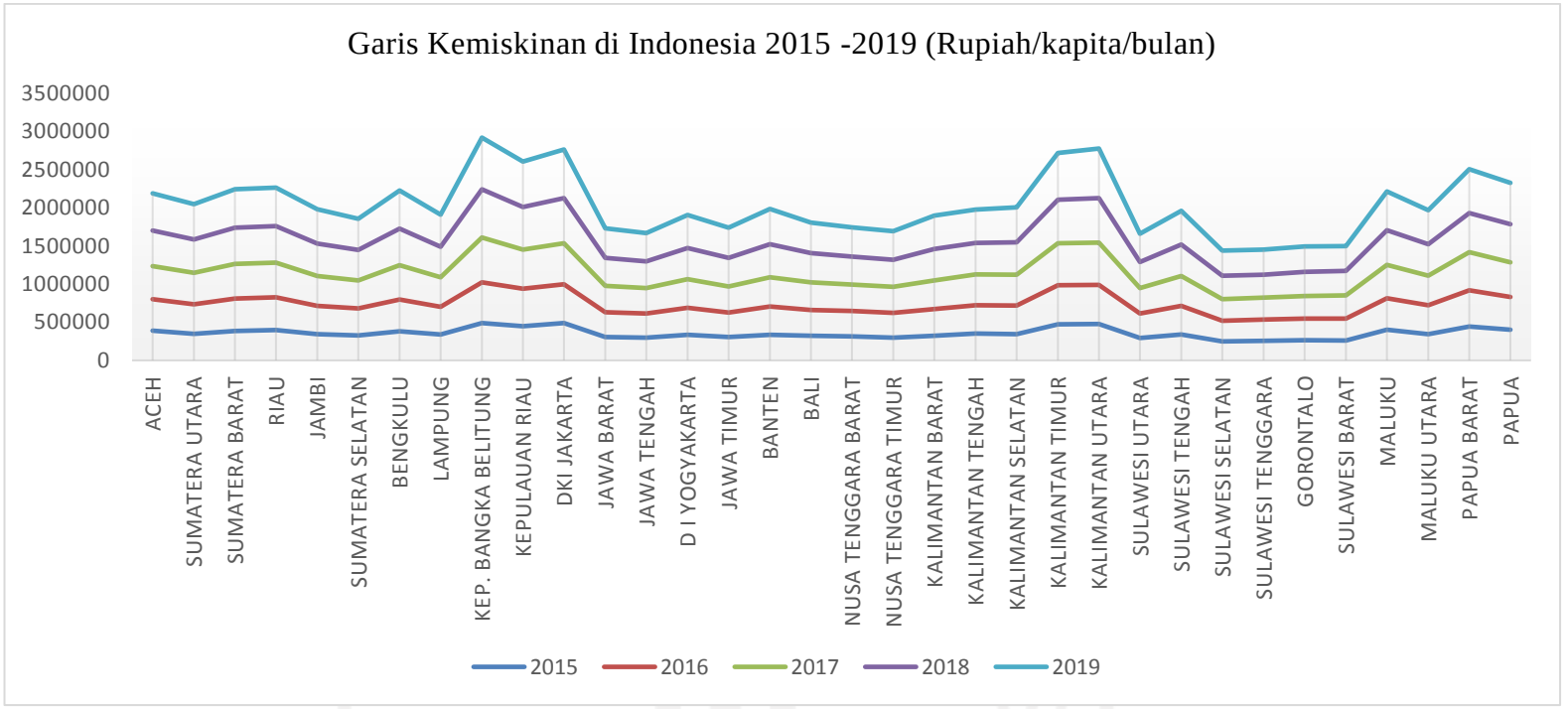
Kemiskinan masih menjadi wacana yang menarik untuk dicarikan solusi pemecahannya. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis karena berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Jadi pemecahannya pun harus terkait dan komprehensif dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Komite Penanggulan Kemiskinan Indonesia, 2002). Penanggulangan kemiskinan membutuhkan kebijakan yang tepat dengan memperhatikan latar belakang dan kultur masyarakat miskin yang akan menjadi sasaran kebijakan. Hal ini dilakukan untuk dapat mengubah status dan kondisi kemiskinan untuk menjadi bangkit dalam semangat kehidupan yang lebih berorientasi pada hasil pemenuhan ekonomi keluarga.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan telah melalui beberapa program dan kegiatan, salah satunya program bantuan sosial. Program bantuan sosial secara simetris di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, berdasarkan data yang terkumpul memiliki dampak yang berbeda-beda, walaupun jenis dan bentuk bantuan sama di seluruh Indonesia, sehingga angka kemiskinan secara nasional masih tinggi. Penyeragaman bantuan sosial di seluruh wilayah Indonesia, perlu analisis melalui beberapa kajian agar efektif dan efisien. Pendekatan program belum memperhatikan kondisi

geografis tempat tinggal, budaya masyarakat, dan garis kemiskinan masing-masing Kabupaten/Kota.

Munculnya bantuan sosial, dengan menggunakan konsep kemiskinan BPS, dimana kemiskinan diukur melalui pendekatan ketidak mampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approuch*). Nilai kebutuhan dasar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis Kemiskinan (GK) makanan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis kemiskinan menjadi patokan dalam mengukur kemiskinan seseorang. Bisa saja terjadi perbedaan antar Daerah. Sementara, suatu Daerah memiliki garis kemiskinan dengan tinggi, tetapi ada pula Daerah memiliki garis kemiskinan yang rendah. Hal ini akan mempengaruhi tingkat angka kemiskinan yang didasarkan pada ketentuan garis kemiskinan.

Garis kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu 2015 – 2019 seperti gambar berikut:



Gambar 1 3 Besaran Garis Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.3 di atas dapat diketahui bahwa seseorang berada dalam kemiskinan apabila memiliki penghasilan dibawah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kapita per bulan. Garis kemiskinan tertinggi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Provinsi Kepalauan Bangka Belitung. Sedangkan garis kemiskinan terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Data garis kemiskinan tersebut, tentunya akan menentukan kelompok miskin yang berbeda-beda di masing-masing provinsi. Namun, kebijakan berupa program penanggulangan kemiskinan, secara nasional diseragamkan dalm bentuk yang sama. Penyeragaman ini seperti jumlah bantuan sosial sama, bentuk bantuan sosial sama dan dengan penanganan yang sama. Penyeragaman kebijakan di seluruh Indonesia tersebut, menyebabkan bantuan sosial belum tentu signifikan mengurangi kemiskinan.

Progam penanggulangan kemiskinan di Indonesia belum memiliki dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan yang diharapkan, artinya kemiskinan masih siginifikan di negeri ini (Iryanti, 2012). Banyak bamtuan sosial yang dikucurkan pemerintah selama era orde baru dan era reformasi, dengan jumlah sasaran yang banyak pula, namun jumlah penduduk miskin masih tetap tinggi. Efektivitas kebijakan menjadi penting untuk dianalisis agar penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Efektif berkaitan dengan hasil, sedang efisien berkaitan dengan proses. Hal

ini dilakukan agar pada saatnya, pemerintah dapat melakukan penyusunan kebijakan yang tepat dan cepat dalam penanggulangan angka kemiskinan.

Focus penelitian ini adalah analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan perhatian pada upaya pemerintah dalam bentuk kebijakan publik yang membagi peran dari masing-masing subyek dan obyek. Subyek kebijakan adalah pemerintah, sehingga apa peran pemerintah dan peran pemerintah daerah. Obyeknya adalah berkaitan dengan masyarakat miskin. Peran pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan kewenangan memberi bantuan sosial berupa BPNT dan PKH.

Peran pemerintah Kabupaten/Kota dapat diketahui berdasar data PDRB selama kurun waktu 5 tahun. Kenaikan data PDRB dalam setiap tahunnya, perlu dilihat dampaknya terhadap jumlah penduduk miskin. Kenaikan PDRB berdampak kenaikan petumbuhan ekonomi, dengan partumbuhan ekonomi dapat berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan (Putra, *et al*, 2015). Sedangkan masyarakat miskin sebagai obyek dan subyek kemiskinan, memiliki peran strategis dalam menekan jumlah penduduk miskin, melalui peningkatan kualitas hidup. Bantuan sosial berupa BPNT dan PKH memberi peluang orang miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup. BPNT memberikan bantuan kebutuhan pokok, yakni berupa beras, telur dan minyak. Orang miskin dapat menekan pengeluaran kebutuhan

beras. Sedangkan PKH memberikan biaya sekolah bagi anak usia SD sampai dengan SMA. PKH dapat meningkatkan kualitas hidup orang miskin. Dengan demikian melalui PKH orang miskin dapat memperpanjang rata-rata lama sekolah.

Pemikiran di atas mendorong penulis untuk menganalisis bantuan sosial, PDRB, Rata-Rata Lama Sekolah masyarakat Indonesia, dan IPM sebagai variabel kontrol dalam hubungannya dengan kemiskinan. Variabel kontrol ini dimasukkan untuk mengendalikan atau menghilangkan pengaruh residual agar tidak bias. .Analisis akan dilakukan pada Kabupaten seluruh Indonesia, Kota seluruh Indonesia, dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Analisa juga ingin menganalisis Kabupaten/Kota mana dengan penanggulangan kemiskinan yang tinggi dan Kabupaten/Kota mana dengan angka penanggulangan rendah. Selain itu akan dipilah antara Kabupaten/Kota di pulau Jawa dengan Kabupaten/Kota di luar pulau Jawa. Jumlah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 kabupaten/kota

Penelitian serupa dilakukan di daerah tertinggal wilayah Indonesia oleh Putra, *et al*, (2015). Menurut Putra *et al* (2015) bahwa variabel bantuan kelembagaan sosial dan budaya, bantuan infrastruktur, dan bantuan ekonomi dan dunia usaha, hasilnya yang diperoleh signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Sedangkan variabel PDRB tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. Penelitian ini difokuskan pada daerah-

daerah tertinggal saja. Penelitian ini belum mengungkap secara menyeluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan membedakan Kabupaten dan Kota di luar dan di dalam pulau Jawa.

Giovani (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel PDRB, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan hanya dilakukan di Kabupaten/Kota seluruh pulau Jawa. Dengan menggunakan regresi data panel, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jatim, variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini tidak membedakan Kabupaten di pulau Jawa dan Kota di pulau Jawa.

Selain penelitian di atas, dalam tabel di bawah ini merupakan hasil penelitian tentang kemiskinan, dan belum mengungkap pembedaan Kabupaten dan Kota di Indonesia:

Tabel 1-1 Hasil Penelitian Terdahulu tentang Kemiskinan

No.	Judul	Pengarang	VD	VI	Alat	Hasil	Jurnal
1.	Analisis Sosial, Ekonomi dan Kependudukan di Jawa Tengah Menggunakan Model Persamaan Simultan Data Panel Dinamis	1. Supriyanto 2. Nunung 3. Nurhayati, 4. Wuryatmo A Sidik	Kemiskinan	1. Penganggura n 2. IPM 3. Angkatan kerja 4. Jumlah penduduk 5. PDRB	Data Panel, metode terbaik FM	Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah adalah tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	JSSH P-ISSN:2579-9088 Vol. 3 Nomor 1, Maret 2019 |
2.	*Reducing Regional Poverty Rate in Central Java*	Jaka Sriyana	Kemiskinan	1. pertumbuhan ekonomi regional, 2. tingkat upah minimum, 3. jumlah penganggura n, 4. kualitas sumber daya manusia	Data Panel CEM	Data 2011 – 2016. Model efek tetap menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi regional, tingkat upah minimum, jumlah pengangguran, dan kualitas sumber daya manusia. pemerintah	Jurnal Ekonomi dan Kebijakan. Vol 11 (1) (2018): 1-11. DOI: https://doi.org/10.15294/jejak.v11i1.13272 http://journal.

						daerah telah berhasil mengelola masalah kemiskinan di antara Kabupaten dan Kota. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah berada di jalan yang benar dalam kebijakan publik mereka dalam proses pembangunan. Agar lebih efektif dalam pengurangan kemiskinan, pemerintah daerah di wilayah timur harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.	unnes.ac.id/nju/index.php/jejak
3.	*Impact of infrastructure expenses in strategic sectors for Brazilian poverty*	1. Emerson Marinho 2. Guaracyane Campelo 3. João Franc¸ 4. Jair Araujo	Kemiskinan	1. Investasi infrastruktur 2. Pertumbuhan ekonomi 3. Ketimpangan pendapatan 4. Rata-rata tahun sekolah 5. Tingkat penganggura n	Data panel	Kemiskinan di Brasil dikendalikan dengan faktor-faktor penentu lainnya: pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, rata-rata tahun sekolah, tingkat pengangguran, dan belanja pemerintah 1995 – 2011. hubungan terbalik yang signifikan antara investasi	EconomiA 18 (2017) 244–259. www.sciencedirect.com

				6. Belanja pemerintah		publik dalam infrastruktur dan kemiskinan. Uji kausalitas Granger untuk data panel yang diajukan oleh Hurlin dan Venet (2001, 2004) dan Hurlin (2004, 2005) memperkuat validasi hasil.	
4.	*Evaluation of poverty alleviation policy: Can conditional cash transfers improve the academic performance of poor students in Indonesia?*	1. Agus Heruanto Hadna 2. Dyah Kartika	Kinerja akademik siswa miskin	PKH	Data panel	Evaluasi PKH di 6 (enam) provinsi menemukan telah mampu meningkatkan angka partisipasi murni dan tingkat partisipasi kasar untuk siswa sekolah menengah pertama. PKH belum menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam angka partisipasi dan partisipasi kasar di tingkat sekolah dasar. PKH secara signifikan meningkatkan kehadiran siswa di tingkat dasar tetapi, sebaliknya, belum menunjukkan dampak yang signifikan	*Cogent Social Sciences* (2017), 3: 1295548 **http://dx.doi.org/10.1080/23311886.2017.1295548**

						terhadap kehadiran di sekolah menengah pertama. PKH memberikan hasil yang signifikan dalam hal prestasi ujian sekolah di tingkat sekolah menengah pertama.	
5.	*Effects of Conditional Cash Transfers (CCT) in Anti-Poverty Programs. An Empirical Approach with Panel Data for the Mexican Case of PROSPERA-Oportunidades (2002–2012)*	1. Odra Angélica Saucedo Delgado 2. Vivian Kadelbach 3. Leovardo Mata Mata	Kemiskinan	Bantuan Tunai Bersyarat (Pendidikan dan kesehatan)	Data Panel	Program Transfer Tunai Bersyarat (CCT) di Meksiko dan Amerika Latin sejak akhir 1990-an. menganalisis efektivitas program transfer tunai bersyarat. Hasilnya dampak program terhadap penggunaan layanan kesehatan dan pendidikan preventif oleh keluarga miskin tidak dapat dipertahankan dalam jangka Panjang. Kebijakan memerangi kemiskinan dengan intervensi perlindungan sosial di Meksiko kurang efektiv.	*Economies* 2018, *6*, 29; doi:10.3390 www.mdpi.com/journal/economies

6.	*Foreign aid, poverty and economic growth in developing countries: A dynamic panel data causality analysis*	1. Edmore Mahembe 2. Nicholas Mbaya Odhiambo	Kemiskinan	1. Petumbuhan ekonomi 2. Bantuan Asing	Data Panel	Hubungan sebab akibat dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Hubungan sebab akibat searah antara pertumbuhan ekonomi dan bantuan asing. Hubungan searah antara kemiskinan dan bantuan asing. Dalam Jangka Panjang : bantuan asing dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan	*Mahembe & Odhiambo, Cogent Economics & Finance (2019), 7: 1626321 https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1626321*

Tabel 1.1 di atas, bentuk bagian kecil hasil penelitian di bidang kemiskinan. Variabel yang dipakai untuk menganalisis pengaruh kemiskinan diantaranya bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi, IPM, rata-rata sekolah, pendidikan, kualitas sumber daya manusia, pengangguran, PDRB, belanja pemerintah, ifrasturktur, bantuan tunai dan bantuan asing. Variabel-variabel tersebut memiliki dampak terhadap kemiskinan.

Penulis, pada penelitian ini akan menggunakan variabel-variabel yang telah diambil oleh peneliti sebelumnya, dengan obyek penelitan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, yang belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Fokus penelitian ini membedakan antara :

a. Kabupaten dan Kota di Indonesia
b. Kabupaten di dalam pulau Jawa
c. Kabupaten di luar pulau Jawa
d. Kota di dalam pulau Jawa
e. Kota di luar pulau Jawa

Pemilahan wilayah menjadi 5 obyek analisis di atas, sebagai suatu kebaharuan yang belum di teliti oleh peneliti lain. Jurnal yang di temukan penulis, peneliti sebelumnya memfokuskan dalam satu provinsi, seluruh provinsi dengan memilih daerah tertinggal dan dalam satu pulau. Hal ini yang mendorong penulis untuk menganalisis kebijakan penanggulangan

kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Variabel independent yang dipakai adalah bantuan sosial berupa BPNT dan PKH, PDRB, Rata-rata lama sekolah serta variabel kontrol IPM.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi dari target Nawacita (Rahma Iryanti, 2016). Pemerintah mengambil kebijakan memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial diberikan secara simetris kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Bantuan sosial secara simetris ini perlu diketahui apakah akan menghasilkan penanggulangan kemiskinan secara simetris ataukan asimetris.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, provinsi-provinsi di Indonesia, memiliki perbedaan tingkat penurunan angka kemiskinannya. Bahkan, ada provinsi yang mengalami turun naik dalam kurun waktu 5 (lima tahun) terakhir, tetapi ada provinsi yang mengalami penurunan secara kontinyu. Kebijakan pemerintah mengalokasikan bantuan sosial yang sama kepada warga miskin di seluruh Indonesia, perlu diteliti di masing-masing Kabupaten/Kota agar dapat dicarikan solusi kebijakan sehingga efektif.

Hal tersebut penting karena untuk bahan evaluasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada masa mendatang. Apakah kemiskinan pada

semua Kabupaten/Kota mengalami penurunan secara signifikan. Permasalahannya angka kemiskinan yang belum mencapai target nawacita, sementara bantuan sosial terus diterima mayarakat miskin, sementara kemiskinan tetap juga masih tinggi, mendorong penulis melakukan penelitian ini untuk melahirkan kebijakan pemerintah yang tepat dalam menurunkan angka kemiskinan. Penyeragaman program dalam keberagaman masyarakat miskin, harus perlu dilanjutkan atau perlu mengeluarkan kebijakan baru dalam penanggulangan angka kemiskinan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan bantuan sosial Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan, PDRB dan Rata-Rata Lama Sekolah di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia, berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin secara nasional?
2. Apakah kebijakan bantuan sosial BPNT berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin?
3. Apakah kebijakan bantuan sosial PKH berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin?

4. Apakah PDRB Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin?
5. Apakah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin?
6. Apakah IPM Kabupaten/Kota memiliki dampak terhadap jumlah penduduk miskin?

1.4 Tujuan

Mengacu pada permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dampak bantuan sosial, PDRB, RLS, dan IPM di masing-masing kabupaten dan kota secara nasional maupun di masing-masing kabupaten dan kota berdasarkan pulau Jawa dan pulau luar Jawa.
2. Menganalisis kebijakan memberikan bantuan sosial, PDRB, dan RLS dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Kabupaten/Kota di pulau Jawa dan Kabupaten/Kota di luar pulau Jawa.
3. Menganalisis kebijakan bantuan sosial (BPNT) dalam menurunkan angka kemiskinan.

4. Menganalisis kebijakan bantuan sosial (PKH) dalam menurunkan angka kemiskinan Nasional.
5. Menganalisis pengaruh PDRB Kabupaten/Kota dalam penanggulangan angka kemiskinan nasional.
6. Menganalisis pengaruh RLS Kabupaten/Kota dalam penanggulangan angka kemiskinan nasional.
7. Menganalisis pengaruh dampak IPM terhadap kemiskinan.

1.5 Kontribusi Hasil Penelitian

1. Secara implementatif penelitian ini diharapkan dapat menemukan alternatif kebijakan yang paling efektif dalam penanggulangan program kemiskinan melalui pemilihan dan perlakuan program, agar menghasilkan penurunn kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia. Kebijakan pemerintah akan berbentuk simetris atau asimetris sesuai dengan hasil analisis. Pemilihan kebijakan yang berdampak cepat dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Sebagai bahan pertimbangan melakukan evaluasi program bantuan sosial, peran pemerintah Daerah, dan peran masyarakat dalam mencapai target penanggulangan angka kemiskinan nasional sesuai RPJMN 2020 – 2024.
3. Secara teoritis diharapkan dapat menyusun alternatif-alternatif

permasalahan penanggulangan kemiskinan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bidang kebijakan publik.

4. Secara praktis penelitian ini dapat berkontribusi:
   a. Sebagai bahan dalam pembagian peran antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam memerangi kemiskinan.
   b. Sebagai bahan masukan menemukan program alternatif yang tepat dalam penanggulangan angka kemiskinan di Indonesia.
   c. Sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan.

1.5 Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang di atas diungkapkan bahwa kemiskinan (Y) merupakan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, mampetnya akses politik, tidak stabilnya ekonomi makro, kebijakan pemerintah, pemerintahan lokal yang tidak efektif dan kultur masyarakat (Fatony 2011; Affandi 2017; Hong Ng, *et al*, 2013). Kemiskinan dipengaruhi hubungan antara kebutuhan dasar, kebijakan pemerintah, peran pemerintah lokal dan kualitas masyarakat miskin.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penanggulangan kemiskinan bisa di pengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah lokal dan

peran masyarakat miskin itu sendiri. Hal mengenai kebijakan pemerintah tentunya tidak lepas dari kebijakan moneter dan bidang fiskal. Kebijakan fiskal terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan diantaranya pajak, sedangkan belanja diantaranya konsumsi, pembangunan, subsidi/transfer. Pengeluaran pemerintah salah satunya belanja subsisi/transfer.

Penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan pemerintah berbentuk belanja subsidi diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin (X). Penulis mengambil variabel sebagai perwujudan dari belanja subsidi kepada masyarakat miskin berbentuk BPNT (X1) dan PKH (X2). Peran pemerintah lokal dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui kemajuan daerah. kemajuan Daerah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data kenaikan PDRB (X3). Kebutuhan dasar terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

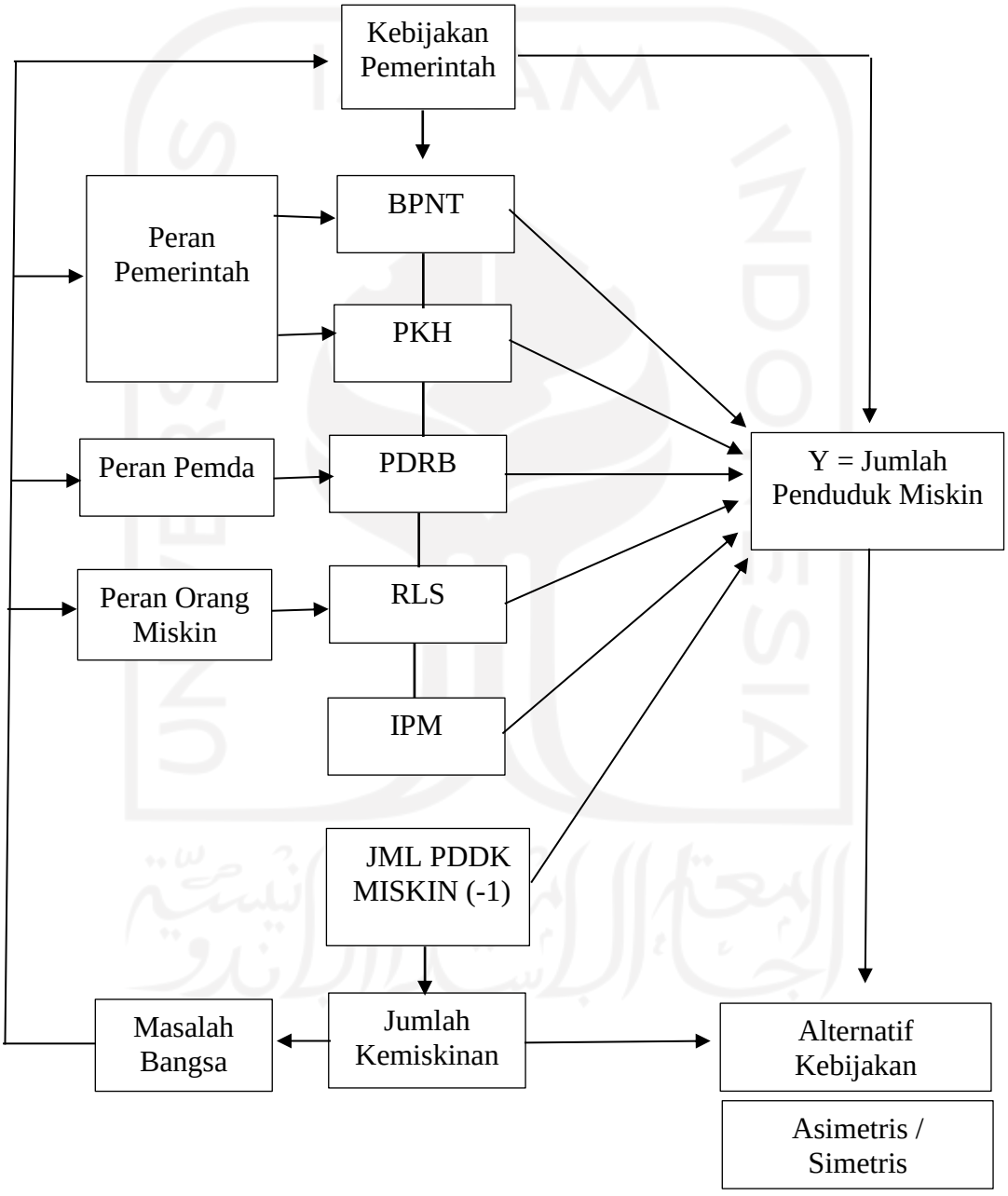
Penelitian ini tidak memasukkan kebijakan moneter sebagai variabel penelitian, karena kebijakan moneter menjadi kebijakan bank sentral, bukan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara dalam penelitian ini ingin mengetahui peran-peran pemerintah pusat dan peran pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan bank sentral akan berlaku dari pusat sampai daerah, namun pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) hanya menerima kebijakan, sehingga seperti inflasi dan suku bunga juga akan

berlaku di level Daerah, tetapi bukan sebagai peran Daerah untuk menentukan besarnya suku bunga dan inflasi.

Masing-msing variabel tersebut yang mempengaruhi kemiskinan. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah pendidikan. Pendidikan sebagai hak masyarakat agar dapat meningkatkan kualitasnya. Tingkat pendidikan masyarkat dapat diukur dari rata-rata lama sekolah (X4). Berdasarkan hal di atas, maka kemiskinan (Y) = *f*[belanja subsidi (X1, X2), pertumbuhan ekonomi daerah melalui PDRB (X3), dan kebutuhan dasaar berupa pendidikan dengan melihat lama sekolah (X4)], yang dikontrol dengan IPM. Penelitian ini mengarah pada analisis variabel BPNT (X1), PKH (X2), PDRB (X3) dan rata-rata lama sekolah (X4) terhadap kemiskinan (Y) di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kelima variabel ekonomi di atas, dipandang oleh penulis bisa dipakai untuk menganalisis sifnifikansi atau tidaknya sebagai variabel pengaruh terhadap kemiskinan. Variabel kontrol yang digunakan adalah variabel kesejahteraan masyarakat yang digambarkan pada data IPM. Variabel dependent yakni kemiskinan (Y). sedangkan variabel independent terdiri dari BPNT (X1), PKH (X2), PDRB (X3) dan Rata-rata lama sekolah (X4). Variabel-variabel ekonomi yang dipilih ini sesuai dengan teori yang diungkapkan dalam penulisan ini. Sedangkan variabel kontrol yang

digunakan adalah IPM (X5). Hubungan tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 4 Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka jumlah penduduk miskin (Y) akan dipengaruhi oleh variabel-variabel:

5. Bantuan BPNT dan bantuan PKH (peran Pemerintah)
6. PDRB (peran Pemerintah Daerah)
7. Rata-rata Lama Sekolah (peran masyarakat miskin)
8. Indeks Pembangunan Manusia (peran Pemerintah Daerah)
9. Kemiskinan

Pemilihan variabel di atas, mengadopsi penelitian-penelitian terdahulu. Variabel-variabel tersebut akan diukur melalui indikator-indikator yang jelas. Indikator-indikator dari variabel akan dibahas dalam bab berikutnya dalam laporan hasil penelitian ini. Gambar 1.4 di atas, menunjukkan bahwa BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM serta jumlah penduduk miskin t-1 berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Setelah hasil analisis terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent, maka akan diketahui pilihan kebijakan yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan. Jumlah kemiskinan yang saat ini menjadi masalah bangsa dalam penganggulangannya akan tergantung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jumlah kemiskinan di Indonesia tergantung pada efektivitas kebijakan pemerintah. Alur berfikir yang dibangun untuk menurunkan jumlah kemiskinan harus dilakukan secara

simultan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat miskin sendiri. Semua peran ini merupakan kebijakan pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan hasil penelitian ini dengan struktur sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kajian Teori dan Kajian Pustaka

Bab III: Metode Penelitian

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Bab V : Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensi (Kuswantoro dan Dewi, 2016; Sari, 2016). Kemiskinan memiliki konsep yang sangat beragam (Efendi, 2019, Nainggolan dan Susantyo**,** 2017). Banyak definisi kemiskinan yang mengemuka dalam diskusi-diskusi. Definisi tersebut kemudian digunakan sebagai standar untuk mengukur kemiskinan dan aksi penanganannya. Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah (Susanti, 2013).

Kata 'kemiskinan' (*poverty*), berasal bahasa Perancis Kuno dari kata *poverte* atau dalam bahasa Latin *paupertas*. Menurut kamus *Oxford*, kemiskinan berarti "keadaan sangat miskin dan kedadaan kualitas yang rendah (Hong Ng, *et al*, 2013). Sayogyo (1985), mengemukakan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan konsumsi beras per kapita. Dimana dalam mengukur batas garis kemiskinan berdasar pada pendapatan yang senilai atau setara dengan 240 kg beras untuk penduduk di desa dan 360 kg beras di kota.

Tingkat kemiskinan penduduk dilihat dari sisi pendapatan dengan pengeluaran kebutuhan dasarnya (Sayogo, 1985)

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memaknai bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (https://www.bps.go.id/kemiskinan-dan-ketimpangan, diakses 27 Nopember 2018)

Menurut BPS untuk menentukan apakah penduduk dikategorikan miskin atau tidak, maka penghitungannya berdasarkan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (https://www.bps.go.id, diakses 27 Nopember 2018).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-

kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain (https://www.bps.go.id/ kemiskinan-dan-ketimpangan, diakses 27 Nopember 2018). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi untuk wilayah perkotaan, dan 47 jenis komoditi untuk wilayah pedesaan (https://www.bps.go.id/kemiskinan-dan-ketimpangan, diakses 27 Nopember 2018).

Pendekatan kemiskinan menurut BPS seperti uraian di atas, bahwa pengukuran kemiskinan menggunakan pendekatan dengan melihat dari sisi kemampunan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs).* Pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan dilihat dari sisi keterbatasan ekonomi rumah tangga yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Ukuran garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS disamakan dengan Rp 293.000,- (USD 25,04) per kapita per bulan pada tahun 2014. Dengan demikian penentuan garis kemiskinan dalam setiap tahun akan berubah. Garis kemiskinan mungkin berubah biasanya secara tahunan dan Bank Dunia menggunakan USD 2 per kapita per hari sebagai standar dasar kemiskinan absolut, yang berarti orang miskin menghasilkan pendapatan di bawah standar akan menempatkan seseorang dalam kategori miskin absolute (Beik dan Arsyianti, 2015).

Sudut pandang lain, menyebutkan bahwa penyebab kemiskinan dimaknai sebagai rumah tangga dengan penghasilan rendah. Kemiskinan didefinisikan sebagai rumah tangga yang berpenghasilan tidak lebih dari $ 1 per hari per orang yang dihargai dengan harga internasional (United Nation, 2005). Kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor budaya dan struktural. Orang miskin tidak memiliki kapasitas untuk mempengaruhi proses sosial, kebijakan publik, dan alokasi sumber daya. Orang miskin juga dikatakan kekurangan akses keterampilan dan pengetahuan yang relevan, pendidikan dan pengembangan pribadi yang dapat meningkatkan mata pencaharian mereka (Korankye, 2014).

Orang dapat dikatakan miskin apabila mereka memiliki pendapatan rendah dan tidak memiliki sumber daya lain yang menopang kehidupan dalam memenuhi makanan, barang-barang material, fasilitas, standar dan layanan, yang memungkinkan mereka bisa memainkan peran dalam kehidupannya, memenuhi kewajiban dan berpartisipasi (UNDP, 2006). Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan itu karena korupsi, tata kelola pemerintahan yang buruk, lapangan kerja terbatas, kurangnya infrastruktur, sumber daya terbatas, akibat perang, kebijakan Bank Dunia, budaya, struktural, tidak punya ketrampilan, dan pendidikan rendah (Korankye, 2014).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kemiskinan dimaknai sebagai satu kekurangan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*)

baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar non makan dalam rangka mencapai taraf hidup yang lebih baik. Pendekatan kemiskinan dengan melihat dari sisi ekonomi, akhirnya melahirkan kebijakan berupa peluncuran berbagai program kemiskinan, tanpa memperhatikan faktor lain di luar pemenuhan kebutuhan dasar, dampak kebijakan pemerintah, politik, dan sosial.

Penanggulangan kemiskinan tentunya tidak hanya melihat dengan cara pandang sisi ekonomi belaka, tetapi faktor lain juga perlu dipertimbangkan dengan baik. Kemiskinan dilihat dari cara pandang ekonmi, maka pemerintah mengambil kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan bantuan sosial. Sedangkan faktor lain itu seperti kearifan lokal yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri sebagai hasil dari interaksi masyarakat dan lingkungannya.

Latar belakang belakang komunitas masyarakat dengan berbagai kultur, juga akan mempengaruhi kemiskinan. Kearifan lokal diperlukan sebagai alat pengentasan kemiskinan, mengingat kemiskinan merupakan masalah kompleks yang tidak bisa di atasi melalui pendekatan ekonomi belaka, tetapi harus terkait dengan dinamika sosial, politik dan budaya yang melekat dalam suatu komunitas. Masalah multidimensional membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, komunitas dan kearifan lokal itu sendiri (Possumah, *et al*, 2018).

Beberapa teori di atas, dapat diketahui bahwa kemiskinan merupakan segala bentuk keterbatasan ekonomi baik bahan makan maupun material, politik, sosial budaya, partisipasi dan distribusi anggaran pemerintah, pemerintah yang buruk, korupsi, sumber daya terbatas, infrastruktur terbatas, lapangan kerja, pendidikan dan ketrampilan. Kemiskinan ini memerlukan penanganan serius dari pemerintah dalam menetapkan kebijakannya. Otoritas otoritas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat mendorong penargetan kebijakan atau program agar lebih tepat sasaran karena sangat diperlukan untuk pengurangan kemiskinan (Guritno, *et al*, 2018).

Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural (Sari, 2016). Kemiskinan bisa disebabkan karena faktor natural, kultural dan struktural. Tiga penyebab kemiskinan ini memiliki cara penanggulangan yang berbeda-beda. Intervensi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan hendaknya mengkaji penyebag kemiskinan tersebut. Harapan yang diinginkan agar penanggulangan kemiskinan bisa efektif dan efisien, guna mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Penyebab kemiskinan natural adanya keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung akibat munculnya berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan (Sari, 2016)

Memperhatikan definisi dan faktor penyebab kemiskinan di atas, akhirnya muncul kebijakan-kebijakan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin melalui: bantuan sosial, peningkatan nilai tambah barang dan jasa agar pendapatan daerah menjadi naik, serta fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini untuk meningkatkan kemakmuran dalam kesejahteraan umum. Kesejahteraan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan, material, spiritual dan sosial suatu peduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Kesejahteraan umum dan kemiskinan memiliki hubungan negatif. (Andykha, *et al*, 2018).

Di Indonesia, seseorang dapat dikatakan miskin, dengan indikator-indikator:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun kelompok.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal danterpencil (BPS, 2012)

Sembilan item di atas, yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan dan menghitung besaran angka kemiskinan Daerah di seluruh Indonesia. Penghitungan angka kemiskinan untuk menganalisis tingkat

kemiskinan suatu Daerah, berangkat dari indicator-indikator di atas, berlaku di seluruh Indonesia. Namun, hal yang kadang menghambat penanggulangan kemiskinan bisa juga disebabkan oleh kultur masyarakat sekitar. Contohnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, kultur masyarakat yang berpedoman pada nalai-nilai yang diajarkan para leluhurnya seperti rasa *ewuh pekewuh* (malu), *rikuh* (rasa tidak nyaman) agar tidak terkesan *angkuh* (sombong) kadang membawa pada sikap penampilan yang sangat sederhana, sehingga *performance* mereka terlihat dalam kondisi miskin, sehingga mereka menjadi bidikan untuk di data sebagai orang miskin.

Kesederhanaan terlihat pada bangunan rumah, kepemilikan asset yang berlebih, kepemilikan sandang, dan pangan dengan seadanya. Namun, mereka memiliki tekat *sengguh tan mingkuh* (tanggungjawab melaksanakan yang seharusnya dilaksanakan), maka pemerintah tidak hanya *semaguh* (siap melaksanakan) tanpa menganalisis latar belakang dan kultur masyarakat miskin. Latar belakang masyarakat yang berbeda-beda akan memunculkan perilaku hidup yang berbeda pula.

2.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari dua suku kata yakni kebijakan dan publik. Kebijakan (*policy*) adalah "seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-

pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan". Kata publik berbeda makna dengan kata masyarakat. Masyarakaat dimanknai sebagai suatu sistem hubungan sosial dalam komunitas lingkungan hidupnya dan tinggal secara bersama-sama. Di dalam masyarakat tersebut terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan anggota-anggotanya (Heliany, 2019)

Kata kebijakan publik berasal dari bahasa Inggris, *'public policy'*, *"public*" diterjemahkan "publik" dan "*policy*" diterjemahkan "kebijakan" (Islamy, 2009). Mengingat pentingnya kebijakan publik dalam kehidupan bernegara bagi semua warga Negara dalam suatu Negara, sehinga ada beberepa perspektif dan konsep yang berbeda dalam memberikan definisi tentang kebijakan publik diantaranya konsep disajikan oleh para sarjana terkenal seperti Thomas Dye, William Jenkins, Thomas Birkland, Moran Michael, Rein Martin, Robert Godin (Brajshori, 2017).

Kebijakan adalah pilihan untuk "memilih melakukan dan tidak memilih melakukan tindakan" (Munadi, 2008). Artinya kebijakan publik suatu tindakan untuk memilih dan tidak memilih melakukan sesuatu tindakan. Jadi, melaksanakan atau tidak melaksanakan, bertindak atau tidak bertindak terhadap sesuatu hal dikatakan sebagai suatu kebijakan. Berangkat dari pendapat Munadi (2008) yang mengembangkan teori tentang kebijakan publik, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan, seperti gambar berikut:

	Peran Strategis	Peran tidak/kurang strategis
	I	II
Masyarakat mampu melaksanakan	Pemerintah dengan masyarakat	Masyarakat
	III	IV
Masyarakat tidak mampu melaksanakan	Pemerintah	Pemerintah (Dibiarkan)

Gambar 2 1 Kebijakan Peran Strategis Penanggulangan Kemiskinan

Sumber : Munadi (2008)

Mengadopsi teori kebijakan berdasarkan gambit 2.1 di atas, penanggulangan kemiskinan sebagai kebijakan strategis semua pihak masuk dalam kuadran I. Peran strategis penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Secara bersama-sama baik pemerintah maupun pemerintah daerah dan masyarakat dapat memainkan perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pemerintah memotivasi dan menyediakan akses pendidikan, sedang masyarakat memiliki kesadaran dan keinginan penuh untuk bersekolah yang dilihat dari RLS. Keinginan untuk meningkatkan RLS dengan bersekolah masuk dalam kuadran II.

Kebijakan penyediaan akses pendidikan, dan kebijakan peningkatan PDRB menjadi peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi masuk dalam kuadran III.

Jika akses transportasi tidak bisa disediakan karena kondisi georgrafi dan sebagainya untuk menuju titik pendidikan dan titik-titik ekonomi masuk dalam kuadran IV. Berdasarkan teori kebijakan dengan menggunakan pembagian peran di atas, maka masyarakat miskin tidak hanya menjadi obyek kebijakan, tetapi sekalisgus sebagai subyek kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan membutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal perumusan dan implementasinya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik menjadi disiplin ilmu yang terus diteliti agar dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan publik untuk tujuan kesejahteraan warga negara. Hal tersebut berimplikasi pada istilah p*ublic policy* sering diucapkan dalam dinamika penyelenggaraan Negara. Agar dalam kehidupan bernegara tidak terjebak dalam memahi kebijakan publik, dunia akademik dalam mendefinisikan *public policy* melalui konsep dan batasan yang dikemukakan oleh para ahli, seperti diuraikan di atas.

Definsi *public policy* menurut Dye bahwa *public policy is whatever government choose to or not to do* (apaupun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan) (Dye 1987 : 1). Ada dua hal dalam definisi ini yaitu hal untuk dilakukan atau hal tidak dilakukan. Dua hal tersebut terlihat kurang begitu jelas mengenai bentuk yang dilakukan dan bentuk yang tidak dilakukan, dalam hal ini adalah bentuk peraturan, atau keputusan dan

atau tindakan pemerintah. Mengarah pada subyek "pemerintah", karena definisi kebijaan publik adalah *"What government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs",* (apa yang pemerintah katakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dari program-program pemerintah (Edward III, 1980).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, secara sederhana kebijakan publik dapat diartikan sebagai "apa saja yang dilakukan oleh pemerintah" (*the actions of government*). (Islamy, 2009). Perbedaan definisi mengenai kebijakan publik di atas, memberikan gambaran bahwa kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah, sebagai lembaga yang berwenang membuat peraturan atau keputusan. Dengan demikian hanya lembaga otoritatif yang memiliki kewenangan yang menentukan bentuk kebijakan yang diperlukan (William N. Dunn, 1999).

Kebijakan publik dapat disusun oleh pemerintah dan lembaga lain yang memiliki kewenangan, setelah melalui beberapa tahapan, agar kebijakan publik benar-benar sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara tepat sesuai permasalahan yang dihadapi. Tahapan yang dimaksud adalah:

1. Penyusunan Agenda

   Dalam penyusunan agenda ini disusun, hal-hal apa saja yang masuk sebagai masalah public dan agenda publik. Kemudian perlu disusun

prioritas yang dimasukkan dalam agenda publik, untuk mendapatkan prioritas pembahasan dalam kebijakan public dibanding dengan isu-isu yang lainnya. Isu masalah publik (*policy issues)* akan menjadi masalah publik (*policy problem*). Berangkat dari isu kebijakan public sebagai produk atau fungsi dari sebuah perdebatan tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah kebijakan. Masalah publik yang telah menjadi agenda, kemudian harusnya pemerintah menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan lain untuk kemudian disusun kebijakan publik. Penyusunan kebijakan publik tetap harus memperhatikan urgensi dan esensi kebijakan dan keterlibatan para pemangku kebijakan dalam penyusunannya.

2. Formulasi kebijakan

   Agenda publik akan menjadi alternative-alternatif dalam perumusan kebijakan publik. Beberapa masalah publik yang telah menajdi agenda publik, dirumuskan untuk dapat dipilih kompetitif dari sekian masalah yang telah masuk dalam agenda publik.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

   Dalam tahap ini pemerintah akan menyusun rumusan kebijakan publik yang telah dipilih, otorisasi pemerintah berdasar kedaulatan rakyat, sebagai warga Negara harus mengikuti pada kebijakan yang akan disusun.

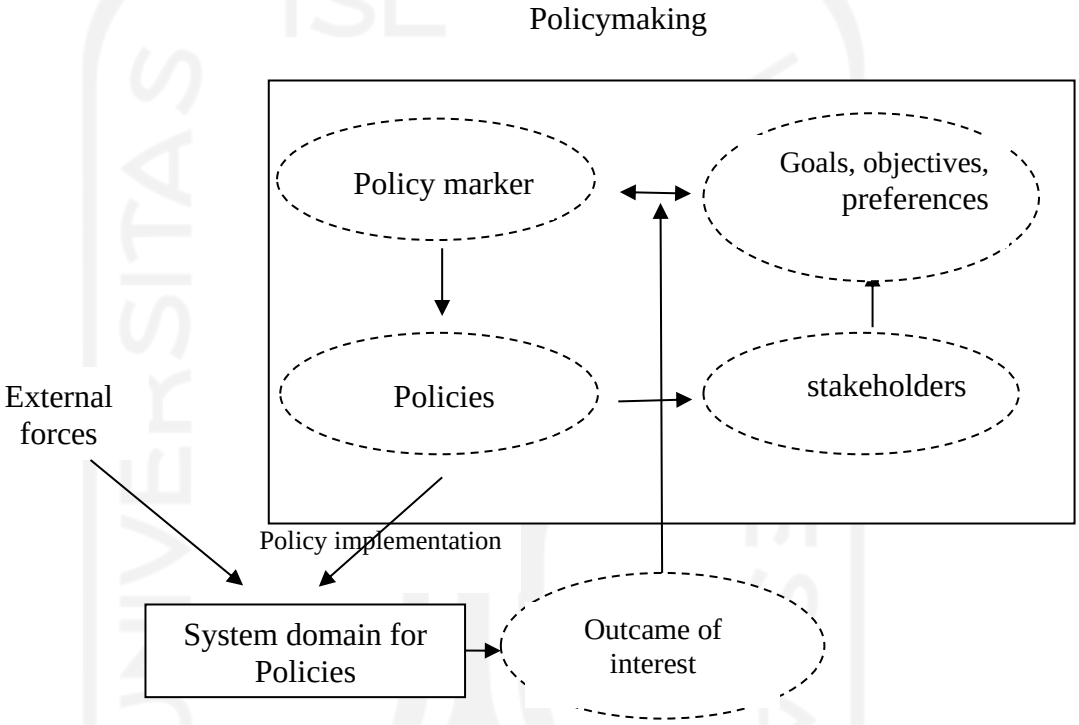
4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

   Penilaian atau evaluasi dilakukan pada seluruh proses penyusunan kebijakan publik. Setiap tahap dilakukan evaluasi untuk mendapatkan perenungan/pemikiran baik program yang akan dilaksanakan, dampak dan implementasinya (William N Dunn,1999)

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan publik akan menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang akan diusulkan dalam tindakan yang berkenaan dengan suatu yang menjadi masalah publik. Kebijakan publik merupakan suatu proses dari satu tahapan ke tahapan lain yang harus terintegrasi. Kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor Negara dalam dalam penyusunan baik masyarakat (aspirasi), eksekutif, dan legislatif serta yudikatif memiliki dampak memaksa untuk dipatuhi (otoritatif), dan memiliki tujuan (Anderson, 1984). Melihat beberapa definisi dan ruang lingkup kebijakan publik di atas, dapat dikatakan bahwa munculnya kebijakan dikarenakan adanya masalah publik, sehingga menuntut pemerintah untuk melakukan tindakan nyata tetapi tidak hanya dinyatakan, menuntut pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan, dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu, serta senantiasa ditujukan bagi kepentingan anggota masyarakat (Islamy, 2009).

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan publik berangkat dari masyarakat dan bermuara pada masyarakat. Artinya kebijakan muncul karena

masalah publik., dan produk dari proses berupa kebijakan bermuara untuk kepentingan masyarakat dalam penyelesaian masalah. Tahapan penyusunan kebijakan publik sebagai suatu proses,.



Gambar 2 2 Proses Pembuatan Kebijakan

Berdasarkan gambar 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan publik itu merupakan suatu proses dalam perumusannya, yang menginginkan suatu tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan demikian keragaman definisi kebijakan publik yang begitu luas seperti diungkapkan oleh para ahli, akhirnya mengerucut pada bentuk tindakan pemerintah

sebagai *policy marker* untuk menghasilkan produk kebijakan yang dapat dimplementasikan dalam domain kebijakan dengan tujuan menghasilkan penyelesaian persoalan yang baik untuk kepentingan kesejahteraan warga negara.

Untuk mengatasi suatu masalah publik seperti kemiskinan misalnya, tindakan (upaya) pemerintah berupa kebijakan mengarah pada strategi untuk mendapatkan hasil yang baik berupa penanggulangan kemiskinan yang signifikan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat kebijakan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan angka kemiskinan melalui kegiatan proses pendataan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan berupa program kemiskinan berupa dampak.

2.1.3 BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

BPNT merupakan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbentuk bantuan sosial non tunai. Awalnya bantuan ini bernama Raskin yang kemudian berganti nama Rastra. Program Raskin (beras untuk rumah tangga miskin) diperuntukkan kepada rumah tangga miskin yang terbebani dalam hal membiayai kebutuhan sehari-hari dan juga dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu pangan. Sebagai program nasional, Raskin yang dimulai sejak 1998 telah mengalami perubahan dan perbaikan konsep dan proses implementasi

program dengan tujuan akhirnya adalah pengentasan kemiskinan (Rahayu, Waimbo, Kabiay, 2019)

BPNT merupakan program tindak lanjtu dari Rastra (beras sejahtera). BPN ini didistribusikan kepada warga miskin dalam bentuk kupon elektronik (*e-voucher*). Tujuan *e-voucher* ini untuk menjamin 6T : Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Administrasi. *E-voucher* ini digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan bernutrisi, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian tujuan BPNT adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin; mendorong usaha eceran rakyat; memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin; dan mengefektifkan anggaran (Kementrian Koordiator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019 : 3).

Bantuan Pangan Nontunai, yang selanjutnya disebut BPNT, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk nontunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya dan yang digunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong. Untuk daerah dengan akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT akan diatur dengan kebijakan pemerintah (Kemensos, https://www.kemsos.go.id/uploads/topics/, diakses tanggal 30 Juli 2020).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT mendapatkan transfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk transfer melalui Bank yang ditunjuk Pemerintah. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kemudian dapat melakukan pembelian dengan menggunakan kartu kombo e-warong (Pasal 23 Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018). Kartu kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera. E-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur (Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017).

BPNT merupakan tindak lanjut dari program Raskin. Program raskin KPM menerima barang berbentuk beras, sedangkan BPNT berbentuk transfer, dimana setiap KPM mendapat kartu elektronik yang dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur dan bahan pokok lainnya. KPM tidak lagi berbondong-bondong ke posko tempat pengambilan beras, melainkan datang ke e-warong yang telah ditunjuk sesuai dengan kebutuhannya. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial sebagai implementasi program penanggulangan kemiskinan diantaranya:

perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.

Keragaman program dari pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu merupakan kekuatan sekaligus tantangan dalam pembangunan. Di satu sisi, ada banyak aspek pembangunan manusia yang diakomodasi oleh berbagai program tersebut. Ditambah lagi, semua program memiliki kelengkapan umum untuk dijalankan, seperti kejelasan payung hukum, ketersediaan mekanisme seleksi penerima manfaat, serta ketersediaan mekanisme penyaluran bantuan. Di sisi lain, variasi pengelolaan program yang cukup kompleks serta perbedaan basis data yang digunakan menjadi tantangan di dalam pelaksanaan program, yang dapat berpengaruh kepada efektivitas program. Hasil evaluasi terhadap program bantuan sosial menunjukkan adanya keberhasilan dan kekurangan (TNP2K, 2018)

Bentuk bantuan sosial seperti BPNT memiliki tujuan:

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Pemanfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan gizi yang lebing seimbang KPM.
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.

4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
5. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goalSDGs).*

Sedangkan manfaat BPNT adalah :

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
3. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil yang sudah berpengalaman dalam usaha penjualan telur dan beras (Risalah Rapat Terbatas, No. R-139/SesKab/ DKK/7/2016, 29 Juli 2016

Sasaran BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data sasaran ini bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin, yang merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015. Data Terpadu Program Penangangan Fakir Miskin (DT-PPFM) dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data), yang dibentuk melalui SK Mensos Nomor 284/HUK/2017 tanggal 21

September 2016. Data penerima bansos rastra maupun banson BPNT disampaikan oleh Kemensos kepada Pemerintha Daerah. Artinya data penerima ditentukan oleh pusat, dan pemerintah Daerah menerima data dan melaksanakan proses persiapan penyaluran. Kewenangan penyaluran tersentralistik dari pusat, sehingga dimungkin Pemerintah Daerah tidak menganalisis distribusi dalam setiap bulannya.

Berdasarkan teori di atas yang dapat dijadikan indikator BPNT adalah:

1. *E-voucher* aktif dan dapat digesek
2. Penerimanya orang yang masuk dalam kategori miskin
3. Kebutuan beras KPM terpenuhi dalam satu bulan
4. KPM dapat memilih kualitas beras dan kebutuhan nutrisi lainnya
5. Barang yang diterima tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas
6. E-warung berada di dekat tempat tinggal KPM

2.1.4 PKH (Program Keluarga Harapan)

Program pengentasan kemiskinan telah membantu masyarakat miskin, namun belum mampu mengatasi persoalan non pendapatan (Hadna, 2017; Suntiana, 2015). Di Indonesia mengatasi persoalan penanggulangan kemiskinan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan non pendapatan salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, diarahkan untuk. percepatan penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. (Kemensos RI, 2019 : 9).

Desain PKH ini bertujuan meningkatkan investasi di bidang sumber daya manusia untuk generasi yang akan datang. Program ini menempatkan perempuan pada posisi yang unik sebagai penerima bantuan. Para perempuan penerima bantuan harus mampu mengatur dan mengelola uang bantuan yang diterima sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh pendamping program dimana uang tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya (Suntiana, 2015). Program ini memberikan bantuan keuangan kepada orang miskin, agar dapat mengakses fasilitasn kesehatan dan fasilitas pendidikan.

Sasarannya adalah keluarga yang memiliki lansia, balita, ibu hamil, anak sekolah (SD sampai dengan SMA) dan disabilitas. PKH, mendorong keluarga miskin untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial

dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan (Kemensos RI, 2019 : 9). PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia (Kemensos, 2019, : 9)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanggulangan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Permensos Nomor 1 Tahun 2018).

Menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2018 PKH bertujuan :

1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran PKH selain fakir miskin dan/atau keluarga rentan juga diarahkan untuk daerah-darah pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, dan perbatasan antarnegara yang disebut dengan PKH Akses. Keluarga penerima PKH harus memenuhi komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial. Ketiga komponen ini menjadi indikator sasaran PKH. Kesehatan terdiri dari ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Komponen pendidikan meliputi : anak sekolah dasar/madrasah, sekolah menengah pertama/madrasah tsawawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, dan anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Sedangkan komponen kesejahteraan sosial terdiri dari : lanjut usia 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat (Permensos Nomor 1 Tahun 2018).

Kewajiban KPM sebagai ketentuan penerima PKH, adalah terdaftar dan aktif pada fasilitas pendidikan terdekat. Kewajiban bidang kesehatan adalah pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 70 tahun, dan pada tahun 2018 untuk komponen lanjut usia dibatasi mulai 60 tahun (Kemensos RI, 2019 : 10)

Berdasarkan teori di atas, indikator PKH adalah:

1. Uang yang diterima KPM diamanfaatkan sesuai pemanfaatannya (pendidikan, kesehata, kesejahteraan sosial)
2. Ibu hamil memeriksakan kesehatan ke layanan kesehatan terdekat
3. Anak balita aktif datang di posyandu
4. Anak usia sekolah dasar sampai menengah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal.
5. Anak balita mendapatkan asupan gizi seimbang
6. Lnasia dan disabilitas KPM mendapatkan layanan kesejahteraan sosial

2.1.5 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya (Kuswantoro dan Dewi, 2016). Menurut Fitriani *et al* (2013) bahwa salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah PDRB. Apabila nilai PDRB tinggi, maka diharapkan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut juga tinggi, begitu pula sebaliknya (Fitriani, 2013). Variabel makroekonomi yang paling penting adalah PDRB yang mengukur output barang dan jasa total suatu negara atau wilayah (Dalimunthe, 2017).

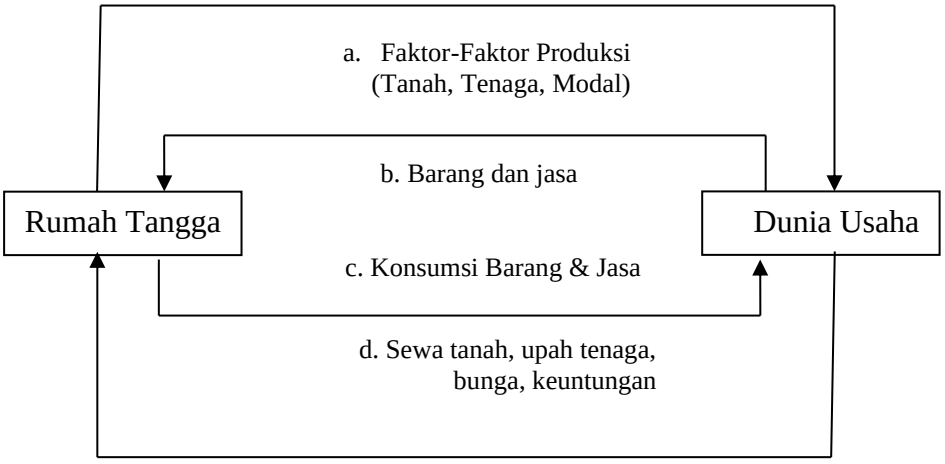
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui intrumen Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Rahman dan Chamelia, 2015; Cahyono, *et al*, 2019). Sedangkan, BPS mendefinisikan PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dihitung dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan harga berlaku dan pendekatan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, untuk melihat strukur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu. Penggunaan data PDRB atas dasar

harga konstan dalam penelitian ini, agar dapat diketahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sehingga bisa dilihat kemajuan perekonomian Daerah Kabupaten/Kota. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah total produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun yang merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis kondisi suatu daerah dalam suatu periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (Dalimunthe, 2017).

Penelitian ini menggunakan PDRB harga konstan, dengan menggunakan harga dasar pada tahun 2010. Penentuan PDRB atas dasar harga konstan ini, agar diperoleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat Kabupaten/Kota dalam kurun periode waktu tertentu. PDRB memuat data tentang seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. PDRB dapat dijadikan alat evaluasi perjalanan pembangunan bidang ekonomi di wilayah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (BPS, 2018).

Siklus perekonomian dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia, seperti alur dlaam gambar di bawah ini



Gambar 2 3 Arus Lingkar Perekonomian Daerah

(BPS, 2018)

Keterangan:

1. Arus penyediaan faktor produksi
2. Arus barang dan jasa yang dipakai konsumen
3. Arus uang dari konsumen kepada produsen
4. Arus uang dari produsen kepada konsumen

Gambar sederhana tersebut menunjukkan bahwa aliran barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan akan sama dengan aliran uang yang diterima konsumen, dan juga sama dengan besarnya nilai yang dibelanjakan oleh konsumen (BPS, 2018). Menurut siklus ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan regional adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi produksi, disebut produk regional, merupakan jumlah nilai tambah (*output* – konsumsi antara) yang dihasilkan oleh

unit-unit produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

2. Ditinjau dari segi pendapatan, disebut pendapatan regional, merupakan jumlah pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
3. Ditinjau dari segi pengeluaran, disebut pengeluaran regional, merupakan jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan ekspor neto suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) (BPS, 2018).

Produktivitas suatu daerah dicerminkan oleh produk domestic, sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sudut pendapatannya, setelah diperhitungkan aliran pendapatan yang keluar masuk darah tersebut (BPS, 2018). Produktivitas ini dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus:

$$PE = \frac{PDRBt2 - PDRBt1}{PDRBt1} X100\%$$

Menurut Badan Pusat Statistik salah satu indikator penting untuk menganalisis kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode

tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam kurun waktu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar (BPS, 2018)

BPS dalam menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Produksi. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
2. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

3. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari
    a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba.
    b. Konsumsi pemerintah
    c. Pembentukan modal tetap domestic bruto.
    d. Perubahan inventori.
    e. Ekspor neto, ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor (BPS, 2018)

Data PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atausetiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan

usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.

4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk menganalisis pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Berdasarkan teori di atas, yang dapat dijadikan indikator PDRB adalah:

1. Jumlah kenaikan PDRB dari tahun sebelumnya
2. Jumlah barang dan jasa yang produksi
3. Jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi
4. Besarnya pertumbuhan ekonomi

2.1.6 Rata-rata Lama Sekolah

Kemiskinan sering kali dikaitkan dengan sektor pendidikan dikarenakan fungsi pendidikan sebagai driving force atau daya penggerak transformasi masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan (Jatmiko, 2018). Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kemiskinan tinggi. Tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi pada beberapa faktor seperti ekonomi rendah, kesehatan, pertumbuhan dan pendidikan. Pendidikan ini memainkan peran yang sangat

penting dalam membangun masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterampilan dan pengetahuan (Efendi, 2019). Tingkat Pendidikan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari rata-rata lamanya sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal (Jatmiko, 2018). Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak Sedangkan cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

$$MYS = \frac{1}{P15}\sum_{i=1}^{P15}(LS\ ke - i$$

(https://sirusa.bps.go.id/, diakses tanggal 20 Desember 2019)

Keterangan:

P15 = Jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas

LS_i = Lama sekolah penduduk ke- i

Indek pendidikan merupakan jawabah akhir dari pembangunan manusia di bidang pendidikan. Indikator pembentuknya adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (Riani, 2006). Menurut BPS, rata-rata lama sekolah

dihitung pada penduduk yang berusia 25 tahun keatas, agar dapat diketahui data sebenarnya, mengingat penduduk usia 25 tahun ke bawah masih sekolah. Dengan demikian rata-rata lama sekolah menunjukkan keadaan pendidikan masyarakat. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, menunjukkan bahwa penduduk memiliki pendidikan yang tinggi pula. Semestinya pendidikan penduduk yang semakin tinggi akan berdampak pada kondisi perekonomian rumah tangga masing-masing.

Jika masyarakat Indonesia memiliki rata-rata lama sekolah (RLS) yang tinggi tentunya akan melahirkan manusia Indonesia yang berkualitas. Kebijakan pemerintah melalui wajar sembilan tahun, bertujuan agar manusia Indonesia memiliki pengetahuan baca tulis yang baik dan wawasan ilmu pengetahuan. Untuk mencapai kesejahteraannya, tentunya pendidikan yang memiliki standar sesuai kebijakan pemerintah. Hal ini untuk membentuk masyarakat yang menguasai teknologi, terampil, cerdas, beriman dan bertaqwa untuk membawa gerbong keluarga yang lebih baik.

Dengan demikian semakin lama masyarakat Indonesia bersekolah akan memiliki kualitas yang unggul. Pengaruh pendidikan akan memberikan peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sepadan atau menciptakan pekerjaan sendiri maupun untuk orang lain. Melalui pendidikan yang tuntas, maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat yang tentunya berdampak pada produktivitas. Produktivitas masyarakat yang

tinggi, bisa meningkatan pendapatan keluarga untuk dapat memiliki pendapatan di atas rata-rata, sehingga keluarga tidak jatuh dalam kemiskinan. Hal ini tentunya pendidikan akan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Rata-rata lama sekolah yang rendah akan menyebabkan pengangguran karena keterbatasan lapangan kerja. Berdasarkan hal tersebut, ketimpangan pendapatan yang mencolok akibat pengangguran, sehingga terjadi ketimpangan pendapatan yang tidak merata, dapat mengakibatkan kemiskinan. Terjadinya pengangguran dan tidak meratanya distribusi pendapatan sebagaimana di maksud di atas, tentunya salah satunya di sebabkan oleh pendidikan yang rendah atau rata-rata lama sekolah yang rendah.

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk memotret pemerataan pendidikan di Indonesia.. Rata-rata lama sekolah mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun. Rata-rata lama sekolah merupakan angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal, yang dapat dikatakan sebagai indikator lamanya bersekolah (Kahar, 2018). RLS dapat digunakan untuk menganalisis kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah (BPS, https://sirusa.bps.go.id/, di akses tanggal 20 Desember 2019).

Dengan demikian untuk menganalisis jenjang pendidikan masyarakat di suatu wilayah Kabupaten/Kota digunakan angka RLS. Hubungannya dengan

kemiskinan, pendidikan masyarakat yang sangat rendah, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan salah satunya memperhatikan kondisi pendidikan masyarakat. Program pengentasan kemiskinan dengan bantuan sosial yang diluncurkan masyarakat bisa dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat pula.

Kualitas SDM karena pendidikan yang rendah menjadi sumber masalah suatu Daerah. Pendidikan yang rendah menyebabkan kualitas SDM yang rendah, sehingga upah yang diterima juga rendah. Pendidikan rendah yang ditempuh oleh orang miskin, menyebabkan kualitas orang miskin juga rendah, sehingga jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseoran. Dengan demikian semain tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya (Kuswantoro dan Dewi, 2016).

Penelitian ini mengambil RLS sebagai salat satu variabel yang diduga berpengaruh terhadap kemiskinan. Persoalan kemiskinan yang sangat komplek, maka perlu sebuah gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan usaha masyarakat miskin itu sendiri. Aktvitas pendidikan sebagai hak individu merupakan bentuk peran orang miskin dalam memerangi kemiskinannya.

Berdasarkan teori di atas, maka indikator RLS adalah :

1. Orang miskin minimal menempuh wajar 9 tahun
2. Lama sekolah dalam satu daerah minimal 12 tahun

3. Angka lama sekolah meningkat
4. Jenjang pendidikan sampai SMA.

2.1.7 IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Indeks ini terdiri dari beberapa komponen utama, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Zulzznto, 2016). IPM merupakan suatu ukuran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan sebagainya (BPS, 2019).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan data dan informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia. Komponen-komponen dasar kualitas hidup yaitu angka harapan hidup yang mewakili dimensi kesehatan, angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) mewakili dimensi pendidikan, dan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan yang mewakili dimensi hidup layak (Kahar, 2018).

Peran pemerintah dalam pembangunan manusia sangat penting. Hal ini mengingat pembangunan suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar alokasi anggaran pemerintah *(public)* yang dikeluarkan untuk meningkatkan

pembangunan manusia. Semakin besar alokasi anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk meningkatkan komponen-komponen pembangunan manusia, maka akan semakin meningkat pula pembangunan manusia pada suatu negara, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah mempunyai keterkaitan terhadap peningkatan IPM suatu Negara (Hakim dan Sukmana, 2017)

Pembangunan manusia menjadi penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat, pembangunan tidak hanya di sektor ekonomi saja. Pembangunan sektor ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja maupun *trickle down effect* belum tentu tepat.

Pembangunan harus mencakup semua bidang yang pada hakikatnya bersifat multifimensional. Pembangunan tidak hanya meliputi pembangunan ekonomi melainkan juga mencakup perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap dan kualitas masyarakat. Dengan demikian negara kesejahteraan tidak hanya mampu diukur dan dinilai kesejahteraannya hanya berdasarkan pada aspek ekonomi semata.

Aspek-aspek cakupan pembangunan yaitu politik, sosial dan lain sebagainya. Pada awal decade 90-an, paradigma negara kesejahteraan yang tercermin dari paradigm pembangunan telah mengalami pergeseran dimana orientasi yang dijadikan tolak ukur dari kesejahteraan adalah dinilai pada

aspek mutu modal manusia (Hakim dan Sukmana, 2017). Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian (BPS, 2019 : 2)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu angka yang menunjukkan melihat kinerja pembangunan wilayah dengan dimensi luas, yang memperlihatkan kualitas penduduk di suatu wilayah dalam hal harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup yang layak (Novitasari dan Khikmah, 2019). Kinerja IPM dapat dilihat dari tiga bidang yakni bidang kesehatan, bidang Pendidikan dan bidang usiah harapan hidup. Berdasarkan teori di atas, maka indikator IPM adalah :

1. Setiap tahun angka IPM naik
2. Angka kesehatan dalam setiap Daerah meningkat
3. Umur Panjang dan hidup layak
4. Angka pendidikan dalam setiap Daerah meningkat
5. Standar hidup layak

2.2 Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Minas, *et al* (2016) mengatakan bahwa manfaat bantuan sosial adalah pilihan terakhir dalam sistem perlindungan sosial nasional, dan reformasi desentralisasi yang mengarah pada peningkatan kearifan lokal atas implementasi undang-undang nasional. Hal ini merupakan tren internasional yang sering disebut sebagai devolusi. Reformasi hendaknya mengarahkan resentralisasi yang melibatkan kerja sama antar kelembagaan, antara lembaga-lembaga kesejahteraan yang berada pada tingkat hierarki masing-masing.

Minas (2016) dalam penelitiannya di Swedia, Norwegia, Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan hasil yang berbeda, dimana model bantuan sosial dengan cara sentralistik seperti dilakukan oleh Swedia dan Norwegia kurang memiliki dampak. Sedangkan bantuan sosial yang diserahkan kepada pemerintah negara bagian seperti dilakukan di Kanada dan Amerika Serikat telah menghasilkan hal yang berbeda seperti ketika dilakukan pada tingkat sentral. Pelimpahan kewenangan dari pusat kepada negara bagian berupa pemindahan keuangan dari pusat kepada negara bagian (Minas, R., *et al*, 2016).

Hasil penelitian Kheimili dan Belloumi menyimpulkan bahwa jaminan sosial di Metlaoui, Tunisia dapat membantu pengeluaran bidang kesehatan dan pendidikan keluarga miskin. Khemili dan Belloumi dalam melakukan

penelitian menggunakan data survei yang dikumpulkan antara Juli 2012 dan Januari 2014, yang mencakup 200 rumah tangga miskin. Hasil kuesioner yang dikumpulkan memberikan analisis tentang reaksi, perilaku dan strategi yang diadopsi oleh rumah tangga miskin sebagai hasil dari berbagai bentuk risiko. Jaminan sosial berdampak pada sejumlah bidang yang berbeda, termasuk kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pendapatan.

Penelitian tersebut mengeksplorasi pembagian risiko secara lengkap dan sebagian, untuk menyelidiki dampak skema jaminan sosial pada strategi yang di adopsi oleh rumah tangga untuk mengatasi guncangan ekonomi. Hasil estimasi model yang berbeda menunjukkan bahwa jaminan sosial dapat membantu rumah tangga yang dilindungi, dengan memilih strategi yang lebih murah untuk mengatasi risiko. Namun, peran jaminan sosial tetap tidak memadai, mengingat bahwa rumah tangga tertutup kurang memiliki kepercayaan terhadap layanannya dan mereka mengadopsi strategi asuransi diri atau perataan pendapatan. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa jaminan sosial memainkan peran penting di Metlaoui, tetapi tetap tidak mencukupi, terutama untuk rumah tangga yang tidak tercakup oleh jaminan sosial dan menderita dari pengeluaran kesehatan yang besar (Kheimili dan Belloumi, 2018).

Berdasarkan penelitian di atas, jaminan sosial yang diberikan belum bisa mengadopsi semua kebutuhan kesehatan dan pendidikan rumah tangga

miskin, sehingga masyarakat miskin masih menderita akibat pengeluaran kesehatan yang sangat tinggi. Selain itu, masyarakat juga kurang memiliki kepercayaan penuh terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan, apabila menggunakan jaminan sosial yang diterimanya.

Hasil penelitian Vijayakumar *et al* (2012) menganalisis faktor penentu kemiskinan secara signifikan dari sektor perkebunan, mengingat banyaknya kemiskinan akibat pengangguran kronis. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pemerintah Sri Lanka dalam menekan kemiskinan dan kesejahteraan sosial telah menghabiskan uang dalam jumlah besar. Namun, kemiskinan yang ada di Sri Lanka masih tinggi terutama di wilayah Kawasan perkebunan dan dan wilayah perdesaan (Vijayakumar *et al,* 2012).

Vijayakumar dalam anlisisnya, melihat kemiskinan dengan menggunakan data nasional dan regional hasil survey yang menghasilkan data sosial ekonomi di Provinsi terpilih dengan 89 Sekretariat Divisional dari provinsi Subaragamuva, Central dan Uva. Analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan jelas menunjukkan bahwa, variabel seperti lapangan kerja industri, pendidikan, akses ke pasar dan infrastruktur secara signifikan dan berpengaruh negatif terhadap dampak kemiskinan sektor perkebunan. Begitu juga, pekerjaan pertanian memiliki dampak negatif tetapi tidak signifikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan adalah pengambilah kebijakan

peningkatan ketersediaan infrastruktur regional, infastruktur pasar, dan pendidikan.

Selanjutnya, Ismail Sirageldin (2020) mengatakan penanggulangan kemiskinan sebagai tantangan dan strategi Islam mennghasilkan penelitian bahwa kurangnya kepedulian sosial sebagai kolektif. Kemiskinan adalah fenomena yang kompleks. Kemiskinan ada dan sudah ada di semua level masyarakat dan masyarakat dunia dalam sejarah perjalanan manusia telah dicatat, terlepas dari sumber daya rendah, tahap perkembangan, tingkat teknologi, struktur sosial atau budaya. Namun, pendekatan kemasyarakatan terhadap pengentasan kemiskinan bervariasi secara signifikan dari ketidakpedulian terhadap intervensi aktif, dari ketergantungan pada strategi pribadi atau kolektif, dan antara strategi distribusi dan pertumbuhan, tergantung pada kemanjuran lembaga sosio-ekonomi yang ada dan nilai-nilai sosial yang berlaku (Sirageldin, 2020)

Menurut Sirageldin (2020), sepanjang sejarah, nilai-nilai individu dan sosial, terutama dimana kesetaraan ideologi menempati peringkat tinggi, telah menjadi penentu penting bagaimana individu dan masyarakat memandang kemiskinan sebagai masalah yang membutuhkan perhatian di tingkat masyarakat. Dalam kasus Islam sebagai sistem etika, adalah sebuah premis yang diterima bahwa keputusan kebijakan dalam masyarakat Islam harus melewati filter moral Islam. Kemiskinan adalah fenomena yang kompleks,

sebagai akibat dari kurangnya pertumbuhan dan ketidaksetaraan. Kebijakan yang efektif membutuhkan pemahaman teknis dan empiris tentang kemiskinan dikombinasikan dengan institusi yang efisien dan sistem nilai sosial yang mendukung (Sirageldin, 2020)

Lebih lanjut Sirageldin (2020) mengatakan dasar dari sistem etika Islam dan memperlakukan etos Islam sebagai ideal, dimana kebijakan sosial-ekonomi menangani kemiskinan eliminasi dinilai. Islam memandang masyarakat sebagai satu kesatuan dimana kebebasan individu dan martabat manusia adalah yang tertinggi meskipun tunduk pada aksioma tanggung jawab. Etika ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak boleh menghadirkan 'Ketergantungan'. Kebijakan seharusnya tidak mengarah pada pelembagaan kemiskinan. Kebijakan berdasarkan transfer yang tidak mengangkat orang miskin dari status ketergantungan mereka tidak boleh ditetapkan, kecuali dalam kasus-kasus seperti itu bencana. Berdasarkan bukti konseptual dan empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa etika Islam mendukung strategi pengentasan kemiskinan berdasarkan pada prinsip mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan produktif (Sirageldin, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapatkan kesimpulan bahwa dalam proses penanggulangan kemiskinan, harus diperhatikan dengan secermat-cermatnya ketika merumuskan kebijakan dalam hal penanggulangan kemiskinan, jangan sampai kebijakan penanggulangan

kemiskinan justru menghadirkan ketergantungan orang miskin, yang tidak memiliki etos kerja. Selain itu kebijakan yang ditetapkan tidak menimbulkan kemiskinan baru. Penambahan bantuan sosial yang terus dilakukan pemerintah, jangan menimbulkan dorongan masyarakat untuk tetap memiskinkan diri. Evaluasi menjadi penting dan perlu dilakukan, setelah sekian puluh tahun masyarakat miskin mendapatkan bantuan. Seberapa besar keberhasilan bantuan sosial tersebut, dalam menurunkan kemiskinan.

Penelitian Kuswantoro, *et al* (2016) menyimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto dan tingkat upah minimum regional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Banten. Penelitiannya menyimpulkan bahwa pendidikan dan PDRB berpengaruh dalam menekan angka kemiskinan. Pendidikan masyarakat, khususnya masyarakat miskin (upaya orang miskin) dan PDRB (kemampuan ekonomi Daerah) secara bersama-sama berkontribusi dalam penekanan angka kemiskinan di Daerah Banten.

Penelitan yang dilakukan di Banten tersebut, hanya menyoroti angka partisipasi SMA dan PDRB, tetapi belum menggunakan variabel lama sekolah. Melalui studi kasus di Banten tersebut, penulis berasumsi bahwa kemiskinan harus merupakan gerakan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah (PDRB) dan masyarakat miskin (pendidikan) itu sendiri dalam mengatasi masalah kemiskinan. Peran pemerintah tanpa dibarengi

semangat Daerah dalam menaikkan PDRB dan upaya masyarakat miskin itu sendiri, tentunya akan sangat berat secara cepat menurunkan angka kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo, *et al* (2019) tentang kemiskinan, menggunakan variabel IPM, Gini Ratio dan Angka Partisipasi Kasar SMA. Penelitian menyimpulkan bahwa ketiga variabel berpengaruh terhadap persentase kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada seluruh provinsi di Indonesia, tetapi belum sampai pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Risnandar dan Wisnu Broto (2018) tentang implementasi BPNT pada 7 (tujuh) provinsi di 12 Kota di Indonesia, menarik kesimpulan bahwa secara umum program penyaluran BPNT melalui e-Warong sudah cukup progresif, efektif dan efsien serta sangat potensial dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan, namun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki seperti: pemantapan proses bisnis secara komprehensif, pendampingan program secara intensif berkelanjutan, dan pembangunan jejaring kerja.

Penelitian Nainggolan dan Susantyo (2017) untuk mendeskripsikan PKH dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui PKH perlu dilakukan *re-design* berupa inovasi program

dalam rangka pengembangan program secara fundamental. Inovasi ini difokuskan pada 2 hal, yaitu: (1) merespon upaya yang sudah dilakukan tetapi belum optimal; dan (2) melakukan reorientasi program secara mendasar dengan menjadikan PKH sebagai pintu masuk menuju integrasi program perlindungan sosial sekaligus integrasi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus memperkuat keberfungsian keluarga miskin secara utuh. Upaya yang diharapkan dari penelitian di atas, 'memaksa' anggota keluarga, berperilaku produktif, bukan kontraproduktif.

Sriyana (2018) melakukan penelitian tentang kemiskinan di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan data panel dengan model efek. Penelitian ini menggunakan 4 variabel: pertumbuhan ekonomi regional, tingkat upah minimum, jumlah pengangguran, kualitas sumber daya manusia. Dengan model efek tetap menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi regional, tingkat upah minimum, jumlah pengangguran, dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah telah berhasil mengelola masalah kemiskinan di Kabupaten dan Kota. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah berada menetapkan kebijakan publik yang tepat dalam proses pembangunan. Agar lebih efektif dalam pengurangan kemiskinan, pemerintah daerah di wilayah timur harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Penelitian Susanti (2018) dengan tema kemiskinan, menggunakan metode analisis data panel. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana dan seberapa besar PDRB, IPM dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Harapan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penetuan kebijakan dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, pengangguran dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat 2009 – 2011.

2.3 Kerangka Teori

Kemiskinan yang ada di suatu negara ditentukan pada tingkat pendapatan nasional rata-rata dan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan (Todaro dan Smith, 2006 : 232). Dua hal ini yang mempengaruhi kemiskinan di suatu negara. Antara pendapatan suatu negara dan distribusi pendapatan yang merata menjadi kunci dalam melihat kemiskinan. Pendapatan suatu negara yang tinggi, tetapi distribusi pendapatan yang tidak merata akan membuat kemiskinan di suatu negara sangat tinggi. Untuk mewujudkan pendapatan negara dan distribusi pendapatan yang merata, menurut Boediono (1993) dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi proses out put per kapita dalam jangka panjang (Bodediono, 1993). Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari out put perkapita, sehingga

memiliki alternatif dalam konsumsi memilih barang dan jasa serta menaikkan daya beli masyarakat (Boediono, 1993).

Berdasarkan uraian diatas, maka kemiskinan dipengaruhi oleh pendapatan nasional, dan pemerataan pendapatan. Pendapatan nasional diwujudkan dalam bentuk peningkatan Produk Domestik Bruto. Sedangkan pemerataan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi, dituntut produktivitas meningkat yang membutuhkan tenaga kerja. Pertambahan tenaga kerja yang tinggi meningkatkan pendapatan per kapita. Untuk itu dalam proses pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh masyarakat, tetapi jika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sekelompok orang, maka kemiskinan akan semakin parah.

Produktivitas masyarakat bisa dibentuk melalui pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kualitas tenaga kerja semakin baik, sehingga menjadi orang yang produktif. Pendidikan yang rendah akan menyebabkan kualitas tenaga kerja yang rendah, sehingga akan memiliki tingkat upah yang rendah. Penghasilan yang rendah akan menyebabkan kemiskinan. Selain pendidikan, produktivitas membutuhkan kesehatan yang baik dari masing-masing orang. Kualitas kesehatan seseorang akan berpengaruh pada produktivitas kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka kemiskinan itu akan dipengaruhi oleh pendapatan pemerintah, pendapatan masyarakat, pendidikan. Hal-hal yang

mempengaruhi kemiskinan ini akan dijadikan sebagai variabel dalam penelitian untuk melihat efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ini. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah diwakili oleh PDRB, pendapatan per kapita diwakili oleh BPNT dan PKH, sedang pendidikan dengan menggunakan RLS. Kontrol terhadap kebijakan pemerintah diwakili IPM.

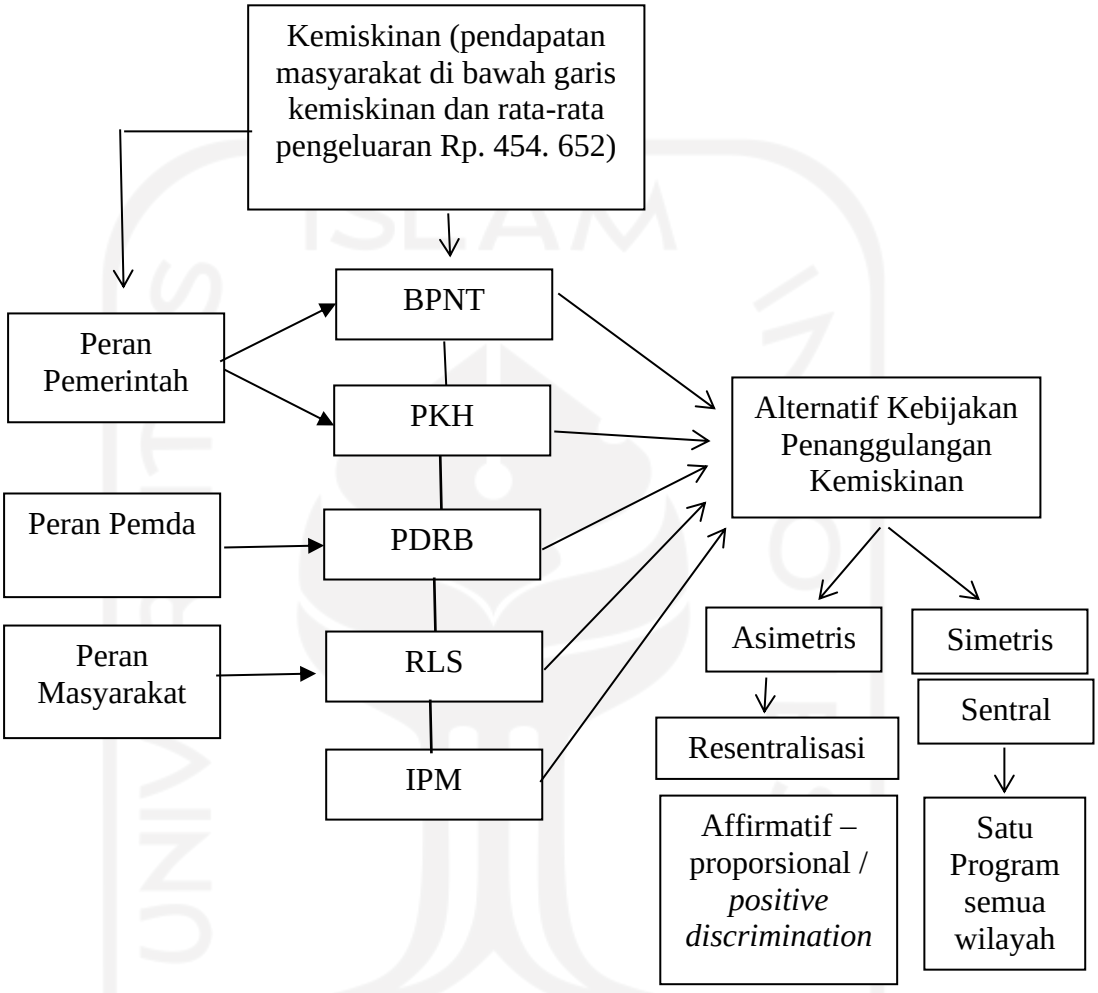
Penelitian ini mengambil obyek penelitian di kabupaten/kota seluruh Indonesia dan memilah wilayah antara Jawa serta luar Jawa. Berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang dilakukan penulis, belum ada peneliti yang mengambil obyek penelitian pada semua Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten/Kota di pulau Jawa, Kabupaten/Kota di luar pulau Jawa, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa. Pengambilan obyek ini untuk mengetahui dampak bantuan sosial di setiap Kabupaten dan Kota. Selain itu untuk mencari kebijakan yang paling efektif dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Pemilahan wilayah dalam penentuan obyek penelitian, agar dapat diketahui kebijakan yang efektif pada setiap wilayah, mengingat setiap wilayah memiliki kultur yang berbeda-beda.

Orientasi penelitian-penelitian terdahulu dalam penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia. Berkaitan dengan hal

ini teori yang ingin dibangun dalam penelitian ini adalah penanggulangan kemiskinan yang efektif di masing-masing kabupaten/kota. Bentuk bantuan yang diseragamkan di seluruh Indonesia tanpa melihat latar belakang, kultur, dan kondisi setiap wilayah apakah juga akan menghasilkan penurunan kemiskinan yang seragam.

Penyeragaman bentuk dan jenis bantuan secara nasional, akan memiliki dampak yang tepat atau justru tidak berdampak dalam penanggulangan kemiskinan. Apabila penyeragaman tidak efektif, maka diperlukan alternative kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, sehingga terjadi perbedaan bentuk dan jenis kebijakan. Aktor yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat miskin itu sendiri. Penulis akan melihat peran itu, dengan menggunakan variabel bantuan sosial (peran pemerintah), variabel PDRB (peran pemerintah daerah), variabel RLS (peran masyarakat miskin) dengan variabel kontrol IPM (peran pemerintah). Peran masing-masing dalam penanggulangan kemiskinan yang diwakili oleh variabel-variabel di atas, merupakan implementasi kebijakan.

Kerangka teori dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 4 Kerangka Teori

Berdasarkan gambar di atas, penanggulangan kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota yang menghasilkan kemiskinan nasional, dipengaruhi peran 3 aktor besar yakni : pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat miskin. Hasil dari program pengentasan kemiskinan dapat ditarik kesimpulan kebijakan asimetris atau kebijakan simetris di setiap Kabupaten dan Kota baik

di dalam pulau Jawa, maupun di luar pulau Jawa. Pemilahan wilayah berdasarkan pulau untuk melihat kontribusi bantuan sosial terhadap penanggulangan kemiskinan di masing-masing wilayah.

Penentuan kebijakan yang efektif, dihasilkan dari analisis variabel-variabel ekonomi seperti subsidi pemerintah, PDRB, RLS dan IPM apakah masing-masing variabel dapat dijadikan alat penanggulangan kemiskinan di masing-masing wilayah. Ataukah masing-masing wilayah memiliki perbedaan kebijakan dalam menekan jumlah penduduk miskin. IPM sebagai variabel kontrol diperlukan untuk mengontrol variabel dependent, mengingat variabel-variabel yang digunakan tidak dibahas secara tuntas, sehingga untuk menghindari bias. Variabel kontrol ada;ah variabel yang mempengaruhi variabel dependent, sehingga harus dimasukkan ke dalam model, namun tidak menjadi fokus penelitian.

Peran IPM sebagai variabel kontrol untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalaui layanan kesehatan dan pendidikan serta standar hidup layak. Masyarakat yang hidup sehat akan memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang. Dimensi pendidikan akan meningkatkan pengetahuan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Sedangkan standar hidup layak terpenuhinya kebutuhan dasar. Tiga dimensi itu yang akan mengontrol variabel dependent. Sedangkan RLS hanya berkaitan dengan bidang pendidikan (lama sekolah masyarakat). Lama sekolah masyarakat akan cepat

meningkatkan pengetahuan atau justru biaya sekolah yang semakin panjang akan menambah beban masyarakat miskin. Jadi IPM memandang 3 dimensi, sedangkan RLS melihat satu dimensi. IPM sebagai kebijakan pemerintah, sedangkan RLS menjadi kewajiban masyarakat miskin untuk bersekolah.

Kerangka teori ini melihat peran mana yang paling efektif dalam menekan jumlah penduduk miskin, yang akhirnya akan menentukan bentuk program yang paling tepat dalam pemilihan kebijakan publik. Pemilahan peran ini dilakukan berangkat dari asumsi bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan masalah kompleks. Kompleksitas ini terletak pada rumitnya mengurai penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan yang hanya dilakukan pemerintah saja tanpa dibarengi peran serta masyarakat miskin, tentunya akan menghasilkan ketergantungan. Orang miskin harus memikirkan perilakunya dalam merubah nasib untuk keluar dari kemiskinan.

Akhir dari penelitian ini akan menghasilkan dua pilihan tergantung hasil olah data. Jika olah data memiliki hasil yang sama di seluruh Indonesia dan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, maka program seragam sesuai dengan variabel penelitian ini menghasilkan hasil yang seragam pula, maka kebijakan simetris dan/atau sentral menjadi alternative kebijakan. Apabila hasil estimasi menghasilkan hal yang berbeda-beda, maka kebijakan yang dipilih adalah kebijakan asimetris.

Kebijakan simetris adalah kebijakan yang ditetapkan secara seragam di seluruh Kabupaten/Kota agar terjadi keseimbangan dan kesamaan program antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, tanpa memperhatikan permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah. Contoh kebijakan simetris: seluruh kabupaten/kota diberikan bantuan BPNT dan PKH sama seluruh wilayah Republik Indonesia, terlepas apakah kemiskinan di setiap daerah bisa diselesaikan dengan BPNT atau tidak.

Kebijakan sentral adalah kebijakan yang terpusat pada pemerintah pusat, sehingga pusat sebagai pengatur dan pusat perhatian kabupaten/kota dalam menetapkan program. Pemerintah pusat dalam hal ini sebagai penyusun dan pengatur program, distribusi akan mengarah kemana tergantung dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Contoh : beasiswa bidik misi, penetapan kebijakan dan alokasi berangkat dari pusat.

Kebijakan asimetris adalah kebijakan yang ditetapkan secara berbeda antara daerah satu dengan daerah lain, sehingga terjadi ketidak seimbangan program antar daerah. Hal ini dilakukan karena melihat permasalahan kemiskinan antar daerah berbeda, maka program yang diluncurkan akan berbeda-beda. Contoh: daerah yang memiliki tambang besar, masyarakat sekitar sulit untuk bersekolah karena terbuai kerja di tambang. Untuk itu bantuan kemiskinan mestinya bukan berbentuk biaya pendidikan. Berbeda daerah-daerah di pulau Jawa misalnya, yang tidak memiliki potensi yang

besar, maka bantuan kemiskinan berupa biaya pendidikan akan sangat cocok, agar para lulusan mampu mengelola potensi yang ada menjadi mesin uang.

Kebijakan afirmatif-proporsional merupakan kebijakan yang dipilih oleh negara-negara yang sedang menghadapi kondisi sosial yang diskriminatif, ketidaksetaraan dan marginalisasi untuk berbuat diskriminasi positif secara proporsional artinya kebijakan program diberikan secara berbeda agar tidak terjadi ketimpangan sosial, untuk mempercepat keadilan dan kesetaraan. Tindakan ini sebagai dikriminasi positif (Sayuti, 2013).

Kebijakan resentralisasi adalah kebijakan dengan memusatkan seluruh kewenangan penanggulangan kemiskinan dari pusat kepada Daerah (Kabupaten/Kota). Kebijakan penanggulangan kemiskinan kewenangannya diberikan kepada Daerah (Kabupaten/Kota) agar penanggulangan kemiskinan tepat program, tepat sasaran, tepat masalah dan tepat hasil, karena Daerah (Kabupaten/Kota) diharapkan lebih mengetahui permasalahan kompleks di daerahnya, sehingga Daerah memiliki keleluasaan dan ketepatan dalam mendefinisikan kemiskinan di daerah masing-masing, untuk melakukan solusi penetapan kebijakan yang tepat.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan bahwa dugaan terhadap sesuatu adalah benar (Lolang, 2015). Mengingat sifatnya sebagai dugaan, maka hipotesis harus dibuktikan dengan uji hipotesis. Setiap penelitian kuantitatif selalu menggunakan uji hipotesis. Pembuktian apakah dugaan yang dirumuskan itu benar atau salah, maka digunakan alat analisis.

Menurut Lolang (2015) uji hipotesis adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka mengambil keputusan dari dua hipotesis yang berlawanan. Kedua hipotesis tersebut dirumuskan sedemikian rupa, sehingga rumusan hipotesis mengakibatkan salah satu akan selalu bernilai benar dan hipotesis lainnya akan selalu bernilai salah (Lolang, 2015).

Ada dua bentuk hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol dilambangkan H_o dan hipotesis alternatif dilambangkan H_1. Menurut Lolang (2015), hipotesis nol ditandai dengan kata-kata seperti tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, dan sejenisnya. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Sebaliknya jika hipotesis nol dapat dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima (Lolang, 2015).

Berdasarkan definisi di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan variabel yang digunakan. Variabel-variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependent adalah jumlah penduduk miskin (Y). Sedangkan variabel independent adalah BPNT (X1), PKH (X2), PDRB (X3), RLS (X4) dan IPM (X5).

Hipotesis yang diajukan dalam penelitan ini, adalah sebagai berikut:

H_o : tidak ada pengaruh antara variabel BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap jumlah penduduk miskin.

H_1 : terdapat pengaruh antara variabel BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM variabel kontrol baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap kemiskinan.

Sedangkan untuk menguji masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent adalah sebagai berikut:

1. H_o : diduga tidak pengaruh antara BPNT terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa

   H_1 : diduga ada pengaruh negatif signifikan antara BPNT terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa

2. H_o : diduga tidak pengaruh antara PKH terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa

   H_1 : diduga ada pengaruh negatif signifikan antara PKH terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa

3. H_o : diduga tidak pengaruh antara PDRB terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa

   H_1 : diduga ada pengaruh negatif signifikan antara PDRB terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa

4. H_o : diduga tidak pengaruh antara RLS terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar

pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa

H_1 : diduga ada pengaruh negatif signifikan antara RLS terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa

5. H_o : diduga tidak pengaruh antara IPM terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa

H_1 : diduga ada pengaruh negatif signifikan antara IPM terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa

6. H_o : diduga tidak pengaruh antara jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya terhadap jumlah penduduk miskin tahun berikutnya pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa

H_1 : diduga ada pengaruh positif antara jumlah penduduk miskin

tahun sebelumnya terhadap jumlah penduduk miskin tahun berikutnya pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini melalui pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial berbentuk uang, barang dan atau jasa. Seperti halnya PKH, telah berdampak pada penurunan angka kemiskinan, walaupun masih banyak kelemahan, serta belum bisa menurunkan kemiskinan dengan cepat (Nainggolan dan Susantyo, 2017).

Pertumbuhan ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota telah menjadi perhatian pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan perekonomian di wilayahnya masing-maing. PDRB diharapkan dapat berkontribusi dalam penanggulangan angka kemiskinan di masing-masing wilayah. Penyediaan sarana prasarana sekolah dan pembiayaan pendidikan oleh pemerintah dalam mendorong masyarakat mengikuti wajar 9 (sembilan) tahun. Semakin tinggi waktu lama sekolah masyarakat, semakin berkualitas sumber daya manusianya, sehingga bisa keluar dari kemiskinan.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya melalui bantuan sosial yang cukup besar dari tahun ke tahun. Selain bantuan sosial, PDRB, dan rata-rata lama sekolah serta IPM sebagai variabel yang dimungkinkan memiliki pengaruh dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan pemilihan variabel ini, maka dapat dikelompokkan ke dalam 3

peran dalam proses penanggulangan kemiskinan, yaitu : pemerintah, pemda, dan masyarakat miskin itu sendiri. Tiga komponen ini memiliki peran strategis sebagai agen percepatan penanggulangan kemiskinan.

3.2 Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana kesimpulan dari penelitian ini berangkat dari data berupa angka-angka yang dianalisis. Lokasi penelitian ini di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia sejumlah 514 (lima ratus empat belas) Daerah yang tersebar pada 34 (tiga puluh empat) provinsi. Pemilihan lokasi penelitian ini memiliki harapan dapat mengetahui dampak variabel independent terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia dan di masing-masing kabupaten/kota. Keragaman budaya, sosial, dan latar belakang hidup orang miskin yang tersebar di seluruh pulau juga menarik untuk diteliti. Keragaman penduduk miskin berdasarkan tempat tinggal, dibarengi dengan keseragaman bantuan kemiskinan, menjadi referensi menarik dalam penanggulangan kemiskinan.

3.3 Populasi dan penentuan sampel penelitian

Populasi adalah jumlah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan sampel, seluruh populasi menjadi sampel dalam peneltian ini. Hal ini dilakukan agar secara mendalam dapat menganalisis

variabel yang berpengaruh negatif signifikan terhadap angka kemiskinan di Indonesia.

3.4 Sumber data dan teknik pengumpulan data

Sumber data yang dipakai adalah data sekunder berupa data runtun waktu tahun 2015 – 2019 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi seluruh Indonesia, dan data bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Data BPS yang diambil sebagai sumber data adalah :

1. Data kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia
2. Data PDRB Kabupaten/Kota di Indonesai.
3. Data RLS Kabupaten/Kota di Indonesia.
4. Data IPM Kabupaten/Kota di Indonesia

Sedangkan data yang dikelurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data jumlah BPNT Kabupaten/Kota di Indonesia
2. Data jumlah PKH di Kabupaten/Kota di Indonesia.

Teknik pengumpulan data mengambil data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS, dan data yang diambil dari Kemensos Republik Indonesia. Data yang diambil adalah data seluruh kabupaten dan kota di Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.5.1 Kemiskinan

Yang dimaksud kemiskinan dalam penelitian ini adalah kondisi hidup seseorang/keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau memiliki rata-rata pengeluaran di bawah Rp. 454.652,00 per kapitan/bulan (BPS, 2020).

Indikatornya adalah:

1. Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, kesehatan).
2. Orang yang memiliki pendapatan perbulan di bawah Rp. 700.000,00 (pendapatan rendah)
3. Orang yang masuk di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki usaha
4. Tidak memiliki pekerjaan tetap
5. Keluarga yang tidak bisa mengakses kesehatan dan pendidikan (Nurwati, 2008)

3.5.2 BPNT

BPNT adalah bantuan pangan non tunai kepada keluarga miskin yang berbentuk kartu kombo yang berisi sejumlah uang transfer dari pemerintah melalui bank yang ditunjuk. Penerima manfaat melakukan pembelian beras, telur, sayuran, kedelai, dan buah dengan cara menggesek kartu di e-warung.

Indikatornya adalah:

1. Setiap sasaran memiliki *e-voucher* (kartu kombo) senilai Rp. 200.000,00

2. E-voucher yang diterima setiap orang (sasaran) dapat digunakan.
3. Lansia dan balita anggota KPM terpenuhi kebutuhan gizi.
4. KPM dapat memilih kualitas beras dan kebutuhan nutrisi lainnya
5. Jenis barang bahan makanan yang diterima sesuai permintaan peserta
6. Warung berada di dekat tempat tinggal peserta

(Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, 2019)

3.5.3 PKH

PKH adalah bentuk bantuan sosial tunai bersyarat dengan kas transfer kepada rumah tangga kurang mampu dengan syarat memiliki anak balita, anak sekolah (SD, SMP, SMA), lansia dan disabilitas. Agar anggota keluarga mendapatkan akses kesehatan, akses pendidikan dan akses kesejahteraan sosial. Indikatornya adalah:

1. Setiap orang yang menjadi sasaran bisa mengakses kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial
2. Setiap ibu hamil memeriksakan kesehatan ke layanan kesehatan terdekat
3. Anak balita aktif datang di posyandu
4. Anak usia sekolah dasar sampai menengah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal.
5. Anak balita mendapatkan asupan gizi seimbang
6. Lansia dan disabilitas mendapatkan layanan kesejahteraan sosial

(Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 2019)

3.5.4 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto adalah produk barang dan jasa yang dihasilkan wilayah domestik Kabupaten/Kota di Indonesia yang didasarkan pada harga konstan tahun 2010.

Indikatornya adalah:

1. Pendapatan dan belanja Daerah mengalami kenaikan
2. Pendapatan asli daerah meningkat
3. Jumlah investasi di daerah mengalami kenaikan.
4. Belanja pembangunan lebih besar dibanding belanja lain
5. Tabungan masyarakat meningkat
6. Daya beli masyarakat naik
7. Produksi barang dan jasa mengalami kenaikan
8. Konsumsi dan belanja dalam 10 tahun terakhir naik setiap tahunnya **(**Rahman dan Chamelia, 2015)

3.5.5 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai penanda rata-rata jenjang tingkat pendidikan penduduk Kabupaten/Kota di Indonesia, semakin tinggi pendidikan penduduk Kabupaten/Kota, semakin besar angka lama sekolah.

Indikatornya adalah:

1. Lama tahun sekolah masyarakat dalam suatu Daerah
2. Orang miskin mengikuti pendidikan formal
3. Lama tahun penduduk 15 tahun ke atas bersekolah

4. Setiap orang mengikuti wajar 9 tahun, entah tinggal kelas maupun tidak

   (BPS, https://sirusa.bps.go.id, diakses 3 Oktober 2020)

3.5.6 IPM

IPM adalah indeks kesejahteraan masyarakat dalam bentuk angka yang diukur dari kesehatan, pengetahuan dan harapan hidup sebagai ukuran untuk melihat kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota.

Indikatornya adalah :

1. Masyarakat memiliki usia harapan hidup yang panjang
2. Masyarakat bisa membaca dan menulis
3. Masyarakat memiliki pendidikan dan rata-rata lama sekolah minimal wajar 9 tahun.
4. Masyarakat sebagaian besar memiliki standar hidup Masyarakat hidup sehat
5. Masyarakat memiliki pengetahuan yang luas

   (Mahroji, 2019)

3.6 Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini regresi data panel. Data panel merupakan gabungan data *cross section* dan *time series*. Alat analisis regresi data panel, memiliki keuntungan, p*ertama*, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. *Kedua*, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *crosss section* dapat mengatasi

masalah yang timbul ketika penghilangan variabel (Agus Widarjono, 2018). Analisis dilakukan pada data *cross section* sebanyak 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Sedangkan *time series* diambil dalam kurun waktu selama 5 tahun. Analisis akan dilakukan dengan memilah 5 wilayah analisis yaitu Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di dalam pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di dalam pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa.

Alasan dipilah menjadi 5 wilayah analisis tersebut karena penduduk miskin Indonesia tersebar di seluruh Indonesia, dengan keberagaman yang berbeda-beda, sementara kebijakan pemerintah diberlakukan seragam di seluruh wilayah. Keseragaman program dalam keberagaman perlu diteliti, karena keseragaman dalam keberagaman belum tentu menghasilkan dampak yang sama. Selain itu masalah kemiskinan sebagai permasalahan yang kompleks, maka penentuan kebijakan juga harus cermat agar penanggulangan kemiskinan menjadi efektif. Akhirnya, dapat diketahui kebijakan yang efektif pada setiap wilayah, dengan geografi, karakteristik, kultur dan latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya, kebijakan yang dtetapkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Ada 2 model data panel yaitu data panel statis dan data panel dinamis. Kedua model ini akan digunakan dalam mengestimasi hasil penelitian ini. Alasan penggunaan data panel statis (data panel biasa) dan data panel dinamis ini agar hasil estimasi dipastikan tidak terjadi bias, konsisten dan efektif. Hal ini karena penggunaan *lag* dalam data panel statis akan membuat hasil estimasi menjadi bias dan tidak konsisten.

Menurut Nabila dan Setiawan (2016) regresi data panel adalah regresi yang menggunakan struktur data sebagai data panel (Nabila dan Setiawan, 2016). Model data panel statis, dengan mengasumsikan bahwa telah terdapat variabel dependen Y, dan variabel independent X, maka model regresinya:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \in_i; \quad i = 1,2 \ldots\ldots n \ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

Persamaan di atas dimana β_0 yaitu intersep atau konstanta, β_1 adalah koefisien refresi, $\in_i$ adalah *error* dan n banyaknya data. Jika akan melakukan regresi pada variabel Y dan X dengna memasukkan periode waktu, maka persamaannya sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_t + \in_t; \quad t = 1,2 \ldots\ldots t \ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

Dimana t menunjukkan periode waktu data *time series.* Karena regresi data panel merupakan gabungan data *cross section* dan data *time series*, yang di dalam analisisnya dengan mengalikan data *cross section* dengan data *time series* (n x t) yang menunjukkan banyaknya data panel yang akan dianalisis. Jika dalam penelitian ini memiliki 5 variabel independent, maka persamaannya:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} \in_i; \quad i = 1,2..n (3)$$

(Sriyana, 2014).

Data panel statis di atas, dimungkinkan kurang konsisten, bias dan tidak efektif, jika hal tersebut benar, maka dalam penelitiannya ini akan diterapkan analisis data panel dinamis *Generalized Method of Moment.* Alat analisis ini dipilih pula, karena kebanyakan variabel ekonomi bersifat dinamis, dimana nilainya dipengaruhi oleh nilai variabel itu sendiri di masa lalu dan juga oleh variabel lain, sehingga data panel cocok digunakan untuk data yang bersifat dinamis tepat untuk

analisis *dynamic of adjustment*. GMM akan menghasilkan parameter jelas, berbobot, tidak bias, konsisten dan efisien. (Urusyiyah, 2013; Shina, 2016).

Regresi data panel dinamis adalah metode regresi dengan menambahkan *lag* pada variabel dependen untuk dijadikan sebagai variabel independent. Regresi dengan memasukkan *lag* pada variabel dependent menjadi variabel independent, jika diestimasi dengan *fixed effect* maupun *commont effect* akan menyebabkan bias dan tidak konsisten, maka kemudian muncul dinamis GMM (*Generalized Methods of Moments*) (Urusyiyah, 2013). Persamaan regresi data panel:

$$y_{ti} = \delta y_{ti-1} + X'_{ti}\beta + \mu_{it} \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots (4)$$

Dimana, i memiliki nilai 1,2…n dan t bernilai 1,2…..t., dengan :

y_{ti} : pengamatan data *cross section* ke- i dan waktu ke- t

δ : intersep

X'_{ti} : vektor observasi pada variabel independent berukuran 1 x k

β : vektor koefisien variabel prediktor berukuran k x 1

μ_{it} : error regresi data panel unit *cross section* ke- i

Setelah diketahui sekilas tentang regresi data panel statis dan regresi data panel dinamis GMM, dalam penelitian akan menggunakan keduanya untuk mengistimasi variabel-variabel ekonomi. Variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini, berdasar pada teori kemiskinan Todaro dan Smith (2006 : 232), pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat (Boediono, 1993). Dengan melihat kemiskinan di atas, maka fungsi kemiskinan dalam penelitian ini digantikan dengan variabel-variabel ekonomi. Model yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan:

$$Y = f(BPNT_{it.}.\ PKH_{it.}\ PDRB_{it.}\ RLS_{it.}IPM_{it.}) \text{ .....(5)}$$

Dimana :

Y = Kemiskinan,

$BPNT_{it}$ = bantuan pangan, karena kemiskinan disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar (pendapatan masyarakat)

PKH_{it} = bantuan uang tunai (transfer), karena kemiskinan tidak bisa mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan gizi yang baik (pendapatan masyarakat menghindari ketimpangan)

$PDRB_{it}$ = melihat besarnya konsumsi dan pendapatan, kemiskinan disebabkan rendahnya daya beli dan daya produksi (pertumbuhan ekonomi)

RLS_{it} = kualitas sumber daya manusia, karena kemiskinan disebabkan rendahnya pendidikan, (pendidikan) dan

IPM_{it} = kesejahteraan masyarakat, karena kemiskinan disebabkan tingkat kesejahteraan yang rendah (kesejahteraan masyarakat)

Hasil pengumpulan data akan dianalisis dengan data panel statis menggunakan log agar nilai koefisien lebih baik dan untuk menyederhanakan data yang terlalu besar satuannya. Berkaitan dengan hal itu, maka model Kabupaten/Kota seluruh Indonesia adalah :

$$\log (Y_{it})\frac{Kab}{Kota} = \alpha + \beta_1 \log BPNT_{it}) + \beta_2 \log (PKH_{it}) + \beta_3 \log (PDRB_{it}) + \beta_4 \log (RLS_{it}) + \beta_4 \log (IPM_{it}) + e_{it} \text{ ... ... (6)}$$

Dimana :

$\log (Y_{it})\ Kab/Kota$: angka kemiskinan Kabupaten

a : bilangan konstanta

β_1 β_2 β_3 β_4 : kooefisien regresi

$\beta_1 \log(BPNT_{it})$: Bantuan Pangan Non Tunai

$\beta_2 \log(PKH_{it})$: Program Keluarga Harapan

$\beta_3 \log(PDRB_{it})$: Produk Domestik Regional Bruto

$\beta_4 \log(RLS_{it})$: Rata-Rata Lama Sekolah

$\beta_4 \log(IPM_{it})$: Indeks Pembangunan Manusia

Untuk memberikan keyakinan agar tidak terjadi bias dan tidak konsisten, maka digunakan regresi data panel dinamis dengan menambahkan *lag* pada variabel dependent yang kemudian menjadi variabel independent, serta untuk mengetahui dampak kebijakan tahun berikutnya pada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, maka persamaan modelnya sebagai berikut:

$$\log(Y_{it})\frac{Kab}{Kota} = \alpha + \beta_1 \log(BPNT_{it-1}) + \beta_2 \log(PKH_{it-1}) + \beta_3 \log(PDRB_{it}) + \beta_4 \log(RLS_{it-1}) + \beta_4 \log(IPM_{it}) + \beta_5 \log(Y_{it-1}) + e_{it} \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots. (7)$$

Dimana:

$\log(BPNT_{it-1})$: jumlah BPNT satu tahun sebelumnya

$\log(PKH_{it-1})$: jumlah PKH satu tahun sebelumnya

$\log(RLS_{it-1})$: keadaan RLS satu tahun sebelumnya

$\log(Y_{it-1})$: jumlah penduduk miskin satu tahun sebelumnya

Untuk menganalisis variabel independent terhadap variabel dependent pada Kabupaten di wilayah pulau Jawa, maka persamaannya adalah :

$$\log(Y_{it})KJ = \alpha + \beta_1 \log(BPNT_{it}) + \beta_2 \log(PKH_{it}) + \beta_3 \log(PDRB_{it}) + \beta_4 \log(RLS_{it}) + \beta_4 \log(IPM_{it}) + e_{it} \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots.. (8)$$

Dimana :

$\log(Y_{it})\ KJ$: angka kemiskinan Kabupaten di pulau Jawa

Kebijakan pemberian bantuan sosial berupa BPNT dan PKH serta keadaan RLS pada Kabupaten di pulau Jawa, maka jumlah bantuan dan keadaan RLS tahun sebelumnya, akan mempengaruhi pada jumlah penduduk miskin tahun berjalan di Kabupaten pulau Jawa, maka persamaannya sebagai berikut:

$$\log(Y_{it})\frac{KJ}{KLJ} = \alpha + \beta_1 \log(BPNT_{it-1}) + \beta_2 \log(PKH_{it-1}) + \beta_3 \log(PDRB_{it}) + \beta_4 \log(RLS_{it-1}) + \beta_4 \log(IPM_{it}) + \beta_5 \log(Y_{it-1}) + e_{it} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots. (9)$$

Dimana:

$\log(BPNT_{it-1})$: jumlah BPNT di pulau Jawa satu tahun sebelumnya

$\log(PKH_{it-1})$: jumlah PKH di pulau Jawa satu tahun sebelumnya

$\log(RLS_{it-1})$: keadaan RLS di pulau Jawa satu tahun sebelumnya

$\log(Y_{it-1})$: jumlah penduduk miskin di pulau Jawa satu tahun sebelumnya

Untuk menganalisis variabel independent terhadap variabel dependent pada Kabupaten di wilayah luar Jawa, maka persamaannya adalah :

$$\log(Y_{it})KLJ = \alpha + \beta_1 \log(BPNT_{it}) + \beta_2 \log(PKH_{it}) + \beta_3 \log(PDRB_{it}) + \beta_4 \log(RLS_{it}) + \beta_4 \log(IPM_{it}) + e_{it} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots.. (10)$$

Dimana :

$\log(Y_{it})\ KLJ$: angka kemiskinan Kabupaten di luar pulau Jawa

Kebijakan pemberian bantuan sosial berupa BPNT dan PKH serta keadaan RLS pada Kabupaten di luar pulau Jawa, maka jumlah bantuan dan keadaan RLS tahun sebelumnya, akan mempengaruhi pada jumlah penduduk miskin tahun berjalan di Kabupaten luar pulau Jawa, maka persamaannya sebagai berikut:

$$\log(Y_{it})KLJ = \alpha + \beta_1 \log(BPNT_{it-1}) + \beta_2 \log(PKH_{it-1}) + \beta_3 \log(PDRB_{it}) + \beta_4 \log(RLS_{it-1}) + \beta_4 \log(IPM_{it}) + \beta_5 \log(Y_{it-1}) + e_{it} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (11)$$

Dimana:

$\log(BPNT_{it-1})$: jumlah BPNT di luar pulau Jawa satu tahun sebelumnya

$\log(PKH_{it-1})$: jumlah PKH di luar pulau Jawa satu tahun sebelumnya

$\log(RLS_{it-1})$: keadaan RLS di luar pulau Jawa satu tahun sebelumnya

$\log(Y_{it-1})$: jumlah penduduk miskin di luar pulau Jawa satu tahun sebelumnya

Sedangkan untuk menganalisis pengaruh variabel independent terhadap dependent di masing-masing Kota di pulau Jawa, maka persamaannya adalah:

$$\log(Y_{it})KtJ = \alpha + \beta_1 \log(BPNT_{it}) + \beta_2 \log(PKH_{it}) + \beta_3 \log(PDRB_{it}) + \beta_4 \log(RLS_{it}) + \beta_4 \log(IPM_{it}) + e_{it} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (12)$$

Dimana :

$\log(Y_{it})KtJ$: jumlah penduduk miskin Kota di pulau Jawa

Kebijakan pemberian bantuan sosial berupa BPNT dan PKH serta keadaan RLS pada Kota di pulau Jawa Indonesia , maka jumlah bantuan soaial BPNT dn PKH serta keadaan RLS tahun sebelumnya, akan mempengaruhi pada jumlah penduduk miskin Kota di pulau Jawa tahun berjalan, maka persamaan modelnya sebagai berikut:

$$\log (Y_{it})KtJ = \alpha + \beta_1 \log (BPNT_{it-1}) + \beta_2 \log (PKH_{it-1}) + \beta_3 \log (PDRB_{it}) + \beta_4 \log (RLS_{it-1}) + \beta_4 \log (IPM_{it}) + \beta_5 \log (Y_{it-1}) + e_{it} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (13)$$

Dimana:

$\log (BPNT_{it-1})$: jumlah BPNT di pulau Jawa satu tahun sebelumnya

$\log (PKH_{it-1})$: jumlah PKH di pulau Jawa satu tahun sebelumnya

$\log (RLS_{it-1})$: keadaan RLS di pulau Jawa satu tahun sebelumnya

$\log (Y_{it-1})$: jumlah penduduk miskin di pulau Jawa satu tahun sebelumnya

Untuk menganalisis pengaruh variabel independent terhadap kemiskinan Kota di luar pulau Jawa dengan rumus sebagai berikut:

$$\log (Y_{it})KtLJ = \alpha + \beta_1 \log (BPNT_{it}) + \beta_2 \log (PKH_{it}) + \beta_3 \log (PDRB_{it}) + \beta_4 \log (RLS_{it}) + \beta_4 \log (IPM_{it}) + e_{it} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (14)$$

Dimana:

$\log (Y_{it})KtLJ$: jumlah penduduk miskin Kota di dalam pualu Jawa

Kebijakan pemberian bantuan sosial berupa BPNT dan PKH serta keadaan RLS pada Kota di luar pulau Jawa Indonesia , maka jumlah bantuan soaial BPNT dn

PKH serta keadaan RLS tahun sebelumnya, akan mempengaruhi pada jumlah penduduk miskin Kota di luar pulau Jawa tahun berjalan, maka persamaan modelnya sebagai berikut:

$$\log (Y_{it})KtLJ = \alpha + \beta_1 \log (BPNT_{it-1}) + \beta_2 \log (PKH_{it-1}) + \beta_3 \log (PDRB_{it}) + \beta_4 \log (RLS_{it-1}) + \beta_4 \log (IPM_{it}) + \beta_5 \log (Y_{it-1}) + e_{it} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (15)$$

Dimana:

$\log (BPNT_{it-1})$: jumlah BPNT di luar pulau Jawa satu tahun sebelumnya

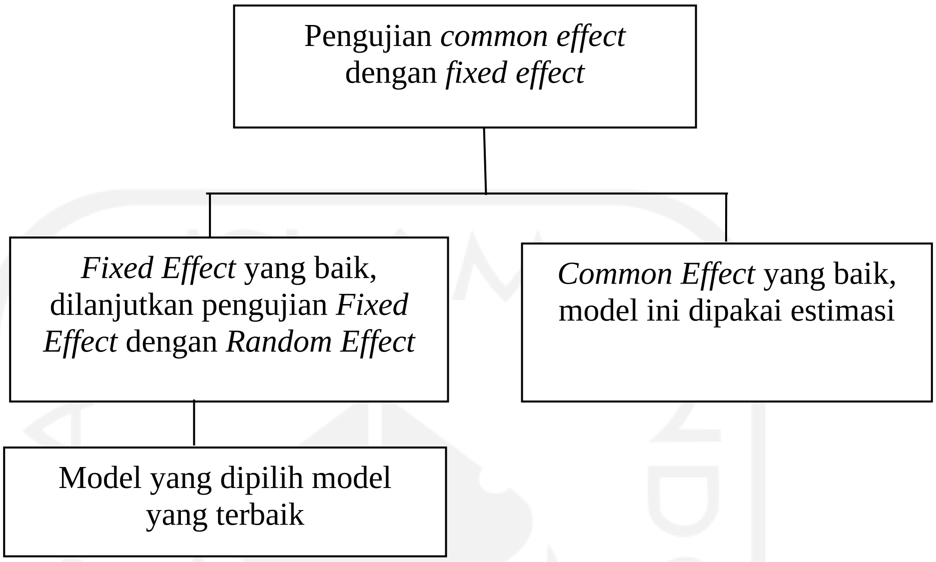
$\log (PKH_{it-1})$: jumlah PKH di luar pulau Jawa satu tahun sebelumnya

$\log (RLS_{it-1})$: keadaan RLS di luar pulau Jawa satu tahun sebelumnya

$\log (Y_{it-1})$: jumlah penduduk miskin di luar pulau Jawa satu tahun sebelumnya

Sebelum melakukan estimasi dengan menggunakan model di atas, dilakukan estimasi terlebih dahulu untuk mencari model yang paling baik. Ada 2 pengujian model untuk mendapatkan model terbaik (Sriyana, 2014). Pengujian pertama, membandingkan antara *common effect* dengan *ficed effect*. Jika *common effect* lebih baik, pengujian selesai, dan model *common effect* dipakai untuk estimasi. Jika pengujian tahap pertama *fixed effect* lebih baik, maka dilanjutkan pengujian kedua dengan membandingkan antara *fixed effect* dengan *random effect*, model yang dipakai adalah model yang terbaik.

Gambar di bawah ini untuk memudahkan langkah mencari model terbaik:



Gambar 3 1 Langkah Mencari Model Terbaik

3.6.1 Uji F

Uji F di gunakan untuk menganalisis apakah teknik regresi data panel dengan *Fixed Effect* lebih baik dari model regresi *common effect.*

$$F = \frac{SSR_R - SSR_U/q}{SSR_u/(n-k)} \qquad \text{……………… (12)}$$

SSR_R dan SSR_U *sum of Squared residuals* metode *common effect* dan teknik *fixed effect*. q jumlah restriksi metode common effect dan n jumlah observasi dan k jumlah parameter estimasi metode fixed effect

3.6.2 Uji Hausman

Digunakan untuk menguji antara model *fixed Effect* dengan *Random Effect* untuk dipilih yang lebih baik, persamaannya:

$$m = \hat{q}' var(\hat{q})^{-1}\hat{q} \qquad \text{……………………………………….(16)}$$

dimana : $\hat{q} = [\hat{\beta}_{OLS} - \hat{\beta}_{GLS}]$ dan $var(\hat{q}) = var(\hat{\beta}_{OLS}) - var(\hat{\beta}_{GLS})$

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak *k* dimana *k* adalah jumlah variabel independen.

3.6.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini digunakan untuk menganalisis perbandingan antara model *Random Effect* lebih baik dari *common effect* metode OLS . Nilai statistik LM:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)}\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(T\bar{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{t=1}^{T}\hat{e}_{it}^2} - 1\right)^2 \quad \text{.....(17)}$$

(Widarjono, 2018).

Uji yang dilakukan di atas akan menghasilkan beberapa model, yaitu :

1. Model *Common Effect*

   Common effect dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section.* Metode ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Model persamaan regresinya sebagai berikut:

   $$nY_{it} = \beta_0 + \beta_1 lnX_{1it} + \beta_2 lnX_{2it} + e_{it} \quad \text{..... (18)}$$

2. Model *Fixed Effect*

   Metode fixed effect adalah metode menganalisis adanya perbedaan sedangkan slopenya tetap sama antar Kabupaten/Kota, persamaannya adalah :

   $$lnY_{it} = \beta_0 + \beta_1 lnX_{1it} + \beta_2 lnX_{2it} + e_{it} \quad \text{.....(19)}$$

3. Model *Random Effect*

   Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu

   $$\bar{\beta}_0 + \beta_1 lnX_{1it} + \beta_2 lnX_{2it} + v_{it} \quad \text{.....(20)}$$

BAB IV

PANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan selalu menarik pembincaraan baik di kalangan akademisi, praktisi pengambil kebijakan, maupun politisi di seluruh dunia. Hal ini seiring dengan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang telah implementasikan, namun kemiskinan masih tetap ada (Hadna dan Kartika, 2017). Permasalahan kemiskinan masih menjadi persoalan komplek di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Data menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan, dimana bulan September 2019 sejumlah 9,86 juta orang menjadi 11,16 juta orang pada Maret tahun 2020, atau naik sebesar 1,3 juta orang, sedangkan di wilayah perdesaan terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin, yang semula berjumlah 14,93 juta orang pada September 2019, naik sebesar 333,9 ribu orang pada bulan Maret 2020 menjadi 15,26 juta orang (BPS, 2020).

Analisis kebijakan patut dilakukan, mengingat penanggulangan kemiskinan belum mencapi target harapan negara. Penelitian ini mencoba menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial BPNT dan PKH, sebagai salah satu kebijakan publik. Program BPNT dan PKH merupakan program dan sekaligus sebagai jarring pengaman sosial untuk meringankan beban orang miskin dalam jangka pendek. Bentuk 2 program itu, sebagai wujud komitmen pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan. Peran pemerintah Daerah adalah meningkatkan PDRB. Peran yang dapat dilakukan oleh orang miskin adalah meningkatkan

kualitas hidupnya. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, maka semakin lama masa sekolahnya. Rata-rata lama sekolah merupakan bentuk peran masyarakat miskin dalam meningkatkan kualitas untuk taraf hidupnya.

Selain keempat variabel di atas, penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu variabel IPM. Variabel ini tolok ukur kesejahteraan masyarakat di masing-masing Kabupaten/Kota. IPM dapat dijadikan alat melihat kualitas dari sumber daya manusia di suatu daerah (Sutikno, *et al*, 2017). Variabel IPM dipilih karena untuk melakukan kontrol kebijakan, mengingat IPM memuat beberapa aspek yaitu kesehatan, pendidikan dan hidup layak, sehingga melihat kesejahteraan harus melalui beberapa aspek.

Bab IV ini akan membahas hasil analisis dan pembahasan, pengaruh antara variabel independentt terhadap variabel dependet (jumlah penduduk miskin), dengan analisis deskriptif dan analisis regresi. Variabel independent terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), variabel Program Keluarga Harapan (PKH), variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), variabel rata-rata lama sekolah (RLS) dan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masing-masing variabel pernah dijadikan variabel penelitian oleh peneliti terdahulu.

4.1 Analisis Deskriptif

Pada analisis deskriptif ini agar dalam penyajian data dapat memberikan informasi yang cepat dan ringkas, sehingga memiliki gambaran mengenai ukuran data yang meliputi mean, median, modus dan standard deviasi, maka sub bab ini akan disajikan tentang mean, median, modus dan standard deviasi. Mean, median,

modus dan standard deviasi masing-masing variabel, ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4 1 Mean, Median, Modus, Standard Deviasi Masing-Masing Variabel

	Miskin	BPNT	PKH	PDRB	RLS	IPM
Mean	52.78451889	30550.94181	13919.1466	19329.12089	8.011789883	68.27989883
Median	29.48	14827	6542	7257.12245	7.86	68.05
Modus	11.91	7745	298	-	7.85	65.67
Stad. Dev	59.15207389	37092.09813	19348.2531	42878.11506	1.678671596	6.764925271

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa rata-rata penduduk miskin di Indonesia 52,78 ribu jiwa. Rata-rata posisi penduduk miskin di Indonesia sebesar 29,48 ribu jiwa. Kabupaten/Kota di Indonesia kebanyakan memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 11,91 ribu jiwa. Sedangkan deviasi standar jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 59,15 ribu jiwa. Rata-rata jumlah uang bantuan BPNT yang diterima Kabupaten/Kota di Indonesia 305,51 juta rupiah. Rata-rata posisi BPNT di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia adalah 148,27 juta rupiah. Kebanyakan kabupaten/kota menerima BPNT sebesar 77,45 juta rupiah. Deviasi standar BPNT sebesar 370,92 juta rupiah. Rata-rata jumlah uang bantuan PKH yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Indonesia 139,19 juta rupiah. Rata-rata posisi PKH di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia adalah 65,42 juta rupiah. Kebanyakan Kabupaten/Kota di Indonesia menerima PKH sebesar 29,8 juta rupiah. Sedangkan standar deviasi PKH sebesar 193,48 juta rupiah.

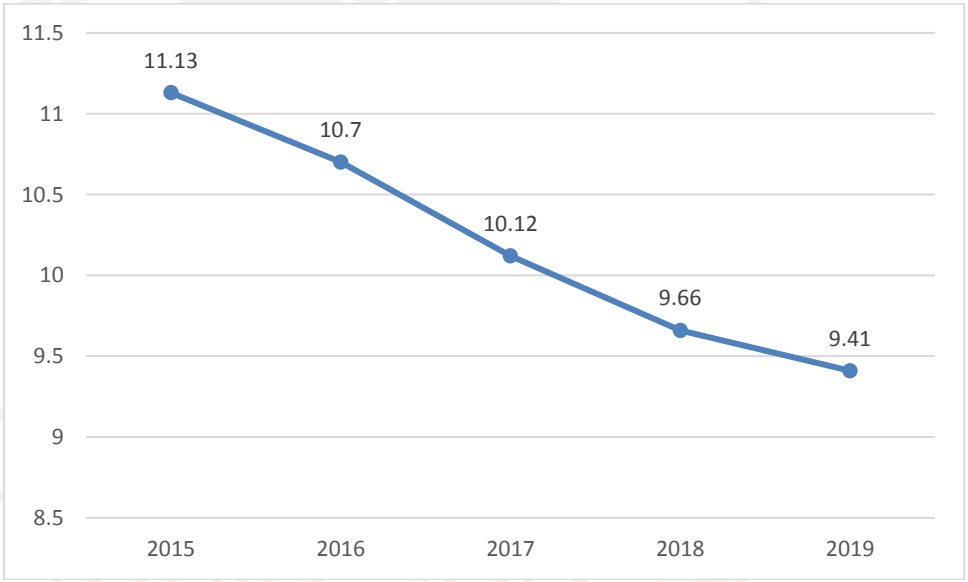
Rata-rata PDRB di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia 19329,12089 milyar rupiah. Rata-rata posisi PDRB di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia adalah 7257,12245 milyar rupiah.. Sedangkan standar deviasi PDRB sebesar 42878,11506

milyar rupiah. Rata-rata RLS yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Indonesia 8,012 tahun. Rata-rata posisi RLS di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia adalah 7,86 tahun. Kebanyakan Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki nilai RLS 7.85 tahun. Sedangkan standar deviasi RLS kabupaten/kota di Indonesia sebesar 1.67.

Rata-rata IPM yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Indonesia 68,28 indeks. Rata-rata posisi IPM di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia adalah 68,05 tahun. Kebanyakan Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki nilai IPM 65,67 indeks. Sedangkan standar deviasi IPM kabupaten/kota di Indonesia sebesar 6,76. indeks

1. Kemiskinan

Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019, persentase kemiskinan di Indonesia:

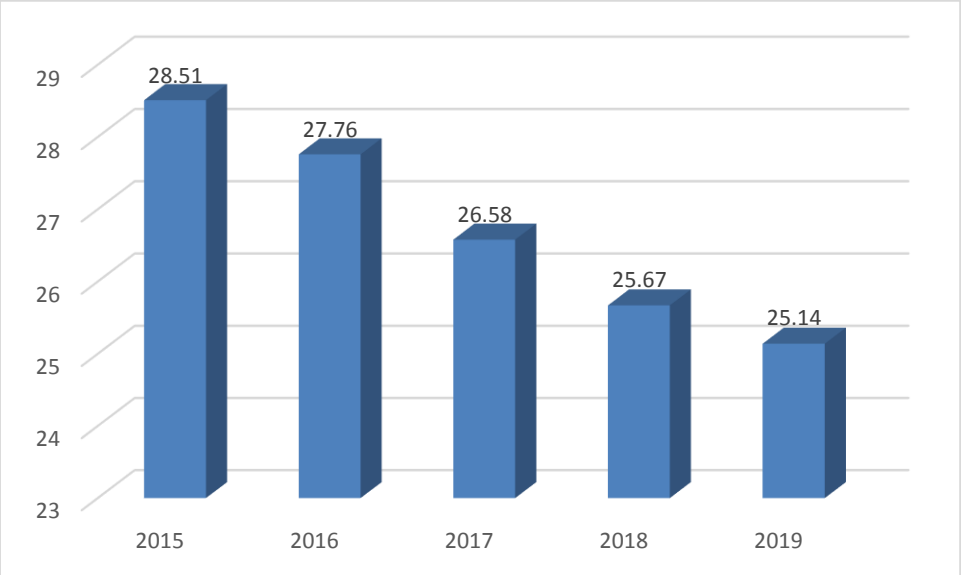


Gambar 4 1 Grafik Persentase Kemiskinan Indonesia 20015 – 2019

(Sumber : BPS, 2019)

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa penurunan angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2018 turun 0,46% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kemiskinan tahun 2015 sebesar 11,13% dan kemiskinan pada tahun

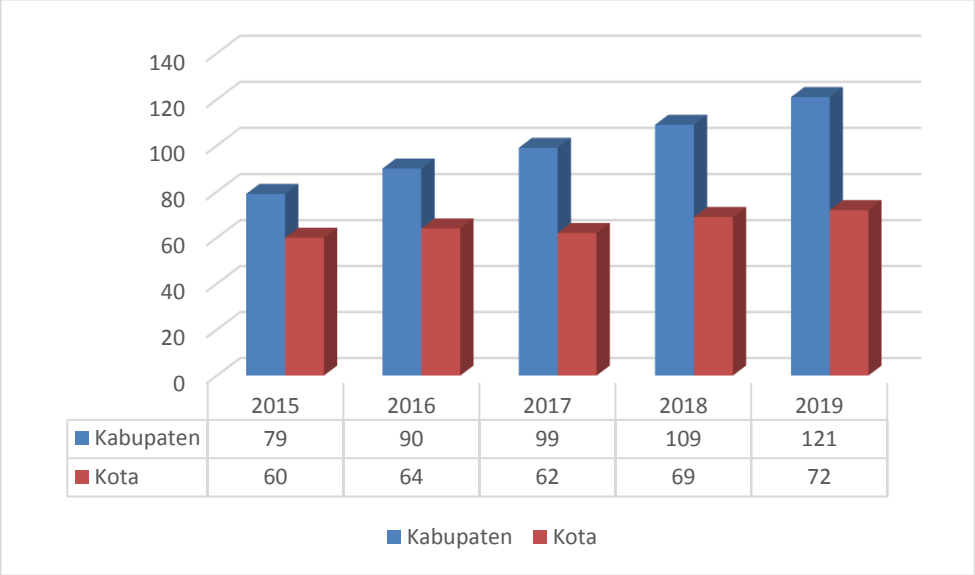
2019 sebesar 9,41%, selama 5 tahun turun sebesar 1,72%. Kondisi kemiskinan di Indonesia tahun 2015 – 2019 seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4 2 Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)

(Sumber : BPS, 2019)

Gambar 4.2 di atas, menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dimana kemiskinan turun sebesar 1,18 juta jiwa dibanding pada tahun 2016. Sedangkan tahun-tahun berikutnya penurunan selama lima tahun terakhir tidak melebihi dari satu juta orang. Sementara target kemiskinan nasional tahun 2019 diharapkan turun pada angka 7% – 8%, tetapi sampai akhir tahun 2019 masih pada angka 9,82%. Target nasional yang belum tercapai itu, diperlukan peran pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyumbang target Nasional. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu mencapai angka kemiskinan sesuai target nasional tertera pada gmabar di bawah ini:

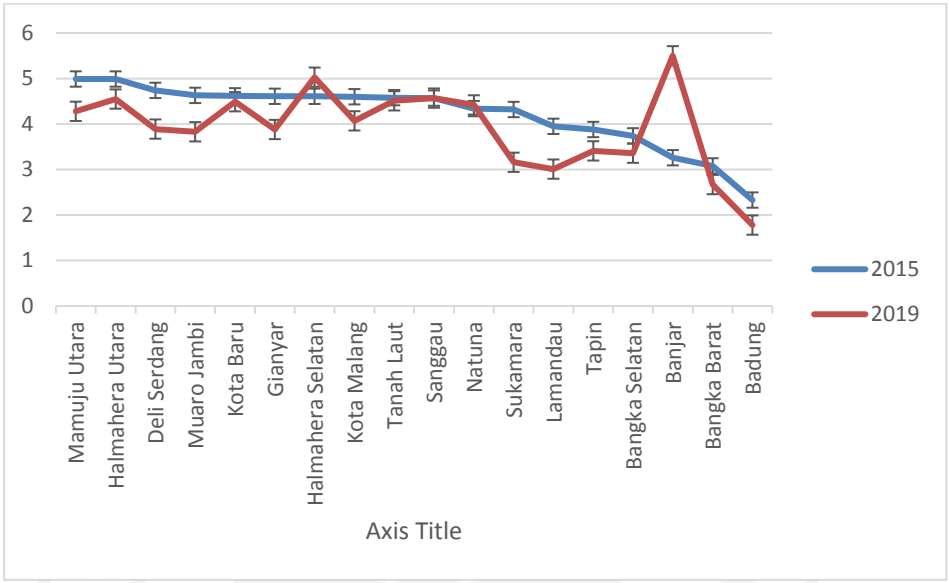


Gambar 4 3 Jumlah Kabupaten dan Kota dengan Kemiskinan di bawah 8%

Bardasarkan gambar 4.3 di atas, pada tahun 2015 terdapat 79 Kabupaten dan 60 Kota yang memiliki angka kemiskinan di bawah 8%. Selama kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan jumlah kabupaten dan Kota yang memiliki angka kemiskinan sesuai target nasional. Pada tahun 2019 sebanyak 121 Kabupaten dari 416 kabupaten dan 72 Kota dari 98 Kota yang ada di Indonesia memiliki angka kemiskinan di bawah 8%.

Pada tahun 2015 presentase kemiskinan yang paling rendah ada di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan angka kemiskinan sebear 2,33%. Sedangkan Kabupaten yang memiliki angka kemiskinan 8% adalah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019 Kabupaten Badung, Provinsi Bali memiliki angka kemiskinan yang paling rendah yakni sebesar 1,78%. Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinannya sebesar 7,98%.

Kurun waktu 2015 – 2019 Kabupaten yang memiliki angka kemiskinan sampai dengan 8%:

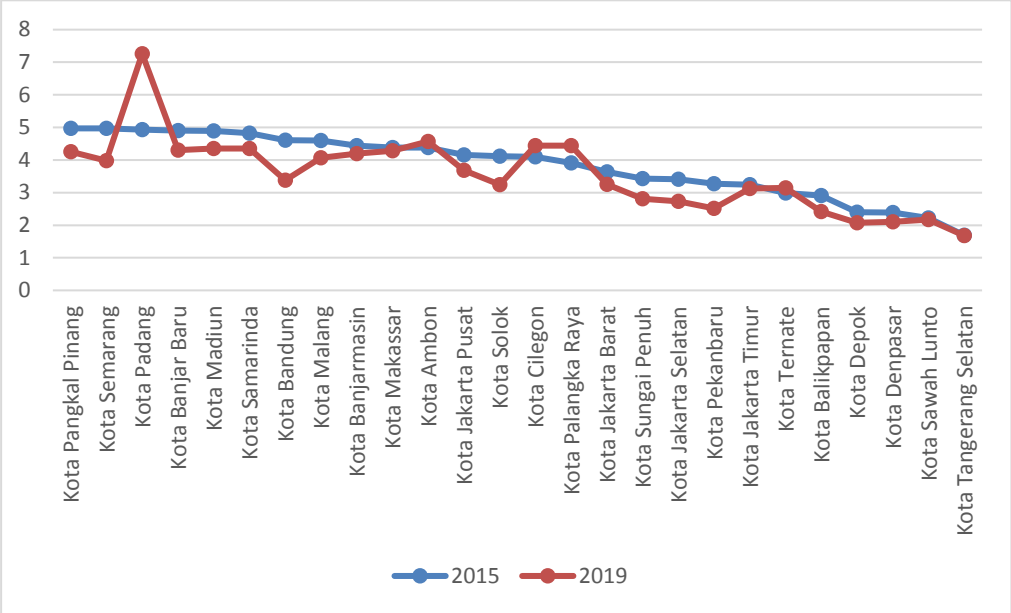


Gambar 4 4 Kabupaten dengan Angka Kemiskinan 8% Tahun 2015 dan 2019

Berdasarkan gambar 4.4 di atas, tahun 2015 angka kemiskinan terendah sebesar 2,33% di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan tahun 2019 memiliki angka kemiskinan 1,78%. Lonjakan kenaikan angka kemiskinan terjadi di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada tahun 2015 memiliki angka kemiskinan 3,26% naik sebesar 2,24%, sehingga pada tahun 2019 angka kemiskinan menjadi 5,5%. Kenaikan kemiskinan juga terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, dimana pada tahun 2015 angka kemiskinannya sebesar 4,61% sampai dengan tahun 2019 naik sebesar 0,42%, sehingga menjadi 5,03%.

Tahun 2015 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten memiliki angka kemiskinan terendah sebesar 1,69%. Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh memiliki angka kemiskinan sebesar 7,72% atau di bawah 8%. Pada tahun 2019 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten memiliki angka kemiskinan terendah sebesar

1,68%. Sedangkan Kota Palopo angka kemiskinannya mencapai 7,82% di bawah target nasional pada level 8%. Kota dengan angka kemiskinan di bawah 5% pada tahun 2015 – 2019, seperti gambar di bawah ini:

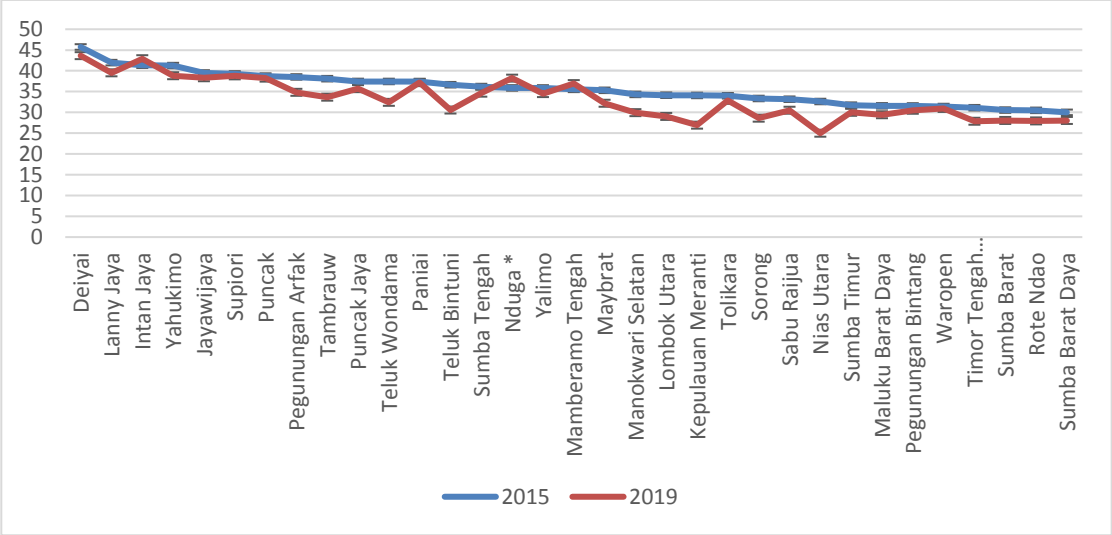


Gambar 4 5 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota 2015 dan 2019

Gambar 4.5 di atas, memperlihatkan bahwa Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten memiliki angka kemiskinan sebesar 1,69% dengan penurunan di akhir tahun 2019 sebesar 0,01%, sehingga menjadi 1,68%. Kota Tangerang memiliki angka kemiskinan paling kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Indonesia. Kota Padang dalam kurun waktu 5 tahun angka kemiskinannya naik dari 4,98% di tahun 2015, naik sebesar 2,33%, sehingga pada akhir tahun 2019 angka kemiskinan di Kota Padang sebesar 7,26%. Kenaikan kemiskinan di Kota Padang terjadi pada tahun 2016 sebesar 8,32%. Kemiskinan tertinggi di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua. Tahun 2015 angka kemiskinannya sebear 45,74%. Penurunan

angka kemiskinan di Kabupaten Deiyai sangat lambat, dimana pada tahun 2019 kemiskinannya sebesar 45,69%.

Sedangkan Kabupaten yang memiliki angka kemiskinan di atas 30% adalah sebagai berikut:



Gambar 4 6 Kabupaten dengan Jumlah penduduk miskin Tinggi

Tahun 2015 – 2019

Gambar 4.6 di atas, menunjukkan bahwa angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua sebesar 45,74%. Selama kurun waktu 5 lima tahun, Kabupaten Deiyai hanya dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,9%, sehingga pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Deiyai sebesar 45,69%. Pada tahun 2015 Kabupaten yang memiliki angka kemiskinan di atas 30% yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan angka kemiskinan sebesar 30,01%. Kabupaten Sumba Barat Daya selama kurun waktu 5 tahun, hanya bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,95%, sehingga di akhir tahun 2019 angka kemiskinannya sebesar 28,06%. Kota yang memiliki angka

kemiskinan tertinggi pada tahun 2015 adalah Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan angka kemiskinan sebesar 25,42% di tahun 2015.

Wilayah Kota yang memiliki angka kemiskinan tinggi sebagai berikut:

Tabel 4 2 Presentase Kemiskinan Tertinggi di Kota (ribu jiwa)

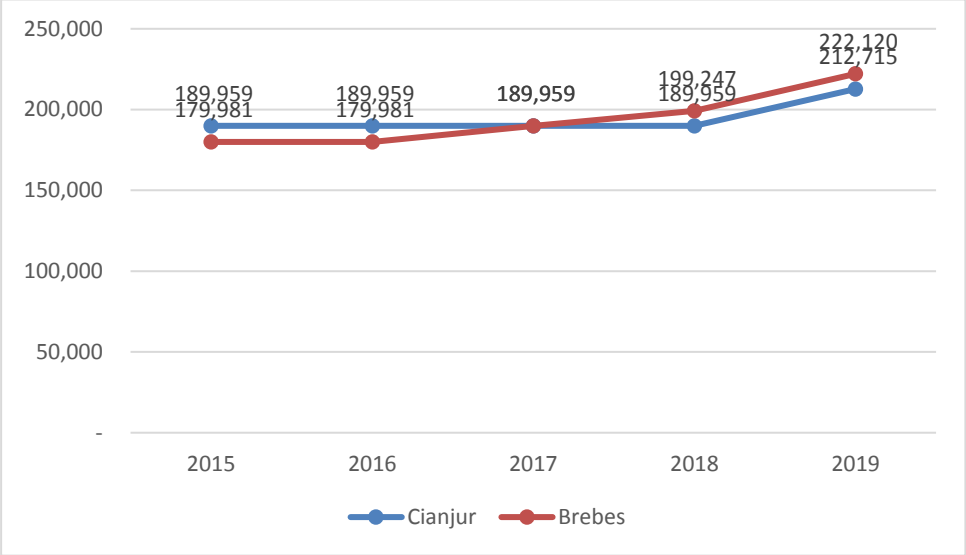
Tahun 2015 dan 2019

No.	Kota	Tahun	
		2015	2019
1.	Kota Gunungsitoli	25,42	16,23
2.	Kota Tual	24,90	21,68
3.	Kota Subulussalam	20,39	17,95

Pada tabel 4.2 di atas, diketahui Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku dan Kota Subulussalam Provinsi Aceh, memiliki angka kemiskinan tinggi jika di bandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, selama kurun waktu 5 tahun dapat menurunkan angka kemiskinan cukup signifikan sebesar 9,19%. Kota Tual Provinsi Maluku selama kurun waktu 5 tahun menurunkan angka kemiskinan sebesar 3,22%, dan Kota Subulussalam turun sebesar 2,44%.

2. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

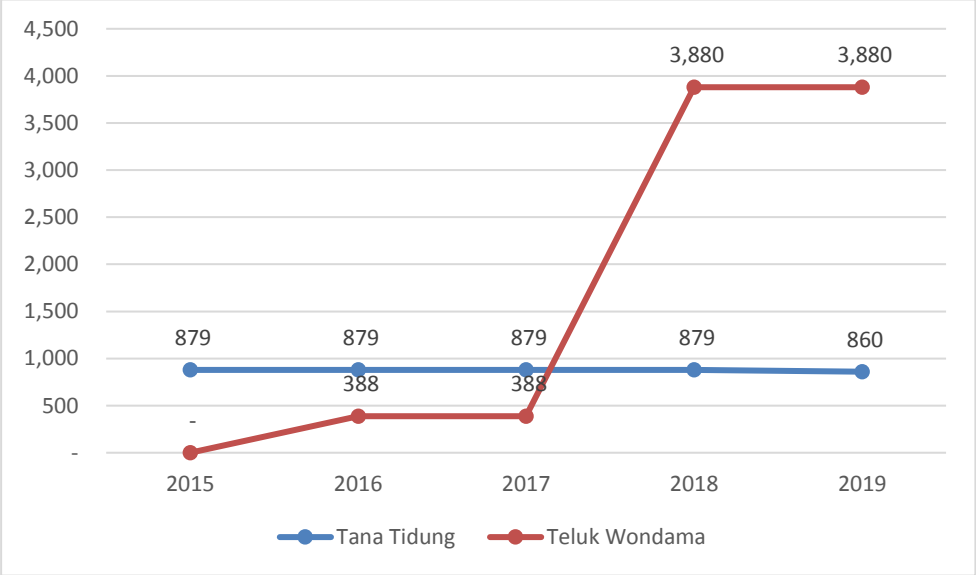
Kabupaten/Kota penerima BPNT tertinggi tahun 2015 dan tahun 2019, sebagai berikut:



Gambar 4 7 Jumlah Penerima BPNT Tertinggi pada Kabupaten di Indonesia

Berdasarkan gambit 4.7 di atas, pada tahun 2015 Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat menjadi penerima BPNT tertinggi sejumlah 189.959 orang, dan pada tahun 2019 naik sebanyak 22.756 orang, sehingga jumlah penerima BPNT menjadi 212.715. Pada tahun 2018 Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah terdapat 199.247 orang yang menerima BPNT dan mengalami kenaikan jumlah penerima sebanyak 22.873 orang, sehingga akhir tahun 2019 penerima BPNT di Kabupaten Brebes bertambah menjadi 222.120 orang. Kabupaten Brebes menjadi kabupaten yang menerima BPNT paling banyak jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

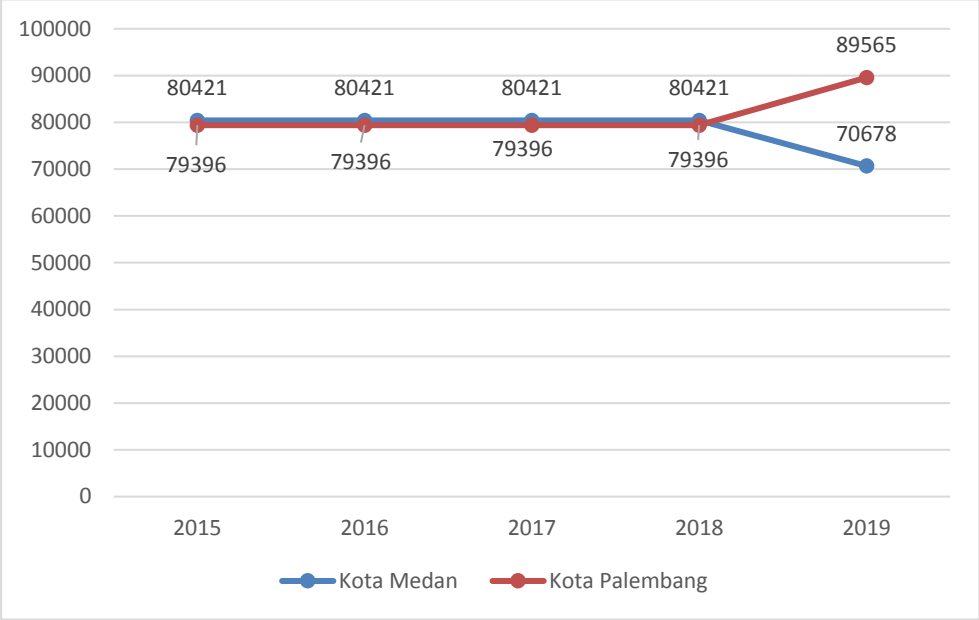
Sedangkan Kabupaten penerima BPNT terendah adalah :



Gambar 4 8 Jumlah Penerima BPNT Terendah pada Kabupaten di Indonesia

Berdasarkan gambar 4.8 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2015 Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat belum mendapatkan BPNT. Teluk Wondama terbentuk pada 12 April 2003 hasil pemekaran Kabupaten Manokwari (https://wikipedia.org/wiki/, diakses 1 September 2020). Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 mendapat BPNT untuk 879 orang. Kabupaten Tana Tidung lebih muda dibanding Kabupaten Teluk Wondama, dimana Kabupaten Tana Tidung terbentuk tahun 2012 dari hasil pemekaran Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, Kabupaten ini telah disetujui DPR RI menjadi kabupaten pada 17 Juli 2007. (https://id.wikipedia.org/wiki/) , diakses tanggal 1 September 2020), justru lebih duluan menerima BPNT.

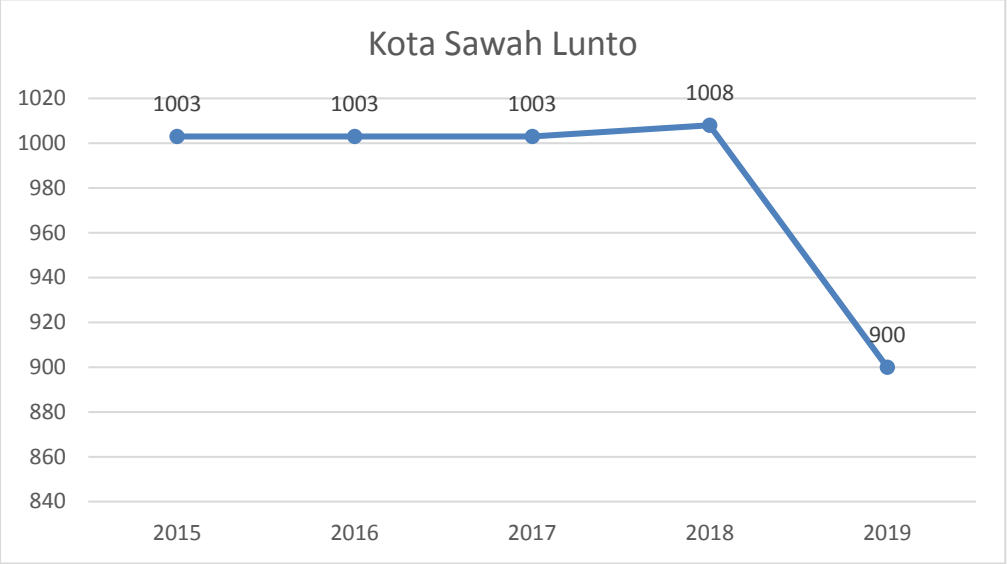
Sedangkan Kota penerima BPNT tertinggi sebagai berikut:



Gambar 4 9 Jumlah Penerima BPNT Tertinggi pada Kota di Indonesia

Pada tahun 2015 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara menerima BPNT tertinggi sebanyak 80.421 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebanyak 9.743 orang, menjadi 70.678 orang. Sedangkan Kota yang mengalami kenaikan jumlah bantuan di tahun 2019 adalah kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dimana pada tahun 2015 menerima sebanyak 79.396 naik menjadi 89.565 orang atau naik sebesar 10.169 orang.

Kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat menerima BPNT terendah, seperti pada grafik di bawah ini:

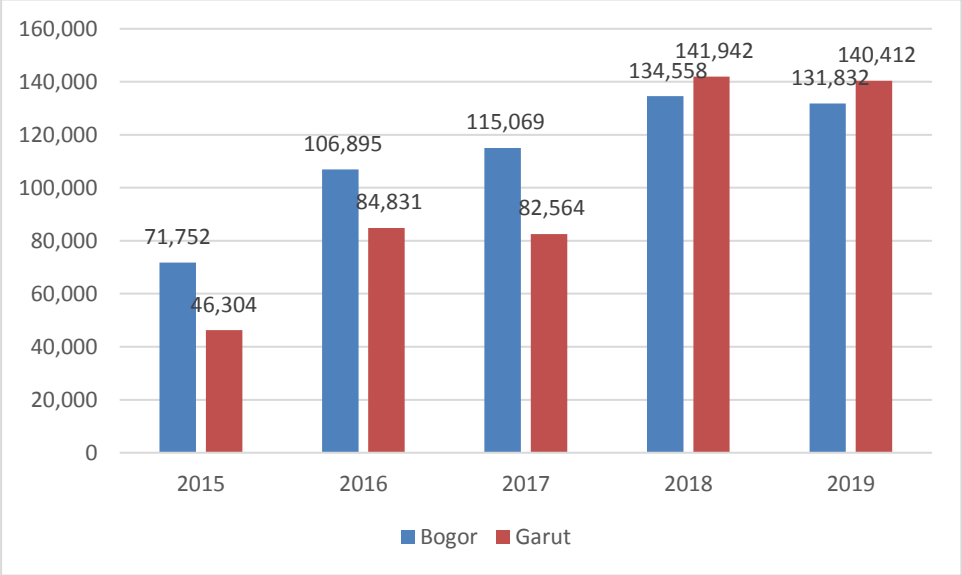


Gambar 4 10 Perkembangan BPNT di Kota Sawah Lunto

BPNT di Kota Sawah Lunto mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebanyak 1.008 orang. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 103 orang, sehingga pada tahun 2019 BPNT yang diterimakan di Kota Sawah Lunto sebanyak 900 KPM.

3. PKH (Program Keluarga Harapan)

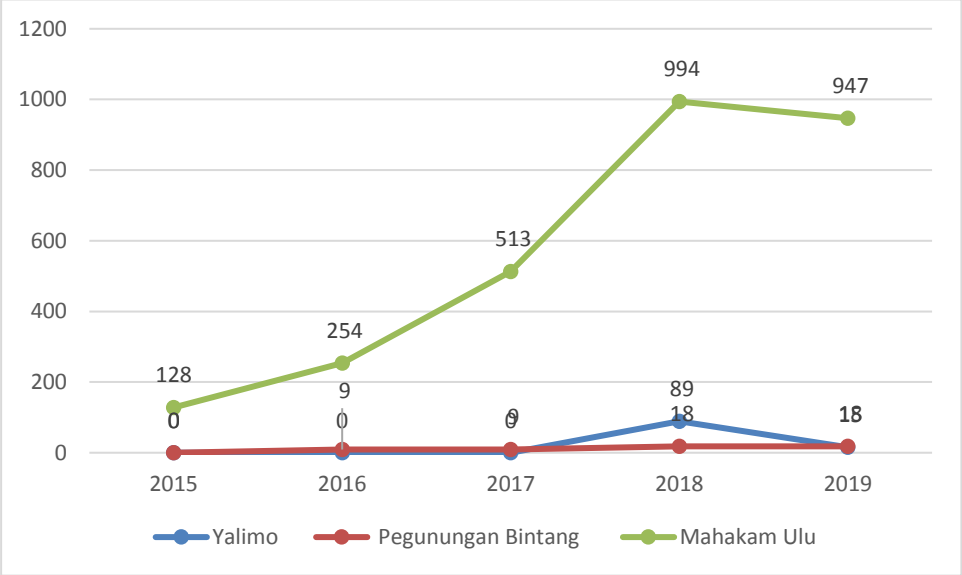
PKH pertama kali diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2007. Bantuan sosial ini diberikan kepada semua orang miskin di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini, data PKH tahun 2015 – 2019. Tahun 2015 – 2019. Kabupaten penerima PKH tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun, seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4 11 Kabupaten Penerima PKH Tertinggi 2015 – 2019

Ilustrasi gambar 4.11 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 – 2019 penerima PKH terbesar berada di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 penerima PKH tertinggi di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Bantuan PKH mengalami pengurangan baik di Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Garut pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2018 Kabupaten Bogor sebanyak 194.558 orang penerima dan di Kabupaten Garut menerima 141.942 orang. Tahun 2019 Kabupaten Bogor penerimaan PKH turun menjadi 131.897 orang dan di Kabupaten Garut penerima PKH juga mengalami pengurangan menjadi 140.412 orang.

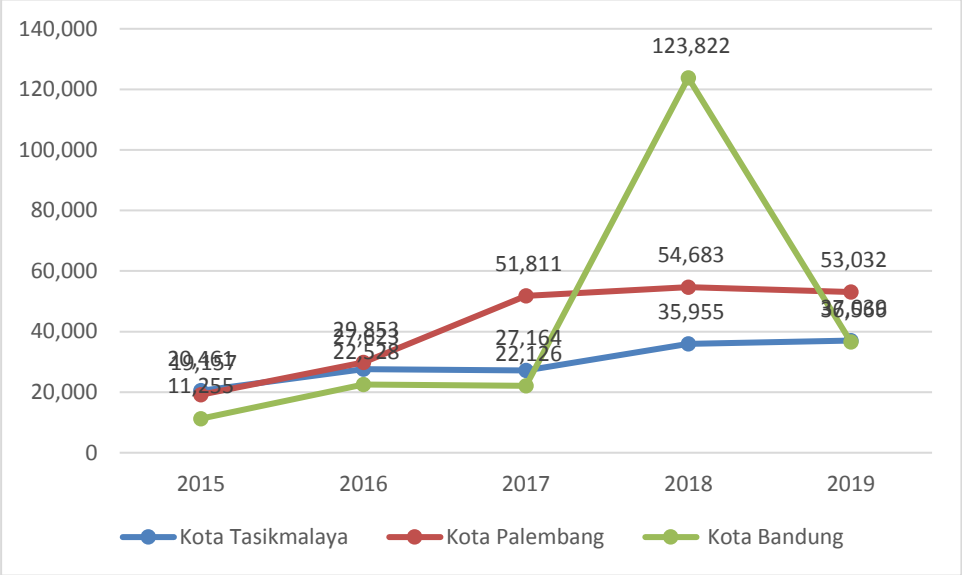
Kabupaten yang menerima PKH terendah ada 3 kabupaten selama kurun waktu 2015 – 2019, seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 4 12 Kabupaten Penerima PKH Terendah Tahun 2015-2019

Pada gambar 4.12 di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua baru menerima PKH sejak tahun 2016. Kabupaten ini berdiri sejak 11 Desember 2002 dan sebagai kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara Papua Nugini di sebelah Timur. Tahun 2016 Pegunungan Bintang menerima PKH sebanyak 9 orang. Begitu juga Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua baru menerima PKH pada tahun 2018 sebanyak 89 orang, dan pada tahun 2019 sebanyak 15 orang. Pada tahun 2015 Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur menerima PKH terkecil sebanyak 128 orang. Setiap tahun mengalami kenaikan, dan pada tahun 2019 menerima sebanyak 947 orang atau berkurang sebanyak 47 orang.

Kota di Indonesia yang menerima PKH tertinggi dan terendah sebagai berikut:

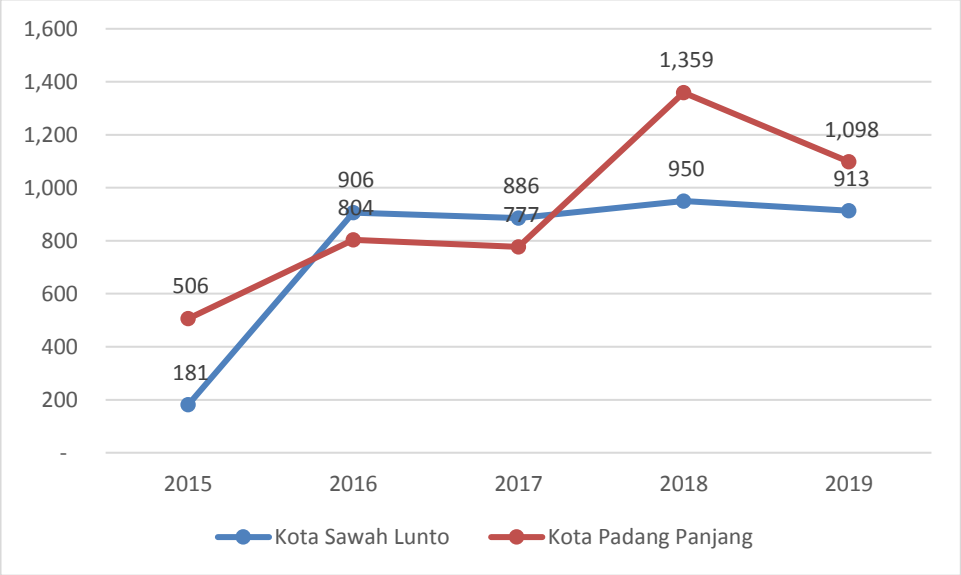


Gambar 4 13 Kota Penerima PKH Tertinggi Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan gambar 4.13 di atas, diketahui bahwa tahun 2015 Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat menerima PKH tertinggi sebanyak 20.461 orang. Pada tahun 2016 penerima PKH tertinggi di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sejumlah 29.853 orang dan tahun 2017 sebanyak 51.811 orang.

Pada tahun 2018, Kota Bandung menerima PKH tertinggi dibandingkan dengan Kota-Kota lain yakni sejumlah 123.822 orang. Pada tahun 2019 penerima PKH tertinggi ada di Kota Palembang sebanyak 53.032 KPM.

Sedangkan Kota dengan penerimaan PKH terendah dalam kurun waktu 2015 – 2019:

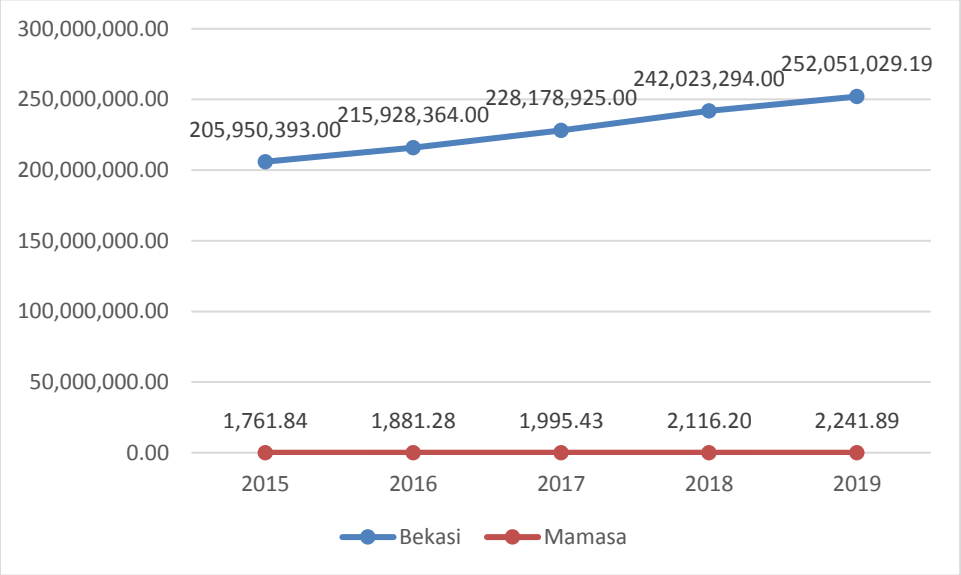


Gambar 4 14 Kota Penerima PKH Terendah Tahun 2015 – 2019

Pada gambar 4.14 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 Kota yang mendapatkan PKH terkecil adalah Kota Sawah Lunto Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penerima 181 orang. Pada tahun 2016, Kota Padang Panjang menerima PKH terkecil yaitu sejumlah 804 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 777 orang. Tahun 2018 yang menerima PKH paling sedikit adalah Kota Sawah Lunto sebanyak 950 orang dan tahun 2019 sebanyak 913 orang. Kenaikan penerima PKH sangat signifikan terjadi pada tahun 2016 untuk Kota Sawah Lunto dengan kenaikan sebanyak 725 orang.

4. PDRB

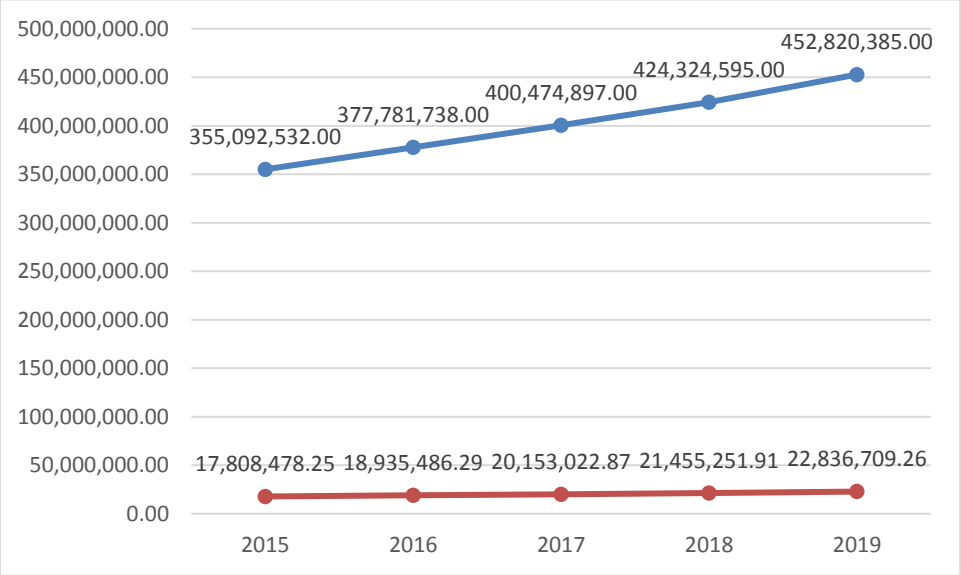
PDRB berdasarkan harga konstan 2010 untuk Kabupaten dan Kota dari tahun 2015 – 2019 yang tertinggi dan terendah dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4 15 PDRB Tertinggi dan Terendah untuk Kabupaten

Tahun 2015 – 2019

Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 – 2019 memiliki PDRB tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain. Berdasarkan gambar 4.15 di atas dalam setiap tahun mengalami kenaikan. Sedangkan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat memiliki PDRB yang rendah dari 416 Kabupaten yang ada di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Bekasi peningkatan PDRB di Kabupaten Mamasa lebih lambat. Sedangkan Kota dengan PDRB tertinggi adalah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat memiliki PDRB terendah dibanding dengan 98 Kota di Indonesia.

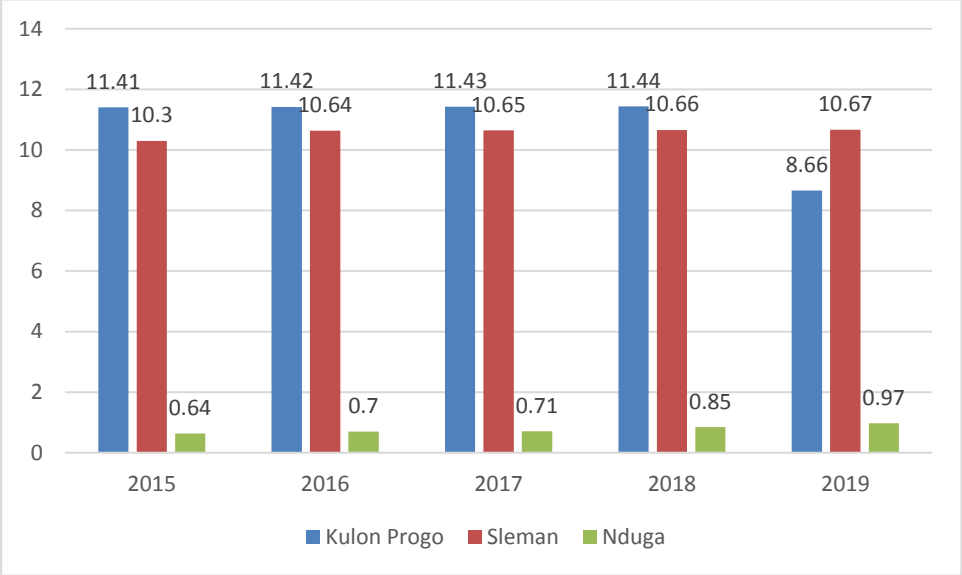


Gambar 4 16 PDRB Kota Tahun 2015 – 2019

Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dengan PDRB di atas Rp. 350.000.000.000,00, sedangkan Kota Singkawang di atas Rp. 17.000.000.000,00. Kota Jakarta Pusat, juga lebih tinggi nilai PDRB jika dibandingkan dengan Kabupaten Bekasi, yang memiliki PDRB tertinggi diantara 416 Kabupaten yang ada di Indonesia.

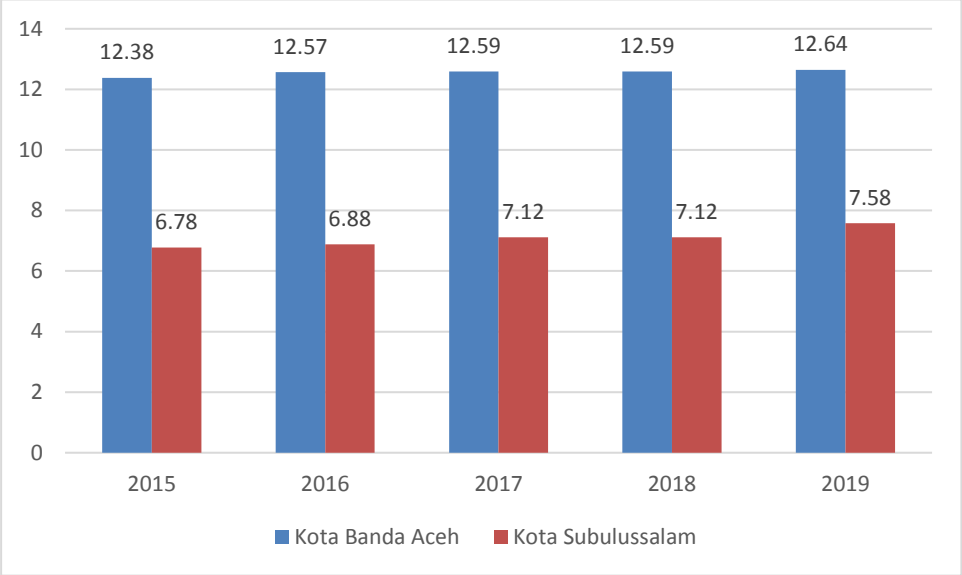
5. RLS

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai ukuran mengetahui rata-rata pendidikan yang ditamatkan masyarakat dalam suatu Kabupaten dan Kota. RLS Kabupaten dan Kota tertinggi dan terendah akan dideskripsikan dalam uraian ini. Kabupaten dengan angka RLS tertinggi dan terendah, sebagai berikut:



Gambar 4 17 Angka RLS Kabupaten Tertinggi dan Terendah Tahun 2015-2019

Pada gambar 4.17 di atas, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka RLS tertinggi di atas 11 tahun, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 8,66 tahun. Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka RLS tertinggi pada tahun 2019 yakni 10,67 tahun. Kabupaten Sleman memiliki angka RLS terus mengalami peningkatan angka RLS dari tahun ke tahun. Sedangkan Kabupaten Nduga Provinsi Papua memiliki angka terendah sebesar 0,92 di tahun 2019. Walaupun angka RLS meningkat dari tahun ke tahun, namun masyarakat Kabupaten Nduga masih memiliki pendidikan yang rendah. Selanjutnya, untuk Kota dengan angka RLS tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut:

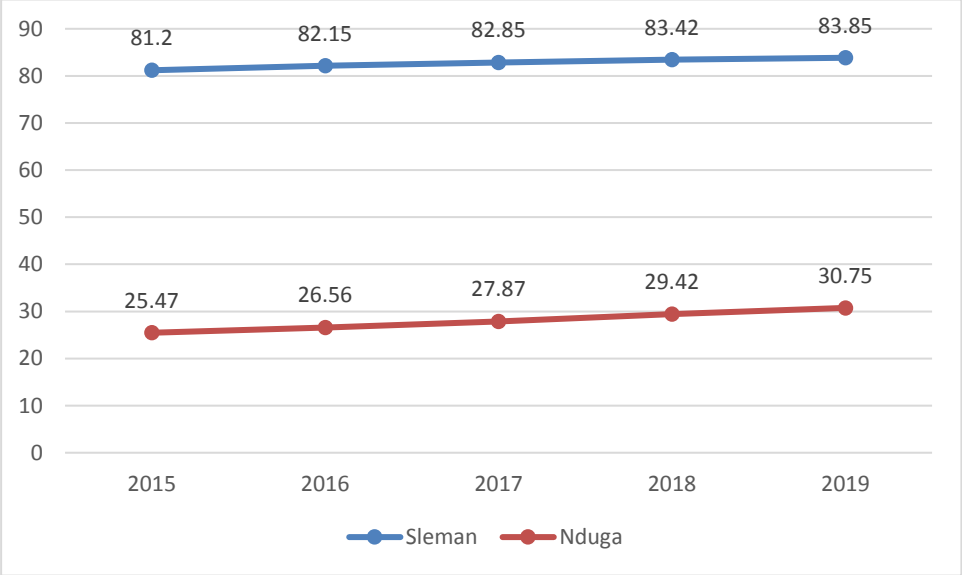


Gambar 4 18 RLS Kota Tertinggi dan Terendah 2015 – 2019

Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh memiliki angka RLS tertinggi sebesar 12,38 pada tahun 2015. Setiap tahun terus mengalami kenaikan sampai tahun 2019. Sedangkan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh memiliki RLS rendah sebesar 6,78 dan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun berikutnya. Melihat data tersebut, diketahui bahwa Kota memiliki angka RLS lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten di Indonesia.

6. IPM

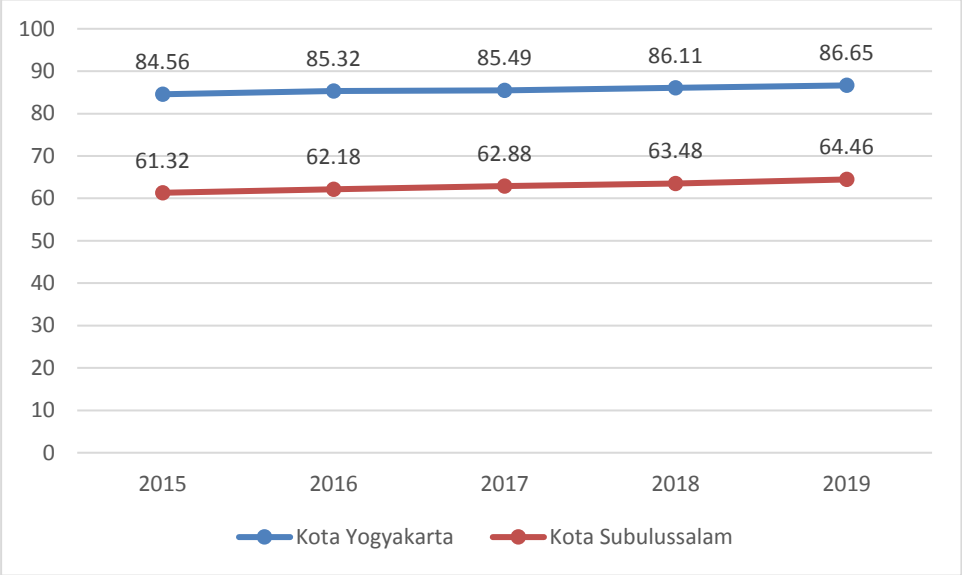
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki peran penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Perkembangan IPM di Indonesia akan dideskripsikan dengan mengelompokkan IPM tertinggi dan terendah baik pada Kabupaten maupun Kota di Indonesia. Kabupaten dengan IPM tertinggi dan terendah, seperti pada gambar berikut:



Gambar 4 19 IPM Kabupaten Tertinggi dan Terendah 2015 – 2019

Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015 – 2019, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki IPM tertinggi se Indonesia, dari tahun 2015 – 2019. Tahun 2015 IPM Sleman 81,2 dan tahun 2019 pada angka 83,65. IPM terendah pada Kabupaten ada di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua dengan angka 25,47 pada tahun 2015. Walaupun Kabupaten Nduga mengalami kenaikan IPM pada tahun-tahun berikutnya, namun IMP di Kabupaten ini tergolong rendah se Indonesia, dimana pada tahun 2019 sebesar 3.75. Apabila dibandingkan dengan Kota-Kota yang ada di Indonesia, IPM Kabupaten masih berada di bawah IPM Kota.

IPM tertinggi dan terendah pada Kota di Indonesia, seperti pada gambar berikut:



Gambar 4 20 IPM Kota Tertinggi dan Terendah 2015 – 2019

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki IPM tertinggi di Indonesia, dimana pada tahun 2015 IPM di Yogyakarta mencapai 84,56. IMP di Yogyakarta mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan IPM terendah ada di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Kota Subulussalam pada tahun 2015 memiliki IPM sebesar 61,32 dan terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2019.

4.2 Analisis Pemilihan Model Panel Yang Tepat

Regresi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dan olah datanya menggungunakan Eviews 10. Sebelum dilakukan estimasi, maka langkah awal mencari model yang terbaik dengan uji Chow dan uji Hausman. Kedua uji ini akan menghasilkan model yang akan digunakan untuk estimasi. Uji Chow akan menghasilkan *common effect* atau *fixed effect* yang akan digunakan untuk mengistemasi data panel, dengan hipotesis H_0 = *common effect,* H_1 = *fixed effect.* Uji Hausman digunakan untuk melihat apakah terdapat efek acak di dalam

model. Hipotesis uji ini H_0 = terdapat efek acak dalam model (*random effect*), H_1= tidak terdapat efek acak dalam model (*fixed effect*).

Uji Chow dan uji Hauman dilakukan untuk semua obyek analisis, untuk mengetahui model yang terbaik dari obyek penelitian yaitu:

1. Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia;
2. Kabupaten di pulau Jawa;
3. Kabupaten di luar pulau Jawa;
4. Kota di pulau Jawa;
5. Kota di luar pulau Jawa.

Setelah menguraikan hasil uji Chow dan uji Hausman pada ke lima obyek analisis di atas, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan model terbaik berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman. Hasil ujinya akan dibahas menurut kabupaten dan kota.

Hasil yang diperoleh dari uji Chow dan uji Hausman akan digunakan untuk menganilis data. Analisis data menggunakan 2 model yaitu model data panel statis dan model data panel dinamis. Analisis regresi dengan data statis, data diasumsikan sebagai data yang tetap, sehingga variabel terpilih tahun ini berpengaruh terhadap variabel lain tahun berjalan. Sedangkan data dinamis merupakan data yang tidak tetap selalu berubah dan berganti dalam setiap tahunnya. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan data dinamis akan berpengaruh pada variabel lain tahun berikutnya, artinya tidak langsung berdampak pada saat itu, melainkan membutuhkan waktu jeda selama 1 tahun. Oleh karena itu, analisis ini menggunakan dua pendekatan

statis dan dinamis untuk membuktikan apakah data akan berpengaruh langsung atau berpengaruhnya membutuhkan waktu jeda 1 tahun berikutnya.

4.2.1 Uji Chow dan Uji Hausman Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

1. Uji Chow

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa uji ini bertujuan untuk melihat apakah *common effect* atau *fixed effect* yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel, dimana H_0 = *common effect,* dan H_1 = *fixed effect*. Daerah kritis dari uji ini adalah H_0 ditolak, jika nilai P-value (Prob) < α (0,05). Berdasarkan hasil uji Chow diperolah hasil, sebagai berikut:

Tabel 4 3 Hasil Uji Chow Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED_EFFECT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	194.928281	(513,2051)	0.0000
Cross-section Chi-square	10041.318060	513	0.0000

Berdasarkan hasil uji Chow di atas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0.0000, dimana 0.0000 < 0.05, sehingga H_0 ditolak, maka H_1 diterima, sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*.

2. Uji Hausman

Untuk mengetahui model *radom effect* atau *fixed effect* sebagai model yang terbaik untuk digunakan alat estimasi, maka dilakukan uji Hausman terlebih dahulu. Hipotesis dari uji ini adalah :

H_0 = terdapat efek acak dalam model *(Random effect)*

H_1 = tidak terdapat efek acak dalam model *(Fixed effect)*

Hasil uji Hausman seperti di bawah ini:

Tabel 4 4 Hasil Uji Hausman Variabel Indedpendent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: UJI_HAUSMAN Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1463.254129	5	0.0000

.

Berdasarkan hasil uji di atas, diperoleh prababilitas sebesar 0,0000, dimana 0,0000 < 0,05, sehingga H_o ditolak, maka model yang digunakan untuk mengestimasi pada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia adalah model *fixed effect.*

4.2.2 Uji Chow dan Uji Hausman Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten di Pulau Jawa

1. Uji Chow

Uji Chow analisis untuk Kabupaten di pulau Jawa, diperoleh hasil:

Tabel 4 5 Hasil Uji Chow Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten di Pulau Jawa

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED_EFFECT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	321.606962	(84,335)	0.0000
Cross-section Chi-square	1870.994807	84	0.0000

Berdasarkan hasil uji Chow di atas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0.0000, dimana 0.0000 < 0.05, sehingga H_0 ditolak, maka H_1 diterima, sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*.

2. Uji Hausman

Hasil uji Hausman pada analisis Kabupaten di pulau Jawa, untuk mendapatkan model yang terbaik pada variabel independent terhadap variabel dependent, sebagai berikut:

Tabel 4 6 Hasil Uji Hausman Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten di Pulau Jawa

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: UJI_HAUSMAN
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	661.618842	5	0.0000

Berdasarkan hasil uji di atas, diperoleh prababilitas sebesar 0,0000, dimana 0,0000 < 0,05, sehingga H_o ditolak, maka model yang digunakan adalah model *fixed effect.*

Dengan demikian model yang digunakan untuk mengestimasi pada Kabupaten di pulau Jawa menggunakan model *Fixed Effect.*

4.2.3 Uji Chow dan Uji Hausman Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten di Luar Pulau Jawa

1. Uji Chow

Model terbaik pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent untuk Kabupaten di luar pulau Jawa:

Tabel 4 7 Hasil Uji Chow Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten di Luar Pulau Jawa

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED_EFFECT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	141.832140	(330,1319)	0.0000
Cross-section Chi-square	5952.867770	330	0.0000

Berdasarkan hasil uji Chow di atas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0.0000, dimana 0.0000 < 0.05, sehingga H_0 ditolak, maka H_1 diterima, sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*.

2. Uji Hausman

Hasil uji Hausman setelah dilakukan estimasi untuk Kabupaten di luar pulau Jawa:

Tabel 4 8 Hasil Uji Hausman Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kabupaten di Luar Pulau Jawa

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: UJI_HAUSMAN
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	553.532848	5	0.0000

Berdasarkan hasil uji di atas, diperoleh prababilitas sebesar 0,0000, dimana 0,0000 < 0,05, sehingga H_o ditolak, maka model yang digunakan adalah model *fixed effect* untuk mengestimasi Kabupaten di luar pulau Jawa.

4.2.4 Uji Chow dan Uji Hausman Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kota di Pulau Jawa

1. Uji Chow

Agar dapat mengetahui model yang terbaik untuk melakukan estimasi Kota di luar pulau Jawa, dilakukan uji Chow:

Tabel 4 9 Hasil Uji Chow Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kota di Pulau Jawa

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED_EFFECT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	449.770115	(33,131)	0.0000
Cross-section Chi-square	805.601809	33	0.0000

Berdasarkan hasil uji Chow di atas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0.0000, dimana 0.0000 < 0.05, sehingga H_0 ditolak, maka H_1 diterima, sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*.

2. Uji Hausman

Hasil uji Hausman pada Kota di pulau Jawa, menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4 10 Hasil Uji Hausman Variabel Independent dengan Variabel Dependent untuk Kota di Pulau Jawa

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: UJI_HAUSMAN Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	133.929329	5	0.0000

Berdasarkan hasil uji Hausman di atas, diperoleh prababilitas sebesar 0,0000, dimana 0,0000 < 0,05, sehingga H_o ditolak, maka model yang digunakan adalah model *fixed effect* untuk mengestimasi Kota di pulau Jawa.

4.2.5 Uji Chow dan Uji Hausman Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kota di Luar Pulau Jawa

1. Uji Chow

Analisis mencari model untuk Kota di luar pulau Jawa dengan melakukan estimasi uji Chow terlebih dahulu, untuk mendapatkan model yang terbaik.

Tabel 4 11 Hasil Uji Chow Variabel Independent dengan Variabel Dependent untuk Kota di Luar Pulau Jawa

Redundant Fixed Effects Tests Equation: FIXED_EFFECT Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	919.284143	(63,251)	0.0000
Cross-section Chi-square	1742.592521	63	0.0000

Berdasarkan hasil uji Chow di atas, terlihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000, sehingga 0,0000 < 0,05, untuk itu model yang digunakan adalah model *fixed effect.*

2. Uji Hausman

Hasil uji untuk memilih *common effect* atau *fixed effect* telah selesai, dan kesimpulannya adalah model *fixed effect*, maka kemudian menentukan apakah *random effect* atau *fixed effet* yang lebih baik, selanjutnya dilakukan uji Hausman. Hasil uji Hausma sebagai berikut:

Tabel 4 12 Hasil Uji Hausman Variabel Independent terhadap Variabel Dependent untuk Kota di Luar Pulau Jawa

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: UJI_HAUSMAN Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	107.262682	5	0.0000

Berdasarkan hasil uji Hausman di atas, diketahui bahwa probabilitas 0,0000, dimana 0,000 < 0,05, dengan demikian model yang dipilih adalah model *fixed effect.*

4.3 Analisis Hasil Regresi

Setelah dilakukan pengujian untuk mendapatkan model yang terbaik, maka langkah selanjutnya menggunakan model *fixed effect* untuk mengestimasi variabel independent terhadap variabel dependent pada Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa.

Uji *fixed effect* ini akan dilakukan dengan dua uji yakni dengan menggunakan panel statis (LS) dan panel dinamis (*Generalized Method of Moments*). Uji panel dengan model *Generalized Method of Moments* dilakukan karena dampak dari suatu kebijakan tidak langsung bisa dirasakan, tetapi membutuhkan waktu jeda setelah tahun berjalan. Oleh karena itu jumlah observasi dengan time series terbatas hanya 5 tahun, maka pendekatan yang tepat dengan metode GMM. GMM dipakai dengang memasukkan *lag* variabel dependent, berdasarkan asumsi variabel ekonomi bersifat dinamis, sehingga kemungkinan dampaknya bisa dirasakan setelah pelaksanaan program. Pendekatan data panel statis, dimungkinkan program langsung berpengaruh mendapatkan hasil pada saat proese program sedang berlangsung.

Dengan demikian dalam regresi data panel memiliki 2 model yaitu regresi data panel statis dan regresi data panel dinamis. Penelitian menggunakan 2 model

tersebut, untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hasil regresi data panel statis (*Least Squared)* maupun dengan panel dinamis (*Generalized Method of Moments)*, seperti tabel berikut ini:

Tabel 4 13 Rangkuman Hasil Uji dengan Model Fixed Effetct (LS) untuk Kabupaten dan Kota di Indonesia

Variabel	Kabupaten Kota Indonesia	Kbupaten P. Jawa	Kabupaten Luar P.Jawa	Kota P. Jawa	Kota Luar P. Jawa
	Coefficient	Coefficient	Coefficient	Coefficient	Coefficient
LOG(BPNT)	0.008932***	0.011521*	0.002920	-0.009369	0.002158
LOG(PKH)	-0.002513	0.013171**	0.001628	0.012915	-0.001349
LOG(PDRB)	-0.065426*	-0.468264***	-0.014728	-0.220907*	0.068103
LOG(RLS)	0.02543	0.010391	0.271845**	0.002453	0.056695
LOG(IPM)	-1.36727***	-3.32489***	-1.141185***	-4.453556***	-2.421752***
C	9.683215	23.42796	7.505569	25.11924	12.59922
R^2	0.991910	0.995666	0.983099	0.997579	0.997503
Adjusted R-squared	0.989866	0.994515	0.978806	0.996877	0.996827
F-statistic	485.4441	864.7313	229.0200	1420.730	1474.601
Prop (F-statistic)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Setelah diketahui hasil analisis seperti pada tabel 4.13 di atas, maka dapat diketahui setiap wilayah memiliki tingkat signifikansi yang berbeda-beda. Ada satu variabel yang konsisten berpengaruh negatif signifikan di semua wilayah yaitu variabel IPM. Sedangkan variabel lain tidak konsisten di semua wilayah. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau memiliki keragaman. Pembahasan mengenai perbedaan hasil di setiap wilayah akan dibahas pada uraian selnnjutnya.

Hasil uji menggunakan panel dinamis (GMM), hasilnya dirangkum dalam tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 4 14 Rangkuman Hasil Uji dengan Model Panel Fixed Effetct Dinamis (GMM) untuk Semua Wilayah

Variabel	Kabupaten Kota Indonesia	Kabupaten P. Jawa	Kabupaten Luar P.Jawa	Kota P. Jawa	Kota Luar P. Jawa
	Coefficient	Coefficient	Coefficient	Coefficient	Coefficient
LOG (BPNT)	0.003627	0.012508*	0.003030**	0.005599	-0.003708
LOG (BPNT(-1))	0.00654***	-0.001168	0.002233*	-0.015853	-0.022528*
LOG (PKH)	-0.008105***	0.025011**	-0.004012**	0.05984***	0.00154
LOG (PKH(-1))	0.000734	0.011823	0.002315	0.02452*	0.019603*
LOG (PDRB)	-0.062664***	-0.482004***	-0.043032***	-0.092899	0.02133
LOG (RLS)	0.065797	0.06696	0.015315	1.109062***	0.032547
LOG (RLS(-1))	0.000942	-0.008019	0.051952	-0.828184**	-0.074614
LOG (IPM)	-1.612083***	-3.486804***	-0.993214***	-6.818802***	-1.673668
LOG (PDDK_MSKN (-1))	0.144975***	0.3283***	0.086232***	0.560196***	0.523408***
C	10.13911	22.33240	7.264895	30.91586	8.535526
R^2	0.998390	0.996747	0.998075	0.998792	0.998464
Adjusted R-squared	0.997842	0.995517	0.997412	0.998246	0.997860

Keterangan tabel 4.13 dan tabel 4.14:

Tanda * = signifikan pada α (0,10)
Tanda ** = signifikan pada α (0,05)
Tanda *** = signifikan pada α (0,01)

Dengan menggunakan regresi data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* semua variabel tidak konsisten memiliki hasil yang sama di semua wilayah. Selanjutnya, secara gari besar berdasarkan tabel 4.13 dan tabel 4.14 diketahui bahwa variabel independent banyak yang berpengaruh terhadap variabel dependent, baik positif signifikan maupun negatif signifikan. Tabel 4.13 di atas, memperlihatkan bahwa BPNT berpengaruh positif signifikan pada Kabupaten/Kota

di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa dan Kabupaten luar pulau Jawa dan tidak signifikan pada Kota di dalam dan luar pulau Jawa.

Pada tabel 4.14, BPNT berpengaruh positif signifikan pada Kabupaten di dalam dan luar pulau Jawa, serta tidak signifikan pada Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kota di pulau jawa dan Kota di luar pulau Jawa. Setelah dilakukan uji regresi data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, diperoleh hasil BPNT berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kota luar pulau Jawa, dan positif signifikan di Kabupaten luar pulau Jawa, serta tidak signifikan di Kabupaten/Kota Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, dan Kota di pulau Jawa.

PKH berpengaruh positif signifikan pada Kabupaten pulau Jawa berdasarkan uji dengan regresi data panel statis *(Least Squared)*. PKH tidak signifikan pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota luar pulau Jawa. Pada tabel 14.14, PKH berpengaruh negative signifikan pada Kabupaten dan Kota di Indonesia, dan Kabupaten luar pulau Jawa. Sedangkan PKH berpengaruh positif signifikan pada Kota di luar pulau Jawa.

Tabel 14.13 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negative signifikan pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa dan Kota di pulau Jawa, serta tidak berpengaruh pada Kabupaten di luar pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa. Pada tabel 4.14PDRB berpengaruh negaif signifikan pada Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, dan Kabupaten di luar pulau Jawa. Sedangkan pada Kota baik di pulau Jawa maupun Kota di luar pulau Jawa, PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Uji regresi data panel statis menghasilkan RLS tidak berpengaruh di semua wilayah. Pada tabel 4.14, RLS berpengaruh positif signifikan pada Kota di pulau Jawa dan RLS tidak berpengareuh pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten di dalam dan di luar pulau Jawa, serta Kota di luar pulau Jawa. Uji GMM (t-1) RLS berpengaruh negatif signifikan di Kota pulau Jawa. Hal ini menunjukkan RLS negatif signifikan di Kota pulau Jawa setelah membutuhkan jeda waktu 1 tahun.

IPM berpengaruh negatif signifikan pada semua wilayah, baik dengan uji regresi data panel statis *(Least Squared)* dan regres data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, yang berarti bahwa variabel IPM memiliki peran besar menanggulangi kemiskinan. Uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, IPM pada Kota luar pulau Jawa tidak berpengaruh, namun memiliki hasil negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin tahun ini berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk tahun berikutnya pada semua wilayah, hal ini menunjukkan variabel jumlah penduduk miskin mempengaruhi dirinya sendiri secara signifikan. Dengan kata lain, penduduk miskin tahun sebelumnya mempengaruhi kemiskinan tahun berjalan secara positif. Penambahan *lag* pada variabel jumpah penduduk miskin berpengaruh secara signifikan.

Tingkat signifikansi pada tabel 14.13 dan tabel 14.14 menggunakan derajat α (0,01) dengan tanda (*) sebanyak 3 buah, α (0,05) dengan tanda (*) sebanyak 2 buah dan α (0,10) dengan tanda (*) sebanyak 1 buah. Setelah mengetahui rangkuman hasil analisis dari masing-masing variabel independent dengan menggunakan regresi data panel statis *(Least Squared)* seperti pada tabel 4.13 dan

regresi data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* seperti pada tabel 4.14, maka dapat diketahui damapk masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Hasil uji masing-masing variabel tersebut, jika dibuktikan dengan hiipotesis ternyata ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti. Untuk memudahkan membaca, maka penulis akan menyajikan rangkuman hasil uji hipotesis dari masing-masing variabel, seperti pada tabel 4.15 dan tabel 4.16 di bawah ini:

Tabel 4 15 Hasil Uji Signifikansi Data Panel Least Squares (LS)

Variabel	Hasil Signifikan					Tanda Koefisien					Kesesuaian dengan Hipotesis (Terbukti/Tidak Terbukti)				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
BPNT	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	+	+	+	-	+	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti
PKH	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	-	+	+	+	-	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti
PDRB	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	-	-	-	-	+	Terbukti	Terbukti	Tdk terbukti	Terbukti	Tdk terbukti
RLS	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	+	+	+	+	+	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti
IPM	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-	-	-	-	-	Terbukti	Terbukti	Terbukti	Terbukti	Terbukti

Tabel 4 16 Hasil Uji Signifikansi Data Panel Generalized Method of Moments (GMM)

Variabel	Hasil Signifikan					Tanda Koefisien					Kesesuaian dengan Hipotesis (Sesuai//Berlawan)				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
BPNT	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	+	+	+	+	-	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti
BPNT (-1)	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	+	-	+	-	-	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Terbukti
PKH	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	+	-	+	+	Terbukti	Tdk terbukti	Terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti
PKH (-1)	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	+	+	+	+	+	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti
PDRB	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	-	-	-	-	+	Terbukti	Terbukti	Terbukti	Berlawanan	Berlawanan
RLS	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	+	+	+	+	+	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti
RLS (-1)	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	+	-	+	-	-	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Tdk terbukti	Terbukti	Tdk terbukti
IPM	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	-	-	-	-	Terbukti	Terbukti	Terbukti	Terbukti	Berlawanan
LOG PDDK_MISKIN (-1)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	+	+	+	+	+	Terbukti	Terbukti	Terbukti	Terbukti	Terbukti

Keterangan :

+ = positif signifikan dan/atau positif tidak berpengaruh; - = negatif signifikan dan/atau negatif tidak berpengaruh

1= Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia; 2= Kabupaten di Pulau Jawa; 3= Kabupaten di Luar Pulau Jawa; 4= Kota di Pulau Jawa;

5= Kota di Luar Pulau Jawa

Berdasarkan tabel 4.15 dan 4.16 di atas, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

4.3.1 BPNT

Tabel 4.15 menunjukkan rangkuman hasil regresi data panel statis *(Least Squared)*. Hipotesis variabel BPNT terhadap jumlah penduduk miskin, menerima H_o dan menolak H_1. Artinya hipotesis ini tidak terbukti di semua wilayah baik secara nasional maupun pada Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. BPNT positif signifikan secara nasional dan Kabupaten di pulau Jawa. Perbedaan hasil analisis antar wilayah, karena sifat bantuan yang mungkin hanya bersifat sementara sehingga sekedar meringankan beban hidup masyarakat miskin yang bersifat untuk jangka pendek dan tidak berpotensi mengurangi jumlah orang miskin. Secara nasional dan di Kabupaten pulau Jawa, jika jumlah bantuan naik maka jumlah penduduk miskin/penerima bantuan naik, lantaran jumlah penerimanya naik. Begitu juga jika penduduk miskin naik, maka pemerintah akan menaikkan jumlah bantuan.

Sedangkan untuk Kabupaten luar Jawa, Kota pulau Jawa dan Kota luar Jawa menerima H_0 dan menolah H_1 artinya BPNT tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, karena sifat bantuan yang hanya memiliki dampak sementara meringankan beban hidup orang miskin, sehingga tidak mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Tabel 4.16 menunjukkan dampak kebijakan BPNT membutuhkan waktu waktu jeda 1 tahun. BPNT tahun sebelumnya memiliki dampak negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sehingga hipotesis untuk wilayah Kota di luar pulau Jawa menolak H_o dan menerima H_1, sehingga

hipotesis terbukti. Dampak positif terjadi secara nasional (Kabupaten dan Kota di Indonesia) dan pada Kabupaten luar Jawa, sehingga hipotesis tidak terbukti.

Perbedaan hasil pengujian antar wilayah ini seperti telah diuaraikan pada pembahasan tabel 4.15. Walaupun demikian bantuan BPNT di kota luar Jawa berpengaruh negatif signifikan, artinya semakin tinggi jumlah bantuan akan semakin menurunkan jumlah penduduk miskin tahun berikutnya. Sedang secara nasional dan di kabupaten luar Jawa bantuan BPNT akan mengikuti jumlah penduduk miskin. Kabupaten pulau Jawa dan Kota pulau Jawa, BPNT tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, sehingga di wilayah ini hipotesis H_o diterima dan H_1 ditolak. Perbedaan dampak dari variabel ini dikarenakan perbedaan wilayah tentunya terjadi perbedaan dampak karena kondisi, latar belakang dan kultur masing-masing masyarakat berbeda.

4.3.2 PKH

Uji regresi data panel statis *(Least Squared)* menghasilkan PKH berpengaruh positif signifikan pada Kabupaten di pulau Jawa. Sedangkan untuk wilayah lain PKH tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, sehinga hipotesis tidak terbukti. Hasil uji variabel PKH menggunakan metode data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* (tabel 4.16), berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin secara nasional dan negatif signifikan untuk kabupaten di luar pulau Jawa, sehingga hipotesis terbukti. Sedangkan untuk Kabupaten pulau Jawa, dan Kota pulau Jawa, PKH berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sehingga hipotesis tidak terbukt.

PKH tidak berpengaruh pada Kota di luar pulau Jawa, sehingga hipotesis tidak terbukti. Tambahan *lag* pada variabel PKH, BPNT, dan RLS pada regresi data panel dinamis (GMM) untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sesuai hipotesis, karena variabel-variabel ini bersifat dinamis, sehingga dimungkinkan variabel-variabel ini tidak langsung berpengaruh pada jumlah penduduk miskin pada tahun berjalan. Hal ini berdasar hasil uji dengan menggunakan regresi data panel statis mendapatkan hasil kurang baik, dimana hipotesis yang dirumuskan banyak yang tidak terbukti.

4.3.3 PDRB

Variabel PDRB berpengaruh negatif signifikan di wilayah Kabupaten dan Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa dan di wilayah Kota pulau Jawa, sehingga hipotesis terbukti. PDRB tidak berpengaruh di Kabupaten luar Jawa dan Kota luar pulau Jawa, sehingga hipotesis tidak terbukti. PDRB tidak berpengaruh pada Kabupaten luar pulau Jawa, Kota luar pulau Jawa dan Kota pulau jawa, disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut tidak dibarengi peningkatan pendapatan penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi hanya diikuti pendapatan penduduk menengah ke atas dan para pemilik kapital.

Begitu juga pembangunan di wilayah tersebut meningkatkan akses kelompok menengah dan kelompok pemilik kapital, sehingga terjadi peningkatan pendapatan yang tidak merata. Uji data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, PDRB berpengaruh negatif signifikan di wilayah Kabupaten dan Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa dan Kabupaten luar pulau Jawa, sehingga hipotesis terbukti. Sedangkan untuk wilayah Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa,

PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sehingga hipotesis tidak terbukti. PDRB tidak diuji dengan memasukkan *lag* karena variabel ini telah menghasilkan hasil yang baik sesuai harapan setelah dilakukan estimasi, artinya PDRB pada tahun berjalan telah berpengaruh pada jumlah penuduk miskin pada akhir tahun. Dengan demikian PDRB tidak diolah dengan menambahkan *lag* sudah dapat dilihat pengaruhnya terhadap kemiskinan tahun berjalan.

4.3.4 RLS

Variabel RLS berdasar tabel 4.15 berpengaruh positif signifikan di wilayah Kabupaten luar pulau Jawa. Sedangkan untuk wilayah lain tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, sehingga berlawanan dengan hipotesis. Dengan demikian H_1 ditolak. RLS merupakan suatu ukuran jenjang pendidikan masyarakat, sehingga untuk melihat jenjang pendidikan membutuhkan proses waktu yang lama dan membutuhkan biaya pendidikan. Semakin lama orang bersekolah, maka akan semakin tinggi beban biaya pendidikannya. Perbedaan hasil analisis kabupaten luar Jawa dan wilayan lain ini disebabkan proses pendidikan yang lama akan menambah beban hidup mereka. Sedangkan RLS tidak berpengaruh karena pendidikan merupakan proses yang tidak bisa dilihat langsung, akan membutuhkan jeda waktu sejak selesainya pendidikan.

Tabel 4.16 rangkuman hasil regresi data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, RLS berpengaruh positif signifikan di wilayah Kota di pulau Jawa, sehingga hipotesis H_1 tidak terbukti. Sedangkan dengan *lag time* RLS berpengaruh negatif signifikan di Kota pulau Jawa, sehingga H_1 diterima atau hipotesis terbukti. Sementara secara nasional, Kabupaten pulau Jawa, Kabupaten luar pulau Jawa, dan

Kota luar pulau Jawa menerima H_o dan meolak H_1.. Dengan demikian angka lama sekolah tidak langsung mempengaruhi jumlah jumlah penduduk miskin, melainkan butuh jeda waktu (*lag time*) 1 tahun. Dengan *lag time*, RLS tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin untuk wilayah Kabupaten dan Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, dan Kota di luar pulau Jawa, sehingga hipotesis tidak terbukti.

4.3.5 IPM

Variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di semua wilayah, sehingga hipotesis terbukti. Begitu juga dengan menggunakan metode data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, kecuali di Kota luar pulau Jawa. Dengan demikian pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Kota luar pulau Jawa, hipotesisnya tidak terbukti, sedangkan untuk wilayah lain hipotesisnya terbukti. Estimasi ini tidak menambahkan *lag* pada variabel IPM karena dengan olah data menggunakan regresi data panel statis telah dapat diketahui hasil estimasi yang baik, dimana IPM berpengaruh secara langsung terhadap jumlah penduduk miskin, tanpa harus menunggu jeda waktu 1 tahun.

4.3.6 Jumlah Penduduk Miskin (-1)

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, bahwa jumlah penduduk miskin (-1) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan, sehingga hipotesis terbukti. Dengan demikian jumlah penduduk miskin (-1) mempengaruhi secara positif terhadap kemiskinan tahun berjalan, artinya bahwa

jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya akan menentukan besarnya jumlah penduduk miskin tahun berikutnya.

Rangkuman hasil analisis seperti pada tabel 4.15 dan tabel 4.16, disajikan untuk mempermudah membaca tingkat signifikansi dari masing-masing variabel. Rangkuman di atas, belum bisa dibaca secara menyeluruh mengenai hasil analisis. Selanjutnya untuk mengetahuinya hasil analisis masing-masing variabel berdasarkan uji data panel statis *(Least Squared)* dan uji data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, berikut ini punulis akan menyajikan hasil uji untuk 5 wilayah analisis.

4.4 Hasil Analisis Pengaruh Variabel Independent terhadap Variabel Dependent pada Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia

Analisis ini menyajikan hasil regresi data panel *Least Squares - LS* dan *Generalized Method of Moment (GMM)* untuk semua variabel di wilayah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Variabel yang dianalisis terdiri dari data BPNT (dalam rupiah), PKH (dalam rupiah), PDRB (dalam juta rupiah) berdasar harga konstan 2010 atas lapangan usaha), RLS (lama tahun), IPM (indeks) dan kemiskinan (dalam ribu orang). Berdasar hasil uji panel statis *(Least Squared)* seperti dalam lampiran, terdapat dua variabel yang tidak signifikan terhdap jumlah penduduk miskin yaitu variabel PKH dan variabel RLS. Sedangkan variabel yang lain memiliki pengaruh signifikan pada α (0,01) dan α (0,10), yaitu variabel BPNT, PDRB dan IPM.

4.4.1 BPNT

Variabel BPNT dengan hasil uji panel *fixed effect* (*Least Squares - LS*), berpengaruh positif signifikan dengan probabilitas 0,0083, dimana 0,0083 lebih kecil dari nilai α (0,01) atau 0,0083 < 0,01. Koefisien variabel BPNT sebesar 0,008932, artinya jika jumlah bantuan BPNT bertambah sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,008932 persen. Uji menggunakan regresi panel *fixed effect (Generalized Method of Moment – GMM),* variabel BPNT tidak signifikan baik dengan α (0,01), α (0,05), maupun α (0,10), dimana nilai probabilitas lebih besar daripada nilai α yakni sebesar 0,1447.

Dampak variabel BPNT terhadap variabel jumlah penduduk miskin tahun berjalan dengan t-1, berpengaruh positif signifikan dengan probabilitas 0,0005, dimana 0,0005 < 0,01 dengan koefisien 0,00654, maka jika jumlah bantuan BPNT bertambah 1 persen, makan jumlah penduduk miskin juga bertambah sebesar 0,00654 persen. Setelah melihat ke dua hasil uji di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan bantuan BPNT kurang efektif secara nasional untuk penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini kurang efektif, karena semakin besar bantuan akan menambah kemiskinan dengan munculnya data penerima baru. Penerima baru memiliki potensi salah sasaran. Penerima baru ini biasanya masuk dalam kategori mampu, karena penerima lama merupakan semua orang miskin yang terdata pada saat itu.

4.4.2 PKH

Secara nasional variabel PKH tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Namun, dengan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments),*

variabel PKH berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sehingga hipotesis terbukti. Hasil uji variabel PKH menunjukkan probabilitas sebesar 0,0087, dimana 0,0087 < 0,01, dengan koefisien -0,008105. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila jumlah bantuan PKH ditambah naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin secara nasional akan turun sebesar 0,008105 persen. PKH tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dimana hasil uji menunjukkan probabilitas 0,7509. Nilai probabilitas ini lebih besar dari nilai α (0,10), atau 0,7509 > 0,10.

4.4.3 PDRB

Variabel PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. (tabel 14.13 dan 14.14). Hasil uji panel statis *(Least Squared)* diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0592, dimana 0,0592 < 0,10, dengan nilai koefisien menunjukkan sebesar -0,065426. Artinya jika PDRB Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,065426 persen. Secara nasional pemerintah menaikkan PDRB setiap tahun menjadi kebijakan sangat efektif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tabel 14.14, variabel PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil uji dengan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0007, dimana 0,0007 < 0,01, nilai koefisiennya sebesar -0.062664, yang berarti bahwa apabila PDRB naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,062664 persen.

4.4.4 RLS

Variabel RLS berdasarkan hasil uji regresi data panel statis *(Least Squared)*, tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, hasil uji seperti dalam lampiran. Probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.1276 lebih besar dari 0,10, dengan koefisien positif sebesar 0.025430. Begitu juga dampak rata-rata lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin (GMM) juga tidak signifikan (tabel 4.14). Nilai probabilitas 0.1143, dimana 0,1143 > 0,10. Dengan koefisien positif sebesar 0.065797.

Rata-rata lama sekolah juga tidak berdampak pada kemiskinan tahun berikutnya, setelah diketahui nilai probabilitas menunjukkan 0.9051, dimana 0,9051 > 0,10, dengan nilai koefisien positif sebesar 0.000942. RLS tidak berpengaruh secara nasional. Dengan demikian kebijakan pemerintah untuk mewajibkan masyarakat lebih lama menempuh jenjang pendidikan kurang efektif, karena semakin lama sekolah, semakin membebani biaya hidup untuk pengeluaran rumah tangga bidang pendidikan.

4.4.5 IPM

Variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin baik melalui uji regresi data panel statis *(Least Squared)* maupun uji regresi data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*. Berdasarkan uji panel statis *(Least Squared)*, variabel IPM negatif signifikan dengan probabilitas 0,0000, dimana 0,0000 < 0,01. Koefisien yang dihasilkan sebesar -1,36727, yang berarti jika IPM naik 1 persen, maka kemiskinan akan turun sebesar 1,36727 persen. Berdasarkan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, variabel IPM

memiliki probabilitas 0,0000, dimana 0,0000 < 0,01, sehingga variabel IPM signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan nilai koefisien menunjukkan sebesar -1,612083, yang berarti bahwa setiap kenaikan IPM sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 1,612083 persen. Hasil uji ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan IPM sangat efektif, sebagai kebijakan menurunkan jumlah penduduk miskin secara nasional.

4.4.6 Jumlah Penduduk Miskin (-1)

Kemiskinan tahun sebelumnya sangat berpengaruh positif terhadap kemiskinan tahun berjalan, hal ini ditunjukkan pada hasil uji GMM yang menghasilkan probabilitas sebesar 0,0000, dimana 0,0000 < 0,01, dengan nilai koefisien 0,144975. Hal ini mempunyai arti bahwa jika jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin pada tahun berjalan juga akan naik sebesar 0,144975 persen. Dengan demikian menurunkan jumlah penduduk miskin pada tahun berjalan harus disertai keberhasilan kebijakan penurunan kemiskinan tahun sebelumnya.

4.5 Hasil Analisis Pengaruh antara Variabel Independent terhadap Variabel Dependent pada Kabupaten di Pulau Jawa

Hasil uji analisis pada Kabupaten di pulau Jawa dapat dilihat pada lampiran. Ringkasan hasil uji seperti pada tabel 4.13 dan tabel 4.14. Uji dilakukan dengan 2 metode yaitu data panel statis *(Least Squared)* dan metode data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*.

4.5.1 BPNT

Variabel BPNT berdasarkan hasil uji seperti pada tabel 4.13 dan tabel 4.14 menunjukkan hasil yang sama, dimana variabel BPNT berpengaruh signifikan. Uji dengan panel statis *(Least Squared)* variabel BPNT berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0568, dimana 0,0568 < 0,10, dan hasil koefisien sebesar 0,011521. Dengan demikan, jika jumlah bantuan BPNT bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten pulau Jawa akan naik sebesar 0,011521 persen. Kebijakan pemerintah dengan program ini di Kabupaten pulau Jawa tidak efektif, karena penambahan jumlah bantuan dimungkinkan akan menambah data kemiskinan baru dengan bertambahnya paket bantuan.

Berdasar tabel 4.14 variabel BPNT berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, dengan nilai α (0,10), nilai probabilitas 0,0632, dimana 0,0632 < 0,10. Hasil koefisien melalui uji ini, sebesar 0,012506, yang berarti bahwa apabila jumlah bantuan BPNT bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah sebesar 0,012506 persen pada Kabupaten di pulau Jawa. Selanjutnya, bantuan BPNT tahun sebelumnya berpengaruh atau tidak terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan, maka berdasar hasil uji diperoleh probabilitas 0,8791, dimana 0,8791 lebih besar dari nilai α (0,10), maka BPNT tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan. Kebijakan ini kurang efektfi karena bantuan BPNT ini diharapkan berpengaruh negatif jumlah penduduk miskin.

4.5.2 PKH

Variabel PKH berdasarkan hasil uji panel statis *(Least Squared)* (tabel 4.13), menunjukkan positif signifikan dengan α (0,05), dimana nilai probabilitas sebesar 0,0453, sehingga 0,0453 < 0,05. Nilai koefisien variabel PKH sebesar 0,013171, yang berarti bahwa apabila jumlah bantuan PKH bertambah sebear 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,013171 persen. Begitu juga ketika dilakukan uji dengan menggunakan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, variabel PKH berpengaruh positif signifikan dengan α (0,05), dimana nilai probabilitas sebesar 0,0223. Nilai 0,0223 < 0,05, dengan nilai koefisien sebesar 0,025011. Hal ini berarti jika bantuan PKH ditambah/bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,025011 persen.

Sedangkan ketika dilihat bantuan PKH tahun sebelumnya berpengaruh atau tidak terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan, sesuai dengan hasil uji yang dilakukan diperoleh nilai probabilitas 0,1163, dimana 0,1163 > 0,10, sehingga variabel PKH tahun sebelumnya tidak signifikan. Dengan demikian kebijakan pemerintah melalui bantuan PKH tahun sebelumnya sama sekali tidak berdampak apa-apa terhadap penduduk miskin tahun berikutnya.

4.5.3 PDRB

Variabel PDRB berpengaruh negatif signifikan dengan nilai α (0,01), dimana dengan uji regresi data panel statis *(Least Squared)* diperoleh probabilitas sebesar 0,0000, dengan demikan 0,0000 < 0,01. Sedangkan nilai koefisien sebesar -0,468264, sehingga mengandung pengertian bahwa apabila PDRB naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,468264 persen. Hasil ini

memberi kesimupan bahwa kebijiakan pemerintah untuk menaikkan PDRB sangat efektif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di kabupaten pulau Jawa.Begitu juga setelah dilakukan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, variabel PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dengan menggunakan nilai α (0,01), dengan probabilitas sebesar 0,0002, maka probabilitas lebih kecil dari 0,01 atau 0,0002 < 0,01, dengan nilai koefisien sebesar -0,482004. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,482004 persen. Berdasarkan hasil uji di atas, maka kebijakan menaikkan PDRB sangat efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten pulau Jawa.

4.5.4 RLS

Variabel RLS berdasar uji panel statis *(Least Squared)* dan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten pulau Jawa. Nilai probabilitas dengan uji LS sebesar 0,1598 > 0,10, dan hasil uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* nilai probabilitas sebesar 0,5790 > 0,10. RLS tahun sebelumnya juga tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin berjalan, hal ini ditunjukkan pada hasil probabilitas uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* sebesar 0,2497 > 0,10. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan lama sekolah kurang efektif, mengingat semakin lama bersekolah, maka semakin tinggi beban belanja pendidikan penduduk miskin.

4.5.5 IPM

Variabel IPM baik melalui uji panel statis *(Least Squared)* maupun uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Uji panel statis *(Least Squared)* menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan probabilitas sebesar 0,0000, maka 0,0000 < 0,01, dengan koefisien sebesar -3,32489, yang berarti bahwa jika IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 3,32489 persen.

Sementara dengan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* nilai probabilitas diperoleh 0,0000 dengan α (0,01), maka 0,0000 < 0,01, dengan koefisien -3,486804. Hal ini berarti bahwa apabila IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 3,486804 persen. Hasil uji tersebut memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan IPM di setiap kabupaten sangat efektif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, khususnya untuk kabupaten di pulau Jawa.

4.5.6 Jumlah Penduduk Miskin (-1)

Variabel jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya setelah dilakukan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan. Variabel jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya memiliki probabilitas sebesar 0,0000, dimana 0,0000 < 0,01. Variabel jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya akan berpengaruh positif signifikan dengan koefisien sebesar 0,3283. Nilai tersebut memberikan arti bahwa

apabila kemiskinan pada tahun sebelumnya naik 1 persen, maka kemiskinan pada tahun berjalan akan naik sebesar 0,3283 persen.

4.6 Hasil Analisa antara Variabel Independent terhadap Variabel Dependent pada Kabupaten Luar Pulau Jawa

Uji variabel pada Kabupaten di luar pulau Jawa dilakukan sama dengan analisis sebelumnya. Variabel BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM dianalisis dengan menggunakan regresi data panel statis *(Least Squared)* dan regresi data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*. Penggunaan dua jenis alat uji ini diuraikan secara bergantian setiap model per variabel agar diperoleh gambaran tentang kebijakan publik yang efektif. Hasil analisis dengan metode panel statis *(Least Squared)* dan metode panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* disajikan dalam lampiran.

Hasil analisis dengan menggunakan regresi data panel statis *(Least Squared)* menujukkan ada dua variabel yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten luar pulau Jawa, yaitu variabel RLS dan variabel IPM, sedangkan variabel BPNT, PKH dan PDRB tidak signifikan pada kabupaten di luar pulau Jawa. Sedangkan hasil panel dinamis (GMM) menghasilkan 5 variabel berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan satu variabel, yaitu variabel RLS tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

4.6.1 BPNT

Uji panel statis *(Least Squared)* BPNT tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai probabilitas sebesar 0,3478, sehingga 0,3478 > 0,10.

Dengan uji panel dinamis (GMM), variabel BPNT berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dimana nilai probabilitas sebesar 0,0348, maka 0,0348 < 0,05, dengan koefisien sebesar 0,003030, yang berarti bahwa jika bantuan BPNT bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah sebesar 0,003030 persen. BPNT tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada tahun berjalan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji dengan nilai probabilitas 0,0686, dengan nilai α (0,10), maka 0,0686 < 0,10. Nilai koefisien sebesar 0,002233, yang berarti bahwa jika BPNT pada tahun sebelumnya bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin tahun berjalan bertambah sebesar 0,002233 persen. Artinya dampak BPNT terhadap jumlah penduduk miskin tidak langusng berpengaruh, tetapi membutuhkan waktu jeda 1 tahun. Kebijakan bantuan sosial untuk Kabupaten di luar pulau Jawa kurang efektif, dengan bertambahnya bantuan justru bisa mendorong kenaikan jumlah penerima bantuan.

4.6.2 PKH

Variabel PKH berdasar uji panel statis *(Least Squared)* tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk Kabupaten di luar pulau Jawa. Hal ini dbuktikan dengan hasil uji memperoleh probabilitas 0,6750, yang berarti bahwa 0,6750 > 0,10. Sedangkan berdasarkan hasil uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, variabel PKH berpengaruh negatif signifikan dengan probabilitas 0,0417, dimana 0,0417 < 0,05. Nilai koefisien sebesar -0,004012, yang berarti bahwa jika PKH naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,004012 persen.

PKH tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan, ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0,1672, dimana 0,1672 > 0,10. Beerdasarkan uji data dinami, kebijakan bantuan PKH efektif menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten luar pulau Jawa, dimana setiap kenaikan tambahan PKH akan menurnkan jumlah penduduk miskin.

4.6.3 PDRB

Variabel PDRB seperti pada tabel 4.13, tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten luar pulau Jawa, dengan probabilitas sebesar 0,7263, artinya 0,7263 > 0,10. Namun, berdasarkan hasil uji panel dinamis (GMM), variabel PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dimana probabilitas sebesar 0,0098 dan koefisien -0,043032. Dengan demikian 0,0098 < 0,01 sehingga dapat diartikan setiap PDRB naik sebesar 1 persen, maka kemiskinan turun sebesar 0,043032 persen. Kebijakan ini sangat efektif, dimana untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dengan kebijakan yang mendorong kenaikan PDRB.

4.6.4 RLS

RLS berpengaruh positif signifikan, dengan probabilitas 0,0252. Dengan nilai α (0,05), maka 0,0252 < 0,05, dengan koefisien sebesar 0,271845. Dengan demikian jika RLS naik 1 persen, maka kemiskinan akan naik sebesar 0,271845 persen. Sedangkan berdasar hasil uji panel dinamis, RLS tidak signifikan dengan probabilitas 0,7537, dimana 0,7537 > 0,10. Begitu juga RLS tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan dengan jumlah penduduk miskin tahun berjalan, yang dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,2671, sehingga 0,2671 > 0,10.

Berdasaarkan hasil uji tersebut kebijakan RLS kurang efektif menurunkan kemiskinan, karena proses waktu sekolah yang lama membebani belanja pendidikan rumah tangga miskin, sehingga kebijakan yang efektif ditempuh dengan memberikan biaya pendidikan gratis sampai usia SMA.

4.6.5 IPM

Variabel IPM dalam uji panel statis *(Least Squared)* maupun uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* berpengaruh signifikan. Dalam uji panel statis *(Least Squared)* (tabel 4.13), variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dimana probabilitas sebesar 0,0024, dengan nilai α (0,01), maka 0,0024 < 0,01. Koefisien variabel IPM sebesar -1.141185, artinya jika IPM naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 1,141185 persen.

Sedangkan berdasar uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, variabel IPM berpengaruh negatif signifikan, memiliki probabilitas sebesar 0,0000, maka 0,0000 < 0,01. Koefisien sebesar -0,993214, yang artinya jika IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,993214 persen di Kabupaten luar pulau Jawa. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan IPM setiap tahun sebagai kebijakan yang efektif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten luar pulau Jawa.

4.6.6 Jumlah Penduduk Miskin (-1)

Variabel jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya, berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan. Variabel jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan dengan nilai probabilitas

0,0000, dimana 0,0000 < 0,01, dengan nilai koefisien sebesar 0,086232. Dengan demikian jika jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya (t-1) naik sebesar 1 persen akan mempengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin tahun berjalan sebesar 0,086232 persen di Kabupaten luar pulau Jawa.

4.7 Pengaruh Analisis antara Independent terhadap Variabel Dependent pada Kota di Pulau Jawa

Hasil uji dengan data statis, dapat diketahui bahwa variabel PDRB dan variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan variabel BPNT, PKH, dan RLS tidak berpengaruh signifikan. Hasil uji dengan data dinamis, menunjukkan bahwa variabel PKH, RLS dan IPM serta variabel jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya (-1) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. sedangkan variabel BPNT dan PDRB tidak signifikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

4.7.1 BPNT

Variabel BPNT berdasar uji panel statis *(Least Squared)* dan uji panel dinami GMM tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil uji penel statis (LS) menghasilkan probabilitas sebesar 0,4404, dengan nilai α (0,10), maka 0,4404 lebih besar dari 0,10, sehingga tidak berpengaruh. Begitu juga dengan uji GMM dengan probabilitas sebesar 0,6286 lebih besar dari 0,10, sehingga tidak signifikan. Variabel BPNT tahun sebelumnya (t-1) juga tidak signifikan dengan probabilitas sebesar 0,2227 > 0,10. Berdasarkan hasil uji tersebut, maka kebijakan bantuan

BPNT kurang efektif di Kota pulau Jawa, karena tidak ada dampak program dalam implementasinya.

4.7.2 PKH

Variabel PKH setelah diuji dengan panel statis *(Least Squared)*, tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, dimana probabilitas 0,3188, maka 0,3188 > 0,10. Berdasarkan hasil uji dengan panel dinamis (GMM), variabel PKH berpengaruh positif signifikan dengan probabilitas sebesar 0,0025, sehingga 0,0025 < 0,01, dengan nilai koefisien 0,059840, yang berarti bahwa jika jumlah bantuan PKH bertambah sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,059840 persen di Kota pulau Jawa. PKH tahun sebelumnya (t-1) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan. Hal ini berdasarkan hasil probabilitas sebesar 0,0695 dengan nilai α (0,10), maka 0,0695 < 0,10, dengan nilai koefisien 0,024520, yang berarti bahwa jika PKH tidak berdampak langsung namun membutuhkan waktu jeda 1 tahun, sehingga jika PKH naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin tahun berikutnya akan naik sebesar 0,024520 persen.

4.7.3 PDRB

Variabel PDRB melalui uji panel statis *(Least Squared)* pada Kota di pulau Jawa, berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0952, jika nilai α (0,10), maka 0,0952 < 0,10, dengan nilai koefisien sebesar -0,220907, yang berarti bahwa jika PDRB naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,220907 persen di Kota pulau Jawa. Namun, berdasarkan uji panel dinamis *(Generalized*

Method of Moments), variabel PDRB tidak berpengaruh yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,4296, sehingga nilai α (0,10), maka 0,4296 > 0,10. Kebijakan yang efektif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin adalah dengan kebijakan yang mengarah pada kenaikan PDRB Kota di pulau Jawa.

4.7.4 RLS

Uji menggunakan regresi data panel statis *(Least Squared)*, variabel RLS tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai probabilitas pada uji ini sebesar 0,9955, dengan nilai α (0,10), maka 0,9955 > 0,10. Sedangkan berdasarkan hasil uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* nilai probabilitas RLS sebesar 0,0065, dengan nilai α (0,01), maka 0,0065 < 0,01. RLS berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin dengan nilai koefisien sebesar 1,109062, yang berarti bahwa jika RLS naik 1 persen, maka kemiskinan akan naik sebesar 1,109062 persen. RLS tahun sebelumnya (t-1) berpengaruh negarif signifikan dengan probabilitas 0,0324, dengan α (0,05), maka 0,0324 < 0,05. RLS t-1 berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan nilai koefisien sebesar -0,828164 yang berarti jika RLS tahun sebelumnya naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,82816 persern. Kebijakan RLS memiliki dampak penurunan jumlah penduduk miskin membutuhkan waktu jeda 1 tahun, sehingga RLS tidak berdampak langsung terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya proses belajar tidak berdampak langsung terhadap jumlah penduduk miskin, namun hasil dari proses belajar (setelah lulus) memiliki dampak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

4.7.5 IPM

Variabel IPM dengan uji panel statis *(Least Squared),* berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota pulau Jawa, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0007. Pada nilai α (0,01), maka 0,0007 < 0,01. IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan nilai koefisien -4,453556, yang berarti bahwa jika IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 4,453556 persen. Sedangkan berdasarkan hasil uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments),* variabel IPM berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000, dimana nilai α (0,01), sehingga 0,0000 < 0,01. IPM berpengaruh negatif signifikan dengan nilai koefisien sebesar -6,818802, yang berarti bahwa jika IPM naik sebear 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 6,818802 persen.

4.7.6 Jumlah Penduduk Miskin (-1)

Jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan (tabel 4.13), dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000, dengan nilai α (0,01), maka 0,0000 < 0,01. Jumlah penduduk miskin t-1 berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin dengan nilai koefisien sebesar 0,560196. Dengan demikian, jika jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 1 persen, akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan dengan kenaikan sebesar 0,560196 persen.

4.8 Hasil Analisa antara Variabel Independent terhadap Variabel Dependent pada Kota di Luar Pulau Indonesia

Hasil uji panel statis (LS) menunjukkan bahwa hanya satu variabel yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin yaitu variabel IPM. Sedangkan variabel lain: BPNT, PKH, PDRB dan RLS tidak berpengaruh terhadap variabel dependent. Variabel IPM dengan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa variabel yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin adalah variabel BPNT tahun sebelumnya, PKH tahun sebelumnya dan jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya. Variabel lain tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota luar pulau Jawa.

4.8.1 BPNT

Uji dengan menggunakan data panel statis *(Least Squared)*, variabel BPNT tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kota luar pulau Jawa. Hal ini ditunjukkan dengan probabilitas sebesar 0,8139, dengan nilai α (0,10), maka 0,8139 > 0,10. Begitu juga uji data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, variabel BPNT memiliki probabilitas sebesar 0,7215. Nilai α (0,10), maka 0,7215 lebih besar dari 0,10, sehingga BPNT tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. BPNT tahun sebelumnya memiliki pengaruh signifikan pada jumlah penduduk miskin tahun berjalan, dimana setelah dilakukan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, memiliki probabilitas 0,0504. Dengan nilai α (0,10), maka 0,0504 < 0,10. Dalam uji ini BPNT memiliki pengaruh negatif signifikan dengan koefisien sebear -0,022528, yang berarti bahwa variabel BPNT

tahun sebelumnya (t-1) mempengaruhi secara negatif signifikan terhadap jumlah kemiskinan tahun berikutnya, dimana jika bantuan BPNT ditambah 1 persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin dalam tahun berjalan sebesar 0,022528 persen di Kota luar pulau Jawa.

4.8.2 PKH

Uji data panel statis *(Least Squared)* menunukkan variabel PKH tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, dengan probabilitas sebesar 0,8839, dengan nilai α (0,10), maka 0,8839 > 0,10. Begitu juga dengan hasil panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, variabel PKH tidak berpengaruh, dimana hasil probabilitas 0,8948, sehingga 0,8948 > 0,10. PKH tahun sebelumnya (t-1) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, karena probabilitas 0,0869 < 0,10, dan koefisien 0,019603, dengan demikian jika bantuan PKH bertambah sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskian tahun berjalan akan bertambah sebesar 0,019603 persen. Berdasar hasil analisis, maka kebijakan bantuan PKH kurang efektif, karena tambahan PKH menyebabkan tambahan penerima, sehingga bisa terjadi salah sasaran dengan adanya tambahan penerima baru.

4.8.3 PDRB

Variabel PDRB dengan uji panel statis *(Least Squared)* dan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada Kota di luar pulau Jawa. Pada uji panel statis *(Least Squared)* diperoleh probabilitas sebesar 0,4990 (tabel 4.12), sehingga jika nilai α (0,10), maka 0,4990 > 0,10 serta probabilitas uji GMM 0,8709, sehingga 0,8709 > 0,10. PDRB

tidak berpengaruh, karena kenaikan PDRB Kota luar pulau Jawa tidak menyebabkan penambahan pendapatan dan perubahan hidup masyarakat miskin.

4.8.4 RLS

Variabel RLS dengan uji panel statis *(Least Squared)* dan uji panel dinamis (GMM) tidak berpengaruh signifikan. Uji data panel statis *(Least Squared)*, menghasilkan probabilitas sebesar 0,4478, dengan nilai α (0,10), maka 0,4478 > 0,10. Uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* diperoleh probabilitas sebesar 0,6216, dengan nilai α (0,10), maka 0,6216 > 0,10. RLS tahun sebelumnya juga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada Kota di luar pulau Jawa, dimana probabilitas sebesar 0,2660, dengan nilai α (0,10), maka 0,2660 > 0,10. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka kebijakan pemerintah untuk menganjurkan masyarakat sekolah pada jenjang yang lebih tinggi kurang efektif, karena biaya pendidikan menjadi beban pengeluruan keluarga miskin.

4.8.5 IPM

Variabel IPM berdasarkan hasil uji panel statis *(Least Squared)* berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan nilai α (0, 01), dengan probabilitas 0,0026, sehingga 0,0026 < 0,01. Variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan hasil koefisien -2,421752, yang berarti bahwa jika IPM naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,421752 persen. Sedangkan berdasar hasil uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, variabel IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dimana nilai α (0,10), sementara hasil probabilitas 0,1028, sehingga 0,1028 > 0,10.

4.8.6 Jumlah Penduduk Miskin (-1)

Variabel jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya (-1) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan, dengan probabilitas 0,0000 dengan nilai α (0,01), sehingga 0,0000 < 0,01. Jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan dengan koefisien sebesar 0,523408, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya berpengaruh positif pada jumlah penduduk miskin tahun berjalan. Meningkatnya jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya akan menaikkan jumlah penduduk miskin tahun berjalan.

4.9 Uji F

Uji F pada Kabupaten dan Kota di Indonesia, didapatkan nilai Prob. 0.0000 < 0.05 maka menolak Ho. Artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama antara BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota Indonesia. Uji F pada Kabupaten di pulau Jawa, didapatkan nilai Prob. 0.0000 < 0.05 maka menolak Ho. Artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama antara BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM terhadap kemiskinan di Kabupaten Pulau Jawa. Uji F pada Kabupaen di luar pulau Jawa, didapatkan nilai Prob. 0.0000 < 0.05 maka menolak Ho. Artinya terdapat pengaruh antara BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM terhadap kemiskinan di Kabupaten Luar Pulau Jawa.

Uji F pada Kabupaten di pulau Jawa, didapatkan nilai Prob. 0.0000 < 0.05 maka menolak Ho. Artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama antara BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM terhadap kemiskinan pada Kota di pulau Jawa. Uji F

pada Kabupaen di luar pulau Jawa, didapatkan nilai Prob. 0.0000 < 0.05 maka menolak Ho. Artinya terdapat pengaruh antara BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM terhadap kemiskinan di Kota luar Jawa.

4.10 R-square di Semua Wilayah

Hasil R-squared berdasarkan hasil uji seperti pada tabel 4.12 dan tabel 4.13, diuraikan berikut ini secara terpisah antara uji dengan model data panel statis *(Least Squared)* dan dengan model data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*. Hasil R^2 ini digunakan untuk melihat dan memprediksi seberapa besar pengaruh variabel independent (BPNT, PKH, PEDR, RLS dan IPM) terhadap variabel dependent.

4.10.1 Panel *Least Squares* (LS)

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji R-squared untuk wilayah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Didapatkan nilai R-square, sebesar 0.9919 artinya variabel dalam model mampu menjelaskan variabel penduduk miskin sebesar 99.19%. dan sisanya 0.17% dijelaskan variabel lain di luar model. Untuk wilayah Kabupaten di pulau Jawa nilai R-square 0,9956 artinya variabel dalam model mampu menjelaskan variabel penduduk miskin sebesar 99,56% dan sisanya 0,44 % dijelaskan variabel lain di luar model. Nilai R-square untuk wilayah Kabupaten di luar pulau Jawa sebesar 0,9830, artinya variabel dalam model mampu menjelaskan variabel penduduk miskin sebesar 98,30%, dan sisanya 1,7% dijelaskan variabel lain di luar model.

Selanjutnya, didapatkan nilai R-square pada Kota di pulau Jawa sebesar 0,9975, artinya variabel dalam model mampu menjelaskan variabel penduduk

miskin sebesar 99,75% dan sisanya 0,25% dijelaskan variabel lain di luar model. Nilai R-square untuk wilayah Kota di luar pulau Jawa sebesar 0,9975, artinya variabel dalam model mampu menjelaskan variabel penduduk miskin sebesar 99,75%, dan sisanya 0,25% dijelaskan variabel lain di luar model.

4.10.2 Panel *Generalized Method of Moments* (GMM)

Sedangkan hasil uji data panel dengan GMM, untuk wilayah Kabupaten dan Kota. didapatkan nilai R-square 0,9983, artinya sebesar 99,83% variabel dalam model mampu menjelaskan variabel penduduk miskin. Dengan demikian sisanya 0,17% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Nilai R-squared pada Kabupaten di pulau Jawa sebesar 0,9967, artinya sebesar 99,67% variabel dalam model mampu menjelaskan variabel penduduk miskin. Sedangkan sisanya sebesar 0,33% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Untuk wilayah Kabupaten di luar pulau Jawa, nilai R-squared sebesar 0,9980, artinya sebesar 99,80% variabel dalam model mampu menjelaskan variabel penduduk miskin. Sedangkan sisanya sebesar 0,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai R-squared untuk Kota di pulau Jawa, sebesar 0,9987, artinya sebesar 99,87% variabel dalam model mampu menjelaskan variabel penduduk miskin. Sedangkan sisanya sebesar 0,13% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai R-squared untuk Kota di luar pulau Jawa, sebesar 0,9984, artinya sebesar 99,84% variabel dalam model mampu menjelaskan variabel penduduk miskin. Sedangkan sisanya sebesar 0,16% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.11 Uji t

4.11.1 BPNT

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui bahwa variabel BPNT berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia serta di Kabupaten pulau Jawa. BPNT di dua wilayah ini berpengaruh positif signifikan, dengan nilai koefisien 0,008932, artinya bahwa jika jumlabah bantun BPNT bertambah sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,008932 persen. Sedangkan pada wilayah Kabupaten di pulau Jawa, nilai koefisien BPNT sebesar 0,01152, artinya jika jumlah bantuan BPNT naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,01152 persen. Untuk wilayah lainnya dalam model, BPNT tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Sedangkan berdasarkan hasil uji seperti pada tabel 4.13 (panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*), BPNT berpengaruh positif signifikan pada Kabupaten pulau Jawa dan Kabupaten luar pulau Jawa. Sedangkan di wilayah lain tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Pada wilayah Kabupaten di pulau Jawa koefisien 0,012508, artinya jika BPNT naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,012508 persen. Koefisien untuk Kabupaten di luar pulau Jawa, sebesar 0,003030 persen, artinya jika BPNT naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,003030 persen.

4.11.2 BPNT (-1)

Untuk melihat apakah kebijakan BPNT (-1) memiliki dampak terhadap jumlah penduduk miskin tahun berikutnya, maka berdasarkan tabel 4.13, BPNT

berpengaruh positif pada Kabupaten dan Kota di Indonesia dan Kabupaten di luar pulau Jawa. Koefisien BPNT pada Kabupaten dan Kota di Indonesia sebesar 0,00654, artinya setiap jumlah bantun naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,00654 persen. Hal ini berarti bahwa perubahan BPNT tidak langsung langsung mempengaruhi jumlah penduduk miskin, melainkan butuh jesa waktu (*lag time*) 1 tahun. Kenaikan BPNT tahun lalu sebesar 1 persen, akan menaikkan jumlah penduduk miskin tahun ini sebesar 0,00654 persen.

4.11.3 PKH

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa variabel PKH tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa. Jumlah bantuan PKH berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten pulau Jawa, dengan nilai koefisien 0,013171, artinya bahwa jika jumlah bantun BPNT bertambah sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,013171 persen.

Sedangkan berdasarkan hasil uji seperti pada tabel 4.13 (panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*), PKH berpengaruh negarif signifikan secara nasional yaitu pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. Selain itu PKH juga berpengaruh negatif signifikan pada Kabupaten di luar pulau Jawa. Nilai koefisien secara nasional sebesar -0,008105, artinya bahwa jika jumlah bantuan PKH bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,008105 persen. Sedangkan pada Kabupaten di luar pulau Jawa, niali koefisiennya -

0,004012, artinya jika jumlah bantuan PKH bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,004012 persen.

Sedangkan PKH berpengaruh posisitf signifikan pada Kabupaten di pulau Jawa dan Kota di pulau Jawa. Nilai koefisien pada Kabupaten di pulau Jawa sebesar 0,025011, artinya jika jumlah bantuan PKH bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten pulau Jawa akan bertambah sebesar 0,025011. Nilai koefisien pada Kota di pulau Jawa sebesar 0,05984, artinya jika jumlah bantuan PKH bertambah sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin di Kota pulau Jawa akan bertambah sebesar 0,05984 persen. Bantuan PKH tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kota luar pulau Jawa.

4.11.4 PKH (-1)

Sebagai data dinamis, PKH tahun sebelumnya (-1) justru berpengaruh positif signifikan khusunya pada wilayah Kota di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Nilai koefisien pada Kota di pulau Jawa sebesar 0,02452, artinya jika jumlah bantuan PKH tahun sebelumnya (-1) bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin di Kota pulau Jawa pada tahun berikutnya akan naik sebesar 0,02452 persen.

Untuk Kota di luar pulau Jawa nilai koefisien sebesar 0,019603, artinya jika jumlah bantuan PKH tahun sebelumnya bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin tahun berikutnya akan naik sebesar 0,019603 persen. PKH (-1) tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten dan Kota di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa dan Kabupaten di luar pulau Jawa.

4.11.5 PDRB

PDRB dengan uji data panel statis *(Least Squared)*, berpengaruh negatif signifikan pada Kabupaten dan Koa di Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa dan Kota di pulau Jawa. PDRB tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten di luar pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa. Nilai koefisien pada Kabupaten dan Kota di Indonesia sebesar -0,065425, artinya jika PDRB naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,065425 persen. Koefisien pada Kabupaten pulau Jawa sebesar 0,468254, artinya jika PDRB naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,468254 persen. Koefisien pada Kota di pulau Jawa sebesar 0,220907, artinya jika PDRB naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,220907 persen.

Sedangkan uji dengan model data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, PDRB berpengaruh negatif pada Kabupaten dan Kota di Indonesia, Kabpaten di pulau Jawa dan Kabupaten di luar pulau Jawa. Nilai koefisein pada Kabupaten dan Kota di Indonesia sebesar -0,062864, artinya jika PDRB naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,062864 persen. Koefisien pada Kabupaten di pulau Jawa sebesar -0,482004, artinya jika PDRB naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,482004 persen. Sedangkan koefisien pada Kabupaten di luar pulau Jawa sebesar -0,043032, artinya jika PDRB naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,043032 persen.

PDRB tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada Kota di pulau Jawa dan Kota di luar pulau Jawa. Hal ini disebabkan penduduk Kota dengan adanya keanikan PDRB tidak mempengaruhi pada pendapatan dan kenaikan PDRB hanya dinikmati orang-orang tertentu yang sudah memiliki modal, sehingga yang terjadi ketimpangan sosial yang tinggi.

4.11.6 RLS

Variabel RLS berpengaruh positif siginifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten di luar pulau Jawa. Sedangkan untuk wilayah lain, RLS tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai koefisien pada Kabupaten di luar pulau Jawa sebesar 0,271845, artinya jika RLS naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,271845 persen.

Sedangkan berdasarkan dengan model data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, RLS berpengaruh positif signifikan pada Kota di pulau Jawa, sedangkan untuk wilayah lain RLS tidak berpengaguh. Nilai koefisien pada Kota di pulau Jawa sebesar 1,109082, artinya jika RLS naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 1,109082 persen.

4.11.7 RLS (-1)

Dilihat dampak RLS pada tahun berikutnya, dengan uji data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, diperoleh hasil bahwa RLS tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada Kota di pulau Jawa. Nilai koefisien sebesar -0,828184, artinya bahwa perubahan RLS tidak langsung berpengaruh tetapi membutuhkan jeda waktu 1 tahun, setiap kenaikan RLS sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,828184

persen. Sedangkan untuk wilayah lain RLS tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

4.11.8 IPM

IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah kemiskinan untuk semua wilayah, berdasar uji data panel statis *(Least Squared)*. Uji dengan menggunakan data panel dinamis *(Generalized Method of Moments),* IPM tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin hanya di Kota luar pulau Jawa. Sedangkan untuk wilayah lain berpengaruh negatif signfikan.

Nilai koefisien untuk Kabupaten dan Kota di Indonesia sebesar -1,36727, artinya jika IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah kemiskinan akan turun sebesar 1,36727 persen. Koefisien untuk Kabupaten di pulau Jawa sebesar -3,32489, artinya jika IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah kemiskinan akan turun sebesar 3,32489 persen. Koefisien pada Kabupaten di luar pulau Jawa sebesar -1,141185, artinya jika IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 1,141185 persen. Koefisien pada Kota di pulau Jawa sebesar -4,453556, artinya jika IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 4,453556 persen.

Sedangkan berdasark uji data panel dinamis *(Generalized Method of Moments),* diperoleh hasil bahwa IPM psda Kabupaten dan Kota di Indonesia didapat koefisien sebesar -1,612083, artinya bahwa jika IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 1,612083 persen. Nilai koefisien yang didapat pada Kabupaten di pulau Jawa sebesar -3,486804, artinya jika IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 3,486804

persen. Koefisien pada Kabupaten di luar pulau Jawa sebesar -0,993214, artinya jika IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah kemiskinan akan turun sebesar 0,993214 persen. Sedang koefisien pada Kota di pulau Jawa sebesar -6,818802, artinya jika IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 6,818802 persen.

4.11.9 Jumlah Penduduk Miskin (-1)

Jumlah penduduk miskin (-1) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kemiskinan tahun berikutnya pada semua wilayah Indonesia. Koefisien jumlah penduduk miskin (-1) pada Kabupaten dan Kota di Indonesia sebesar 0,144975, artinya perubahan jumlah jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin tahun berikutnya membutuhkan jeda waktu 1 tahun, setiap kenaikan jumlah penduduk miskin 1 persen, maka akan menaikkan kemiskinan tahun berikutnya sebesar 0,144975 persen.

Koefisien pada Kabupaten di pulau Jawa sebesar 0,3283, artinya jika jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin tahun berikutnya akan naik sebesar 0,3283 persen. Koefisien jumlah penduduk miskin pada Kabupaten luar pulau Jawa sebesar 0,086232, artinya jika jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin tahun berikutnya naik sebesar 0,086232 persen.

Koefisien pada Kota di pulau Jawa sebesar 0,560196, artinya jika jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin tahun berikutnya akan naik sebesar 0,560196 persen. Koefisien jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya pada Kota di luar pulau Jawa sebesar 0,523408,

artinya jika jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin pada tahun berikutnya naik sebesar 0,523408 persen.

4.12 Pembahasan

Sub bab ini berusaha menjelaskan dari hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis di atas, pembahasan dilakukan berdasarkan hasil analisis dengan 5 (model) yang menggunakan regresi data panel *fixed effect.*

4.12.1 Pembahasan Variabel Independent terhadap Variabel Dependent Menurut Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

1. Pembahasan Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Jumlah penduduk miskin di Indonesia

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu bentuk kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indoensia. Sesuai dengan hasil olah data BPNT secara nasional, berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan probabilitas 0,0083 < 0,05, dengan kooefisien sebesar 0,008932. Dengan demikian jika jumlah bantuan BPNT bertambah 1 persen, maka akan menambah jumlah penerima BPNT sebesar 0,008932 persen. Hal ini disebabkan dengan bertambahnya paket bantuan, maka akan memunculkan data baru penerima BPNT, secara sistem akan menambah jumlah penduduk miskin. Kebijakan BPNT secara nasional kurang efektif, karena dengan penambahan penerima baru, sehingga dimungkinkan distribusi bantuan salah sasaran, dimana penerima baru bisa dimungkinkan rumah tangga yang mampu.

Begitu juga hasil analisis dengan menggunakan metode regresi panel *Generalized Method of Moments* (GMM), BPNT tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan probabilitas 0,1447 > 0,05. BPNT tidak memiliki berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, karena bantuan tersebut bersifat sementara yang tidak mempengaruhi perubahan pendapatan dan pengeluran rumah tangga miskin. Konsumsi rumah tangga miskin dimungkinkan tetap sama karena bantuan ini berupa beras dan telur sementara untuk konsumsi lauk pauk dan konsumsi lainnya tetap. Disisi lain pendaptan juga tetap, artinya bantuan BPNT tidak menambah pendapatan, karena sifat bantuan tidak mendorong produktivitas rumah tangga miskin.

Ketika dilihat pengaruh BPNT dengan lag BPNT (t-1), BPNT tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan dengan probabilitas 0,0005 < 0,01 dan koefisiennya sebesar 0,006540. Hasil uji ini sama dengan hasil uji LS, dimana penambahan bantuan menyebabkan terjadinya penambahan penerima baru. Dengan demikian jika bantuan BPNT t-1 naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin tahun berjalan akan naik sebesar 0,006540 persen. Dengan demikian kebijakan ini kurang efektif. Tidak efektifnya kebijakan, terletak pada penambahan baru penerima BPNT, bisa menyebabkan salah sasaran.

Dengan demikan semakin bertambah orang yang menerima bantuan sosial berupa BPNT, akan menaikkan kemiskinan. Munculnya penerima baru, disebabkan mereka yang menerima bantuan sekian tahun lamanya tidak melaporkan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga. Mereka tetap saja menerima bantuan, walaupun telah terjadi peningkatan ekonomi rumah tangga. Peran orang miskin seyogyanya

mengembalikan bantuan, jika yang bersangkutan telah merasa mampu. Fenomena yang terjadi adalah belum dimulainya penggantian data lama yang telah dianggap mampu, tetapi penambahan bantuan memunculkan penerima baru, dan penerima lama tetap. Dengan demikian pemerintah sangat perlu melakukan verifikasi dan evaluasi lapangan setahun sekali tentang implementasi bantuan agar dapat diketahui perubahan ekonomi rumah tangga miskin setelah sekian tahun menerima bantuan.

BPNT sebagai tindak lanjut dari program Raskin, menurut Rahayu, *et al* (2019), program ini kurang efektif dan kurang baik, karena masih dijumpai di lapangan penerima bantuan sudah dalam kategori mampu, tetapi masih menerimanya. Penelitian ini secara implisit menyimpulkan kebijakan bantuan BPNT kuran efektif. Agar terjadi efektivitas program, maka perubahan kondisi ekonomi rumah tangga miskin, dievaluasi dan dilaporkan untuk dilakukan perubahan data.

Alasan di atas mendorong anggapan bahwa bantuan sosial berupa BPNT kurang tepat sasaran. Hal ini, seperti diungkapkan oleh Diana dan Sepriana (2019) dalam penelitiannya bahwa efektifitas program bantuan sosial ditentukan oleh kesesuaian sasaran berdasarkan aturan atau kriteria yang telah disepakati dan obyeknya benar orang yang masuk dalam data sebagai orang miskin. Permasalahan pada penyaluran bantuan sosial adalah distribusi bantuan kepada masyarakat miskin yang belum merata, dan sasaran program yang belum efektif (Diana dan Seprina, 2019). Asumsi ini berangkat dari data awal kemiskinan, pada saat bantuan didistribusikan orang ini sudah mampu di bidang ekonomi rumah tangganya.

Selain itu bantuan pangan dalam program bantuan pangan non tunai adalah beras dan/atau telur (Pedoman Umum BPNT, 2019 : 20). Berdasarkan pedoman umum BPNT ini, bantuan pangan berbentuk beras dan/atau telur tidak mendorong kerja yang *sustainable* masyarakat miskin untuk bangkit, artinya bantuan sosial ini kurang mendorong masyarakat untuk menjadi produktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Fajriyah dan Rahayu (2016) dalam penelitian tentang kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, menyimpulkan bahwa penurunan kemiskinan yang efektif dengan menjadikan masyarakat menjadi produktif, karena akan menjadi angkatan kerja yang siap bekerja. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini angka melek huruf, tingkat partisipasi Angkatan kerja, penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan PDRB per kapita, dimana hasil merekomendasikan bahwa pentingya mencetak manusia yang memiliki produktivitas (Fajriyah dan Rahayu, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Risnandar dan Aditya Wisnu Broto (2018, 146-161) menyimpulkan bahwa secara umum program penyaluran BPNT melalui e-Warong sudah cukup progresif, efektif dan efsien serta sangat potensial dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan, namun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki seperti: pemantapan proses bisnis secara komprehensif, pendampingan program ecara intensif berkelanjutan, dan pembangunan jejaring kerja. Kesimpulan point ketiga penerima BPNT tidak memiliki jejaring kerja, sehingga hanya sebagai penerima bantuan. Penelitian ini hanya mengukur kepuasan penerima, tetapi belum mengaitkan antara bantuan sosial dengan penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan hasil beberapa kajian dan pedoman umum BPNT di atas, penelitian ini dalam analisisnya terdapat pengaruh positif signifikan dengan kemiskinan. Dengan demikian kebijakan bantuan sosial berupa BPNT kurang efektif dan efisien, maka perlu dikolaborasi dengan bantuan modal kerja, agar masyarakat miskin memiliki motivasi untuk melakukan kegiatan produktif. Hal ini merujuk pada pendapat peneliti sebelumnya bahwa kemiskinan dapat ditanggulangi melalui peningkatan sumber daya yang berdampak pada peningkatan produktivitas (Giovanni, 2018).

Fenomena sosial yang terjadi, pada saat awal pertama kali bantuan ini digulirkan menimbulkan kecemburuan bagi mereka yang tidak menerima, konflik horizontal terjadi. Kemudian pada gilirannya mengundang keinginan masyarakat untuk menjadi miskin agar mendapatkan bantuan.

2. Pembahasan Bantuan Program Keluarga Harapan terhadap Jumlah penduduk miskin di Indonesia

Bantuan Program Keluarga Harapan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Metode regresi data panel *Least Squares*, menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,5499 > 0,05, dengan koefisien -0.002513. Hal ini disebabkan bantuan PKH yang diberikan kepada penduduk miskin dimungkinkan untuk kebutuhan konsumtif, tidak sesuai peruntukan. Fenomena ini, dimungkinkan karena biaya kesehatan telah diakses BPJS, biaya pendidikan wajar 9 tahun gratis didukung dengan BOS dan program lain seperti KIP dan bantuan keluarga miskin. Kebutuhan gizi balita dan lansia telah diakses PMT (pemberian bantuan makanan) dari pemerintah. Akses posyandu yang

disediakan di masing-masing padukuhan diselenggarakan secara sukarela oleh kader kesehatan tanpa biaya.

Sedangkan menurut hasil olah data dengan menggunakan metode panel *Generalized Method of Moments*, PKH berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dimana probabilitas sebesar 0,0005, sehingga 0,0005 < 0,01. Analisis ini menghasilkan koefisien sebesar -0,008105, artinya bahwa jika bantuan PKH naik sebesar 1 persen, maka kemiskinan akan turun sebesar 0,008105 persen.

Analisis di atas, berarti bahwa semakin bertambah jumlah bantuan PKH di Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, akan menurunkan jumlah penduduk miskin secara nasional. Hal ini sesuai konsep PKH bahwa bantuan ini diperuntukkan pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan, gizi dan lansia. Melalui bantuan PKH para penerima bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, gizi (kebutuhan dasar) dan kesehatan lansia. Konsep ini memiliki dampak peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan yang baik dan pendidikan yang tinggi berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Begitu juga balita yang sehat dan cerdas serta lansia yang sehat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas melahirkan produktivitas, sehingga bisa mengakses pekerjaan untuk peningkatan pendapatan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadna dan Kartika (2017) menyimpulkan menyimpulkan bahwa PKH telah mampu meningkatkan angka partisipasi murni sebesar 7,1% dan angka partisipasi kasar siswa sekolah menengah pertama sebesar 7,6%. PKH secara signifikan meningkatkan kehadiran siswa di tingkat SD. PKH

memberikan hasil yang cukup signifikan dalam hal prestasi ujian sekolah (Hadna dan Kartika, 2017). Prestasi belajar siswa menunjukkan sumber daya yang berkualitas. PKH bisa mendorong orang miskin untuk sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nyata. Pembentukan sumber daya manusia melalui tingkat pendidikan yang akan berdampak pada peningkatan level produktivitas seseorang (Giovanni, 2018). Dengan menggunakan data panel dinamis, diketahui para penerima PKH memanfaatkan bantuan benar dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan konsep PKH yaitu kesehatan, pendidikan, gizi dan lansia. Secara nasional PKH mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi manusia yang memiliki produktivitas.

Pemerintah memiliki peran membentuk kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan modal manusia (*human capital*) dalam bentuk investasi layanan pendidikan. Pembentukan kualitas SDM harus bisa menciptakan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, agar memiliki produktivitas yang tinggi. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh seseorang, akan semakin luas pengetahuan dan memiliki keahlian yang menghasilkan produktivitas kerjanya (Paramita Sari dan Anwar, 2016)

Hasil uji data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, untuk melihat dampak PKH tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,7509, sehingga 0,7509 > 0,05. Artinya kebijakan PKH tidak memberikan dampak apapun terhadap jumlah penduduk

miskin tahun berikutny. Hipotesis yang menyatakan bahwa PKH tahun sebelumnya berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin tidak terbukti.

3. Pembahasan PDRB terhadap Jumlah penduduk miskin di Indonesia

PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, setelah diuji dengan menggunakan metode panel *Least Squares* (LS), dimana nilai probabilitas sebesar 0,0592. Dengan demikian 0,0592 < 0,10, Nilai koefisien PDRB sebesar -0,065426, artinya jika PDRB naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,065426 persen. Begitu juga dengan hasil uji dengan metode panel *Generalized Method of Moments*, menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hali ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0007, sehingga 0,0007 < 0,01, dengan koefisien sebesar -0,062664. Dengan demikian berarti bahwa jika PDRB naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,062664 persen.

Dampak kenaikan PDRB menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin ini, karena semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu Daerah akan semakin tinggi pula tingkat kemakmuran rakyatnya. Masyarakat bisa melakukan aktivitas ekonomi dengan baik. Produktivitas dan daya beli masyarakat semakin baik, dengan kenaikan PDRB. Hal ini sejalan dengan penelitan Paramita Sari dan Anwar (2016), yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan dengan data sekunder tahun 2004 – 2013. Penelitian ini menekankan pada peningkatan peran pemerintah dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Kenaikan PDRB sebagai salah satu indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian meningkatnya pertumbuhan ekonomi bisa berdampak pada pemerataan pendapatan seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan. Kenaikan PDRB tidak menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak kepada para pemilik kapital tertapi berdampak pula pada kelompok marginal. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kebijakan menaikan PDRB Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sangat efektif, karena dapat mengurangi jumlah penduduk miskin nasional.

Kuswantoro dan Dewi (2016) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa semakin tinggi PDRB suatu wilayah, maka akan semakin sejahtera masyarakat di suatu wilayah. Dengan demikian semakin tinggi PDRB semakin tinggi kesejahteraan masyarakat, sehingga jumlah penduduk miskin akan semakin berkurang. PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Kuswantoro dan Dewi, 2016).

4. Pembahasan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Jumlah penduduk miskin di Indonesia

RLS dengan analisis metode panel *Least Squares* (LS) tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini dibuktikan hasil probabilitas RLS sebesar 0,1276, sehingga 0,1276 lebih besar dari 0,05. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk melihat rata-rata pendidikan masyarakat yang ditempuh dalam

suatu daerah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah digunakan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. (Hadi, 2019).

Berdasar hal tersebut di atas, variabel RLS mungkin akan memiliki dampak tidak secara langsung karena membutuhkan waktu. Dengan demikian berbeda dengan variabel yang memiliki dampak secara langsung seperti PDRB. Namun, setelah diuji dengan metode panel *Generalized Method of Moments*, variabel RLS juga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dimana probabilitasnya sebesar 0,1143, sehingga 0,1143 > 0,10. Begitu juga ketika dilihat apakah RLS tahun sebelumnya (t-1) berpengaruh terhadap kemiskinan tahun berjalan, ternyata hasil probabilitas RLS (-1) sebesar 0,9051, sehingga 0,9051 > 0,10, maka RLS tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Pada penelitian ini variabel rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, karena dimungkinkan rata-rata lama sekolah yang tinggi belum tentu dapat memiliki output masyarakat memiliki produktifitas dan ketrampilan. Selain itu juga bisa disebabkan selepas sekolah mereka tidak langsung mendapatkan pekerjaan, atau juga dimungkinkan lama sekolah tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan keluarga karena faktor lain seperti dipengaruhi budaya masyarakat, yang tidak memiliki etos kerja yang baik. Begitu juga rata-rata lama sekolah yang rendah belum tentu juga memiliki produktifitas yang rendah.

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penghitungan

rata-rata lama sekolah ini, dengan tamat SD diperhitungkan 6 tahun, tamat SMP dihitung 9 tahun dan tamat SMA dihitung 12 tahun tanpa melihat apakah yang bersangkutan pernah tinggal kelas atau tidak memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak (https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator, diakses 1 September 2020).

Berdasarkan pengertian Rata-rata Lama Sekolah tersebut, semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan masyarakat. yang berusia 15 tahun ke atas. Dengan demikian data rata-rata lama sekolah hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang bersekolah atau sudah tamat sekolah. Penelitian ini menyimpulkan tidak ada pengaruh antara rata-rata lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin, dengan asumsi bahwa penghitungan data sekunder untuk rata-rata lama sekolah dihitung dari penduduk yang berusia 7 – 24 tahun, sehingga rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

5. Pembahasan IPM terhaap Jumlah penduduk miskin di Indonesia

Hasil analisis variabel IPM dengan menggunakan metode panel *Least Squares* (LS) mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Hasil ini menunjukkan IPM signifikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, dimana 0,0000 < 0,01. IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan kooefisien -1,367270, berarti setiap kenaikan IPM sebesar 1 persen secara nasional akan menurunkan jumlah penduduk miskin secara nasional sebesar 1,215238 persen.

Hasil yang sama juga, setelah dilakukan uji dengan metode panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang berarti 0,0000 < 0,01. Uji ini menghasilkan koefisien sebesar -1,612083, artinya bahwa jika IPM naik 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan di Indonesia sebesar 1,612083 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supriyanto, *et al* (2019) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berbengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, Indonesia (Surpriyanto, *el al,* 2019). Hasil penelitian Sayifulah dan Gandasari (2016), menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Menurunnya kemiskinan saat IPM meningkat merupakan indikasi bahwa peningkatan IPM merupakan indikasi tingginya kualitas sumber daya manusia yang akan berakibat pada meningkatnya produktivitas tenaga kerja penduduk yang akan meningkatkan perolehan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat akan menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Sayifulah dan Gandasari, 2016).

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan IPM untuk mempercepat penurunan kemiskinan, dengan melalui beberapa faktor. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai IPM di Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2007 hingga 2014 adalah banyaknya rumah tangga yang dapat mengakses air bersih, angka partisipasi

Sekolah Menengah Atas (SMA), angka melek huruf, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (Sutikno, *et al*, 2017).

IPM merupakan indikator capaian pembangunan manusia yang mengukur dari sisi kualitas sumber daya manusia, yang didasarkan pada dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Peningkatan IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kualitas manusia, sehingga berdampak pada kesejahteraan manusia. Semakin tinggi kesejahteraan masyarakat, maka akan semakin berkurang kemiskinan di Indonesia.

6. Pembahasan Variabel jumlah penduduk miskin (-1) terhadap Jumlah penduduk miskin di Indonesia

Variabel jumlah penduduk miskin (-1) setelah dilakukan uji dengan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, diperoleh hasil probabilitas 0,0000, sehingga 0,0000 < 0,01. Dengan demikian jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya akan berpengaruh pada kemiskinan tahun berjalan. Kemiskinan tahun berjalan sangat dipengaruhi oleh kemiskinan tahun sebelumnya. Tingkat pengaruh kemiskinan (-1) dengan jumlah penduduk miskin tahun berjalan sebesar nilai koefisien 0,144975. Artinya jika jumlah penduduk miskin (-1) naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin tahun berjalan naik sebesar 0,144975 persen. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin (-1) di akhir tahun penghitungan, akan menjadi dasar dalam penentuan penghitungan kemiskinan tahun berjalan. Apabila terjadi penurunan jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya, maka tahun berjalan akan menurun angka kemiskinannya.

4.12.2 Pambahasan Variabel Independent terhadap Variabel Dependent Menurut Kabupaten di Pulau Jawa

Analisis variabel independent terhadap variabel dependent untuk Kabupaten di pulau Jawa menggunakan data sekunder. Jumlah Kabupaten di Pulau Jawa sebanyak 85 Kabupaten yang tersebar di 6 (enam) provinsi yang ada di pulau Jawa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat sebanyak 395,03 ribu orang, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu provinsi DKI Jakarta sebanyak 2,93 ribu orang. Data dalam penelitian ini menggunakan jumlah orang bukan persentase penduduk.

1. **Pembahasan BPNT terhadap Jumlah penduduk miskin Kabupaten di Pulau Jawa**

BPNT berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten pulau Jawa. Analisis menggunakan metode panel statis *(Least Squared)* diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0568. Nilai 0,0568 < 0,10, dengan koefisien 0,011521. Artinya jika BPNT bertambah 1 persen, maka jumlah kemiskinan akan bertambah sebesar 0,011521 persen di Kabupaten pulau Jawa.

Begitu juga hasil uji dengan metode panel *Generalized Method of Moments*, variabel BPNT berpengaruh positif signifikan dengan nilai α (0,10), dimana probabilitas 0,0632 < 0,10, dengan koefisien 0,012508. Artinya jika BPNT bertambah/naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah sebesar 0,012508 persen. Bantuan BPNT tahun sebelumnya (BPNT -1), setelah diuji dengan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* tidak memiliki dampak

terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan. Hal ini dibuktikan nilai probabilitas sebesar 0,8791, dimana dengan nilai α (0,10), maka 0,8791 > 0,10.

BPNT berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, karena setiap terjadi penambahan bantuan BPNT akan menambah penerima BPNT di luar penerima lama, sehingga jumlah penerima BPNT akan bertambah. Penambahan bantuan BPNT mestinya tidak memunculkan penerima baru, tetapi diberikan kepada orang miskin yang berada dalam kategori kemiskinan absolut. Semakin ditambah bantuan BPNT, semakin memiliki potensi salah sasaran, karena penambahan data baru bisa dimungkinkan diterima oleh masyarakat dalam kategori mampu. Kegiatan evaluasi dan monitoring perlu dilakukan untuk mengetahui dengan baik kondisi perekonomian penerima lama dan kondisi perekonomian penerima baru. Hal ini untuk menghindari salah sasaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan BPNT kurang efektif, karena dimungkinkan salah sasaran dengan penambahan jumlah bantuan BPNT. Untuk itu perlu redesign yang pada akhirnya berdampak pada produktifitas penerima bantuan.

BPNT tidak berdampak pada jumlah penduduk miskin tahun berikutnya, disebabkan bantuan BPNT habis dimakan kurang dari sebulan, sehingga tidak berpengaruh pada pendapatan keluarga, sementara kebutuhan di luar pangan dalam bulan itu tetap, bahkan keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga lebih dari 4 orang akan menambah pengeluaran pangan. Dengan demikian kondisi kemiskinana tahun berikutnya tidak berubah. Bantuan ini kurang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk perlu perlu kebijakan yang mendorong peningkatan sumber daya manusia, misalnya bantuan BPNT diikuti dengan bantuan

modal kerja. Kesesuaian program dengan kebutuhan orang miskin menjadi ukuran efektivitas kebijakan, sehingga hasil analisis di atas menunjukkan bahwa kebijakan BPNT kurang efektif di Kabupaten pulau Jawa.

Bantuan BPNT berdasarkan pedoman umum BPNT, berupa beras 10 kg, telur ½ kg, kedelai ½ kg, dan sayuran (tidak bisa untuk jangka panjang). Barang-barang tersebut didapatkan dengan cara menggesek kartu pada e-warung yang ditunjuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPNT kurang efektif untuk penanggulangan kemiskinan, karena tidak ada kesesuaian program dengan kebutuhan sasaran. Kebijakan bantuan sosial seperti BPNT perlu didampingi modal usah dan modal kerja serta ketrampilan, dengan pendampingan yang intensif.

BPNT sebagai tindak lanjut dari program Raskin menurut Rahayu, *et al* (2019), ini kurang efektifi. Program ini kurang baik, karena masih dijumpai di lapangan penerima bantuan sudah dalam kategori mampu, tetapi masih menerimanya. Fenomena ini membawa pada kesimpulan bahwa ternyata penerima BPNT ada beberapa yang tidak tepat sasaran karena rumah tangga dalam klasifikasi mampu masih menerima.

2. Pembahasan PKH terhadap Jumlah penduduk miskin Kabupaten di Pulau Jawa

PKH berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kemiskinan, berdasarkan hasil analisis dengan metode panel statis *(Least Squared)* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0453, dengan nilai α (0,10), maka 0,0453 < 0,10, koefisien sebesar 0,013171. Hal ini berarti jika bantuan PKH bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah sebesar 0,013171 persen untuk

Kabupaten di pulau Jawa. Begitu juga dengan hasil metode panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, PKH berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai probabilitas 0,0223 < 0,05, dengan koefisien sebesar 0,025011, artinya bahwa jika bantuan PKH naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 0,025011 persen di Kabupaten di pulau Jawa.

Hasil olah data tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Delgado, *et al*, (2018) tentang CCT di Brasil dan Amerika Latin, yang menyatakan bahwa bantuan sosial tunai dalam bentuk transfer tunai bersyarat (CCT) yang diaplikasikan dalam bentuk layanan kesehatan dan pendidikan dipandang kurang efektif, sehingga tidak perlu diperpanjang masa bantuan (Delgado, *et al*, 2018). PKH berdampak positif signifikan terhadap jumlah kemiskinan, disebabkan setiap penambahan paket bantuan PKH akan menambah jumlah penerima baru, sehingga penerima lama tetap. Dengan demikian program penanggulangan kemiskinan bisa dikatakan tidak berhasil, karena selalu menambah data dengan hadirnya tambahan bantuan. Dengan demikian kebijakan berupa bantuan PKH kurang efektif, karena kurang berhasil pada penurunan kemiskinan. Selain itu, penambahan penerima baru bisa dimungkinkan salah sasaran, sehingga kebijakan PKH kurang efektif.

Sedangkan bantuan PKH (-1) setelah dilakukan analisis, PKH tidak berpengaruh pada kemiskinan tahun berikutnya, dengan nilai probabilitas 0,1163. Jika nilai α (0,10), maka 0,1163 > 0,10. Hal ini dimungkinkan PKH tidak berdampak pada jumlah penduduk miskin dimungkinkan tujuan program tidak tercapai. Tujuan PKH diantaranya untuk memberikan akses kesehatan, pendidikan, gisi balita dan harapan hidup lansia. Tujuan ini tidak tercapai karena penerima PKH

telah mengakses kesehatan dengan BPJS, akses pendidikan dengan wajar 9 tahun gratis, KIP dan BOS, sedangkan pemenuhan gizi dengan program pemberian PMT, serta Prolanis suatu program pelayanan kesehatan melalui pendekatan proaktif bagi penderita penyakit kronis untuk para lansia.

Unsur-unsur PKH yang menjadi obyek pembiayaan bantuan, ini kurang memberi dampak terhadap kemiskinan. Pendidikan dan pengangguran tidak memiliki dampak terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi pulau Jawa (Giovanni, 2018). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tumpang tindih program pengentasan kemiskinan dapat menyebabkan kurang efektif program dan anggaran. Program pengentasan kemiskinan baik pusat maupun di daerah, telah melibatkan banyak instansi pemerintah serta swasta. Keterlibatan sedemikian banyak instansi telah mengakibatkan munculnya berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi. Berbagai program belum dapat menyelesaikan akar persoalan kemiskinan yang sebenarnya, sehingga memberikan kesan bahwa program penanggulangan kemiskinan lebih bersifat sebagai suatu bentuk penyikapan yang gagap dan tidak terencana (Probosiwi, 2016).

3. Pembahasan PDRB terhadap Jumlah penduduk miskin Kabupaten di Pulau Jawa

PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten pulau Jawa. Analisis dengan metode data panel statis *(Least Squared)* menghasilkan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai 0,0000 < 0,01, dengan nilai koefisien -0,468264. Dengan demikian jika PDRB naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten pulau Jawa akan turun sebesar 0,468264 persen.

Begitu juga dengan hasil uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, nilai probabilitas 0,0002, dimana 0,0002 < 0,01, koefisien -0,482004, artinya jika PDRB naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten pulau Jawa akan turun sebesar 0,482004 persen. Berdasarkan hasil uji ini, maka kenaikan PDRB mencerminkan kenaikan aktivitas ekonomi di suatu wilayah, sehingga menyebabkan kenaikan kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain kenaikan PDRB berdampak pada pengurangan kemiskinan. Sebagaimana telah diuraikan pada alasan pembahasan sebelumnya. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan PDRB sangat efektif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten pulau Jawa.

4. Pembahasan RLS terhadap Jumlah penduduk miskin Kabupaten di Pulau Jawa

Variabel RLS tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten pulau Jawa. Hasil dengan metode panel statis *(Least Squared)* diperoleh probabilitas sebesar 0,1598, maka 0,1598 > 0,10,. Uji dengan metode panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* probabilitas 0,1163, maka 0,1163 > 0,10. Kemudian diuji dengan metode panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, dengan melihat pengaruh RLS tahun sebelumnya (-1) terhadap kemiskinan tahun berikutnya, diperoleh hasil probabilitas 0,2497, dengan demikian 0,2497 > 0,10.

RLS tidak berdampak terhadap jumlah penduduk miskin disebabkan proses sekolah membutuhkan waktu lama, sehingga hasil dari RLS belum memberikan

dampak. Setelah lulus sekolah orang miskin tidak serta merta mendapatkan pekerjaan, melainkan membutuhkan waktu jeda agak lama. Hasil dari pendidikan juga belum bisa dipastikan akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki produktivitas tinggi.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan tingkat pendidikan seseorang. Kelompok pengangguran salah satunya dipengaruhi oleh tamatan sekolah *fresh graduated* dengan pendidikan SMA dan Universitas, yang tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Probosiwi, 2016). Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi belum bisa dipastkan segera mendapatkan pekerjaan, yang serta merta menurunkan kemiskinan. Begitu juga rata-rata lama sekolah rendah tidak serta merta menaikkan kemiskinan. Bisa terjadi orang yang memiliki pendidikan rendah namun orang ini sangat produktif, maka bisa mempengaruhi kemiskinan. Begitu juga orang yang berpendidikan menengah ke atas dengan rata-rata lama sekolah lebih panjang belum tentu produktif, sehingga kelompok pendidikan menengah ke atas lambat laun akan menyumbang kenaikan kemiskinan. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan RLS tidak efektif, karena program RLS belum tentu bisa menimbulkan dampak.

5. Pembahasan IPM terhadap Jumlah penduduk miskin Kabupaten di Pulau Jawa

Berdasarkan hasil uji dengan metode panel statis *(Least Squared)*, IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten pulau Jawa. Hasil probabilitas 0,0000 < 0,01, dengan koefisien -3,324890. Hal ini berarti jika IPM naik 1 persen, maka kemiskinan akan turun

sebesar 3,324890 persen pada Kabupaten di pulau Jawa. Begitu juga dengan hasil uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten pulau Jawa. Nilai probabiitas pada uji ini sebesar 0,0000, maka 0,0000 < 0,01. Koefisien sebesar -3,486804, maka berarti jika IPM naik 1 persen, aka jumlah penduduk miskin di Kabupaten pulau Jawa akan turun sebesar 3,486804 persen.

Berdasarkan hasil uji di atas, IPM memiliki peran penting dalam penurunan kemiskinan secara cepat. IPM merupakan data yang mengukur dari dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Semakin tinggi IPM menunjukkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dimensi pembentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. (https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html, diakses tanggal 1 September 2020).

IPM merupakian alat yang digunakan untuk melihat kinerja progam pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah, sehingga IPM menjadi indikator yang strategis (Susanti, 2013). Oleh karena itu kebijakan pemerintah efektif dalam penanggulangan kemiskinan perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Sriyana, 2018). Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah, kebijakan yang efektif di Daerah adalah dengan meningkatkan IPM.

Hasil penelitian Putra, *et al* (2015) bahwa PDRB tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, yang signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tertinggal adalah variabel jumlah pengangguran, IPM, dan share sektor jasa. Dengan demikian pengentasan kemiskinan agar ada peran semua

pihak baik pemerintah dan masyarakat miskin, dengan melakukan penyediaan lapangan kerja dan mendorong produktivitas masyarakat miskin.

6. Pembahasan Variabel jumlah penduduk miskin (-1) terhadap Variabel jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pulau Jawa

Variabel jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya (-1), setelah dilakukan uji dengan panel dinamis *(Generalized Method of Moments),* diperoleh hasil probabilitas 0,0000, sehingga 0,0000 < 0,01. Dengan demikian jumlah penduduk miskin tahun lalu, akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin tahun berikutnya. Tingkat pengaruh kemiskinan (-1) dengan jumlah penduduk miskin tahun berjalan sebesar nilai koefisien 0,328300. Artinya jika jumlah penduduk miskin (-1) naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin tahun berjalan naik sebesar 0,144975 persen. Dengan demikian, kemiskinan (-1) di akhir tahun penghitungan, akan menjadi dasar dalam penentuan penghitungan kemiskinan tahun berjalan. Apabila terjadi penurunan jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya, maka tahun berjalan akan menurun angka kemiskinannya.

4.12.3 Pembahasan Variabel Independent terhadap Variabel Dependent Menurut Kabupaten di Luar Pulau Jawa

Analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap dependent di Kabupaten di luar pulau Jawa, menggunakan dua metode yakni metode panel statis *(Least Squared)* dan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk Kabupaten di luar pulau Jawa. Jumlah Kabupaten yang ada di luar pulau Jawa sejumlah 331 kabupaten atau 79,5% dari

jumlah Kabupaten di Indonesia. Sedangkan 20,5 persennya berada di pulau Jawa. Jumlah Kabupaten yang ada di Indonesia sebanyak 416 Kabupaten.

1. Pembahasan BPNT terhadap Jumlah penduduk miskin Kabupaten di Luar Pulau Jawa

Berdasarkan hasil analisis dengan panel statis *(Least Squared)*, BPNT pada Kabupaten di luar pulau Jawa tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji, dimana nilai probabilitasnya 0,3478, sebab 0,3478 > 0,10. Sedangkan hasil uji dengan metode panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, BPNT berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten luar pulau Jawa. Hasil uji menunjukkan bahwa probabilitas 0,0348, sehingga 0,0348 < 0,05. Dengan nilai koefisien 0,003030, dengan demikian jika bantuan BPNT bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah 0,003030 persen di Kabupaten luar pulau Jawa.

Begitu juga pengaruh BPNT tidak secara langsung, namun membutuhkan waktu (*time lag)* jeda satu tahun, maka dengan uji BPNT (-1) berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dengan probabilitas 0,0686 dengan nilai α (0,10), sehingga 0,0686 < 0,10. Nilai koefisien 0,002233. Artinya jika dilihat dampak BPNT tahun lalu terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan, diperoleh prediksi jika bantuan BPNT tahun lalu bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin tahun ini akan naik 0,002233 persen di Kabupaten luar pulau Jawa.

Seperti telah diuraikan pada analisis sebelumnya bahwa BPNT merupakan bantuan sosial yang berbentuk bantuan berupa barang kebutuhan pokok yang habis pakai selama kurun waktu kurang dari satu bulan belum menampakkan penurunan,

sehingga apabila ada tambahan bantuan BPNT akan memunculkan data penerima baru, sedangkan penerima lama tetap. Hal ini dimungkinkan masyarakat enggan melaporkan dan mengembalikan bantuan, walaupun dirinya telah mampu.

Bentuk bantuan BPNT berupa beras, telur, kedelai, dan sayuran. Bantuan berupa barangay ini hanya membantu yang bersifat sementara dan tidak berpengaruh pada produktivitas seseorang yang bisa mendatangkan pendapatan keluarga secara tetap. Apalagi bantuan ini tidak mencukupi untuk kebutuhan pangan dalam satu bulan untuk satu keluarga miskin. Konsep kemiskinan selalu berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Apabila tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang tersebut dikatakan miskin Untuk itu kemiskinan bisa diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan dengan tangkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum (Rika S, *et al*, 2012).

Besarnya garis kemiskinan berbeda-beda di setiap Kabupaten/Kota dan provinsi di Indonesia (BPS, https://www.bps.go.id.garis-kemiskinan-non-makanan-menurut-provinsi, diakses tanggal 11 September 2020). Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (BPS, 2020).

Masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Oleh karena itu bantuan sosial BPNT tidak bisa menaikkan pendapatan tetapi hanya mengurangi pengeluaran makanan

sementara, sedang pengeluaran non makanan tidak bisa diakses bantuan ini. Dengan demikian bantuan kemiskinan harus dibarengi dengan pembentukan manusia produktif untuk mendapatkan pendapatan.

BPNT merupakan program lanjutan dari beras miskin (raskin). Penelitian tentang hal ini, dilakukan oleh Rahayu, *et al* (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas program raskin (ketepatan aturan) dinilai masuk dalam kategori kurang baik. Lingkaran kemiskinan tetap ada, karena program raskin tidak efektif, diantaranya tidak tepat sasarn karena ada rumah tangga dikategorikan mampu masih menerima raskin (Rahayu, Waimbo, Kabiay, 2019).

Penelitian Rachman (2018) menyatakan bahwa pelaksanaan Rastra dan BPNT perlu dilakukan perbaikan dalam hal sasaran, waktu penerimaan bantuan, kualitas beras, dan kesiapan e-warong di semua wilayah. Karena BPNT sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, Rastra dan BPNT dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan wilayah surplus dan deficit (Rachman, 2018). Penelitian sejalan dengan hasil analisis dalam penelitian ini yang menyatakan semakin bertambah bantuan BPNT akan menaikan jumlah penduduk miskin, karena munculnya data baru sebagai penerima bantuan.

2. Pembahasan PKH terhadap Jumlah penduduk miskin Kabupaten di Luar Pulau Jawa

Hasil uji panel statis *(Least Squared)* variabel PKH terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten di luar pulau Jawa, menunjukkan bahwa PKH tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dengan probabilitas sebesar 0,6750, artinya 0,6740 > 0,10. Sedangkan berdasarkan uji panel dinamis *(Generalized*

Method of Moments), variabel PKH berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Berdasar hasil uji diperoleh probabilitas 0,0417, dimana 0,0417 < 0,05. Sedangkan nilai koefisien -0,004012, artinya jika bantuan PKH bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun 0,004012 persen di Kabupaten luar pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa PKH sebagai data dinamis yang selalu bergerak yang tidak statis. Sedangkan bantuan PKH tahun lalu (-1), tidak berdampak pada jumlah penduduk miskin tahun berjalan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil probabilitas 0,1672, dimana 0,1672 > 0,10. Dengan demikian perubahan PKH dengan jeda waktu tidak berdampak pada kemiskinan.

Memperhatikan hasil uji PKH dengan model panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, dimana secara negatif berpengaruh terhadap kemiskinan, karena bantuan PKH dimanfaatkan sesuai tujuan program. Penerima (KPM) benar-benar memanfaatkan PKH sesuai tujuan program yaitu untuk meningkatkan akses kesehatan balita, pendidikan, dan kesehatan lansia. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Hadna, *et al* (2017) menunjukkan bahwa penerima bantuan PKH telah dapat meningkatkan partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten luar pulau Jawa. Kualitas manusia dapat meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan pendapatan. Hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan PKH di Kabupaten luar Jawa efektif untuk penurunan jumlah penduduk miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadna dan Kartika (2017) menyimpulkan PKH telah mampu meningkatkan angka partisipasi murni sebesar 7,1% dan angka partisipasi kasar siswa sekolah menengah pertama sebesar 7,6%. PKH secara

signifikan meningkatkan kehadiran siswa di tingkat SD. PKH memberikan hasil yang cukup signifikan dalam hal prestasi ujian sekolah.

Berdasarkan penelitian di atas, PKH bisa mendorong orang miskin untuk sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nyata. Pengentasan kemiskinan dapat di lihat dari pembentukan sumber daya manusia melalui tingkat pendidikan yang akan berdampak pada peningkatan tingkat produktivitas seseorang (Giovanni, 2018).

3. Pembahasan PDRB terhadap Jumlah penduduk miskin Kabupaten di Luar Pulau Jawa

Berdasarkan hasil analisis dengan metode panel statis *(Least Squared)*, menunjukkan bahwa PDRB pada Kabupaten di luar pulau Jawa tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, dengan probabilitas 0,7263. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dikatakan tidak berpengaruh. PDRB tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, karena kenaikan PDRB belum tentu menggambarkan kondisi perekonomian yang sebenarnya atau menggambarkan seluruh lapisan masyarakat, bisa terjadi kenaikan penghasilan yang berlipat-lipat kelompok kecil menengah ke atas, maka PDRB akan meningkat, namun kenyataan di lapangan banyak kelompok masyarakat menerima pendapatan yang jauh di bawah rata-rata. Dengan demikian kenaikan PDRB yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat secara utuh menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Sedangkan berdasar hasil uji dengan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk

miskin. Nilai probabilitas 0,0098, maka 0,0098 < 0,01. Koefisien yang dihasilkan -0,043032, artinya jika PDRB naik 1 persen, maka kemiskinan turun sebesar 0,043032 persen di Kabupaten luar pulau Jawa.

Dengan hasil tersebut, maka kenaikan PDRB sebagai indikator kemajuan pembangunan yang membawa kesejahteraan suatu Daerah, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga semakin berkurang orang miskin. PDRB tidak berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan sesuai dengan hasil penelitian Putra, *et al* (2015) menyatakan bahwa PDRB tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan (Putra, *et al,* 2015). Dengan demikian diperlukan peran dari semua tingkatan pemerintah dan masyarakat dalam hal pengentasan kemiskinan. Pemeran penting dalam hal penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat miskin itu sendiri.

4. Pembahasan RLS terhadap Jumlah penduduk miskin Kabupaten di Luar Pulau Jawa

Untuk mengetahui pengaruh RLS terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten di luar pulau Jawa, digunakan uji panel statis *(Least Squared)* dan panel dinamis *(Generalized Method of Moments).* Hasil uji panel statis *(Least Squared)* menunjukkan bahwa RLS berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten di luar pulau Jawa. Probabilitas yang dihasilkan 0,0252, dimana nilai α (0,05), maka 0,0252 < 0,05, dengan koefisien sebesar 0,271845. Hal ini berarti jika angka RLS naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,271845 persen. Hal ini dimungkinkan, karena kondisi rendahnya pendapatan masyarakat di suatu wilayah menyebabkan

pendidikan menjadi beban pengeluaran hidup yang berat. Jika semakin lama seseorang mengikuti pendidikan yang tinggi akan semakin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk sekolah, sehingga beban pengeluran semakin bertambah. Dengan demikina kebijakan ini kurang efektif, karena dampak yang ditimbulkan membenai keluarga miskin, sehingga kebijakan ini tidak sesuai dengan karakteristik sasaran.

Sedangkan berdasarkan hasil uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, variabel RLS tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan probabilitas 0,7537, dimana 0,7537 > 0,05. Sedangkan untuk melihat apakah RLS tahun sebelumnya memiliki pengaruh terhadap kemiskinan tahun berjalan, berdasar hasil uji menunjukkan bahwa RLS (-1) tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin tahun berjalan, dengan probabilitas 0,2671, dimana 0,2671 > 0,05. Hal ini dimungkinkan lama sekolah bagi orang miskin tidak akan mempengaruhi apapun. Sekolah dan tidak sekolah tidak akan merubah kondisi hidupnya. Bisa juga dimungkinkan seseorang dalam kondisi miskin tetap menyekolahkan anaknya sampai dengan wajar sembilan tahun, dimana program ini dibiayai pemerintah dengan hadirnya BOS dan bantuan-bantuan lain seperti bantuan khusus miskin dan sejenisnya, sehingga keluarga tidak terbebani biaya sekolah.

5. Pembahasan IPM terhadap Jumlah penduduk miskin Kabupaten di Luar Pulau Jawa

Berdasarkan hasil uji baik dengan panel statis *(Least Squared)* dan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, variabel IPM berpengaruh negatif

signifikan terhadap kemiskinan. Setelah dilakukan uji regresi data panel statis *(Least Squared)* diperoleh probabilitas sebesar 0,0024 yang berarti bahwa 0,0024 < 0,01. Koefisien sebesar -1,141185, yang berarti bahwa setiap IPM naik 1 persen, maka kemiskinan di Kabupaten luar pulau Jawa akan turun sebesar 1,141185 persen. Hasil analisis regresi data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, diperoleh probabilitas 0,0000, dimana 0,0000 < 0,01. Sedangkan nilai koefisien -0,993214, yang artinya bahwa jika IPM naik 1 persen, maka kemiskinan akan turun sebesar 0,993214 persen untuk Kabupaten di luar pulau Jawa.

Berdasarkan penelitian di atas, maka IPM memiliki peran strategis dalam mengukur kinerja pemerintah dalam hal menurunkan angka kemiskinan. Dengan demikian dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan memiliki peran baik dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Kesehatan sebagai modal seseorang untuk berproduktivitas dan mengahsilkan pendapatn, begitu juga dengan pendidikan seseorang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk menjadi tenaga terampil dengan produktivitas tinggi, untuk mendatangkan pendapatan keluarga.

Syaifullah (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif (Syifullah 2017). Artinya IPM memiliki kontribusi dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Untuk itu kebijakan pemerintah untuk menaikkan IPM menjadi alternatif di Kabupaten luar pulau Jawa dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

6. Pembahasan Variabel Jumlah Penduduk Miskin (-1) terhadap Variabel Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Luar Pulau Jawa

Variabel jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya (-1), setelah dilakukan uji dengan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, diperoleh hasil probabilitas 0,0000, sehingga 0,0000 < 0,01. Dengan demikian jumlah penduduk miskin tahun lalu, akan berpengaruh pada kemiskinan tahun ini. Kemiskinan tahun berjalan sangat dipengaruhi oleh kemiskinan tahun sebelumnya. Tingkat pengaruh kemiskinan (-1) dengan jumlah penduduk miskin tahun berjalan sebesar nilai koefisien 0,086232. Artinya jika jumlah penduduk miskin (-1) naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin tahun berjalan naik sebesar 0,086232 persen di Kabupaten luar pulau Jawa.

Dengan demikian, kemiskinan (-1) di akhir tahun penghitungan, akan menjadi dasar dalam penentuan penghitungan kemiskinan tahun berjalan. Apabila terjadi penurunan jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya, maka tahun berjalan akan menurun angka kemiskinannya.

4.12.4 Analisis Variabel Independent terhadap Variabel Dependent Menurut Kota di Pulau Jawa

Pada model ke 4 ini, akan dilakukan pembahasan mengenai dampak variabel independent terhadap variabel dependent pada Kota di pulau Jawa. Jumlah Kota yang ada di pulau Jawa sebanyak 34 Kota, yang tersebar pada 6 provinsi. Pembahasan akan dilakukan pada masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Variabel independent terdiri dari BPNT, PKH, PDRB, dan RLS serta variabel kontrol IPM.

1. Pembahasan BPNT terhadap Jumlah penduduk miskin Kota di Pulau Jawa

Hasil uji data panel statis *(Least Squared)* menunjukkan bahwa BPNT tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kota pulau Jawa. Uji ini menghasilkan probabilitas 0,4404, sehingga 0,4404 > 0,10. Sedangkan berdasar uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, diperoleh probabilitas sebesar 0,6286, karena 0,6286 > 0,10, maka BPNT dengan uji ini juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota pulau Jawa.

Bantuan sosial BPNT, seperti diuraikan dalam pembahasan sebelumnya berbentuk bahan makan yang bersifat sementara dan tidak mendorong masyarakat miskin untuk melakukan usaha yang produktif. Hal ini memungkinkan orang miskin untuk selalu bergantung kepada pemerintah. Dengan demikian bantuan yang berupa bahan makanan pokok yang habis kurang dari satu bulan, tidak mempengaruhi kemiskinan seseorang. Hal ini dimungkinkan sebagian besar penduduk miskin, untuk kebutuhan beras sudah terbiasa tersedia dalam rumah tangga, sehingga tidak tepat program. Selain itu kemungkinan mutu beras yang kurang sesuai selera masing-masing rumah tangga menyebabkan rumah tangga miskin membeli beras dengan kualitas yang lebih baik. Sebagaimana alasan yang diuraikan terdahulu bahwa beras bantuan, memiliki kualitas yang kurang baik.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kebijakan BPNT kurang efektif, karena kurang ada dampak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rachman, *et al* (2018) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Rastra dan BPNT dipandang perlu dilakukan perbaikan dari sisi sasaran penerima, waktu penerimaan bantuan, kualitas

beras, dan kesiapan e-warong di semua wilayah. Sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, Rastra dan BPNT dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan wilayah surplus dan defisit (Rachman, *et al*, 2018).

BPNT tahun sebelum berdampak pada jumlah penduduk miskin tahun berjalan, dengan probabilitas 0,0504, dimana 0,0504 < 0,10, dengan koefisien -0,022528. Jadi dengan melihat BPNT t-1, BPNT tidak langsung mempengaruhi secara langsung terhadap jumlah penduduk miskin, melainkan membutuhkan waktu jeda 1 tahun, sehingga jika BPNT tahun sebelumnya bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin tahun berikutnya akan turun sebesar 0,022528 persen di Kota luar pulau Jawa. Berdasarkan hal ini BPNT di kota luar pulau Jawa memiliki dampak tahun berikutnya. BPNT sebagai bantuan non tunai, telah dapat dijadikan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiwit, *el atl* (2020), yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan program BPNT telah menerapkan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi, dan telah berjalan cukup baik. Pelaksanaannya didampingi oleh pendamping BSP dan program BPNT dinilai telah tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Program BPNT telah diberikan kepada KPM Kota Batu sebanyak 5.649 KPM pada Tahun 2018 kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 3.992 KPM (Wiwit, *et al*, 2020).

2. Pembahasan PKH terhadap Jumlah penduduk miskin Kota di Pulau Jawa

PKH tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kota pulau Jwa. Dengan model panel statis *(Least Squared)*, menghasilkan probabilitas 0,3188,

karena 0,3188 > 0,05, Sedangkan dengan model panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, justru menghasilkan probabilitas 0,0025, yang berarti 0,0025 < 0,05, sehingga dengan model ini PKH berpengaruh positif signifikan terhadap kemsikinan, dengan koefisien 0,59840, yang berarti bahwa jika PKH bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah sebesar 0,59840 persen di Kota pulau Jawa. Begitu juga dengan uji PKH (-1) tahun sebelumnya berpengaruh posisit signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan koefisien 0,024520. Dengan demikian jika PKH bertambah 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah sebesar 0,02450 persen di Kota pulau Jawa.

Alasan yang dibangun sesuai hasil analisis, yang menyatakan semakin bertambah bantuan PKH akan meningkatkan jumlah penduduk miskin, karena dengan penambahan paket bantuan PKH akan memunculkan nama baru sebagai penerima PKH. Pertambahan bantuan PKH tidak mengurangi jumlah penerima, karena penerima lama tetap. Selain itu, pertambahan bantuan PKH tidak disertai dengan hasil evaluasi atas kinerja PKH setelah sekian tahun menanggulangi kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian tentang bantuan sosial tunai dalam bentuk transfer tunai bersyarat (CCT) yang dilaksanakan di Brasil dan Amerika Latin, yang diaplikasikan dalam bentuk layanan kesehatan dan pendidikan dipandang kurang efektif, sehingga tidak perlu diperpanjang masa bantuan (Delgado, *et al*, 2018). Model bantuan PKH sama dengan CCT dimana penerima program harus memenuhi syarat memiliki balita, anak sekolah, lansia dan disabilitas. Bentuk bantuan dengan cara transfer tunai.

Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dan Susantyo (2017) merumuskan temuan bahwa dalam rangka percepatan kemiskinan melalui program PKH perlu dilakukan re-design program dengan inovasi secara fundamental. Inovasi ini difokuskan pada 2 hal, *pertama;* merespon upaya yang sudah dilakukan tetapi belum optimal; dan *kedua;* melakukan reorientasi program secara mendasar agar PKH sebagai pintu masuk menuju integrasi program perlindungan sosial sekaligus integrasi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus memperkuat keberfungsian keluarga miskin secara utuh. Upaya ini diharapkan akan "memaksa" anggota keluarga berperilaku produktif, bukan kontraproduktif (Nainggolan dan Susantyo, 2017).

Salah satu unsur yang dibiayai PKH adalah pendidikan, sedang pendidikan tidak mempengaruhi kemiskinan (Giovanni, 2017). Sementara disisi lain, pembiayaan pendidikan PKH hanya diperuntukkan untuk anak SD, SMP dan SMA. Jenjang pendidikan ini juga tidak memberikan jaminan ketika lulus sekolah memiliki tenaga trampil dengan produktivitas tinggi, sehingga mereka bisa saja menjadi beban keluarga.

Balita yang tercukupi kebutuhan gizi tidak serta merta bisa merubah keluarga menjadi tidak miskin, begitu juga lansia dan disabilitas setelah menerima bantuan, maka pendapatan bertambah bisa saja terjadi konsumsi juga meningkat. Dengan demikian bantuan PKH justru menimbulkan kontraproduktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadna dan Kartika (2017) menyimpulkan bahwa dalam evaluasi PKH telah mampu meningkatkan angka partisipasi murni sebesar 7,1% dan angka partisipasi kasar siswa sekolah menengah pertama sebesar

7,6%. PKH secara signifikan meningkatkan kehadiran siswa di tingkat SD. PKH memberikan hasil yang cukup signifikan dalam hal prestasi ujian sekolah. Dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi dimungkinkan semakin menambah beban pengeluran transportasi dan uang saku anak yang pada gilirannya menjadi beban orang tua.

Sesuai dengan hasil analisis di atas, maka kebijakan bantuan PKH dipandang kurang efektif. Letak tidak efektifnya bantuan ini pada ukuran efektivitas, dimana bantuan ini tidak ada dampak. Selain itu, tujuan program dari kebijakan belum bisa menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota pulau Jawa. Oleh karena itu perlu evaluasi mendalam untuk mendapatkan solusi percepatan penanggulangan kemiskinan yang efektif.

3. Pembahasan PDRB terhadap Jumlah penduduk miskin Kota di Pulau Jawa

PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota pulau Jawa. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data panel statis *(Least Squared)*, probabilitas 0,0952, dengan nilai α (0,10), maka 0,0952 < 0,10, koefisien sebesar -0,220907. Dengan demikian jika PDRB naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin di Kota pulau Jawa turun sebesar 0,220907 persen. Sedangkan berdasar uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, probabilitas sebesar 0,4296, sehingga 0,4296 > 0,10, dengan demikian dengan uji ini, PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

PDRB memilik pengaruh negatif signifikan terhdap jumlah penduduk miskin, karena kenaikan PDRB mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah, dimana

terjadi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kemakmuran dan kesejahteraan Daerah, akan mencerminkan semakin tinggi kesejahteraan masyarakatnya. Kenaikan PDRB sebagai indikator kenaikan penghasilan masyarakat dalam suatu daerah. Oleh karena itu semakin tinggi angka PDRB, maka akan semakin makmur Daerah dan rakyatnya. Berdasarkan hal ini, maka kenaikan PDRB menjadi kebijakan yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan di suatu Daerah.

4. Pembahasan RLS terhadap Jumlah penduduk miskin Kota di Pulau Jawa

Berdasarkan analisis data dengan panel statis *(Least Squared)*, didapatkan probabilitas sebesar 0,9955. Dimana 0,9955 > 0,05, sehingga RLS tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di pulau Jawa. Sedangkan dengan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, diperoleh probabilitas 0,0065 < 0,05, sehingga RLS berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien 1,109062, artinya bahwa jika angka RLS naik 1 persen, maka kemiskinan naik sebesar 1,109065. Hal ini karena semakin tinggi pendidikan seseorang semakin membani rumah tangga miskin.

Sementara jika dilihat angka RLS tahun sebelumnya terhadap kemiskinan tahun berikutnya dengan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, diperoleh hasil probabilitas 0,0324, sehingga 0,0325 < 0,05, maka RLS tahun sebelumnya berpengaruh terhadap kemiskinan tahun berjalan. RLS tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan dengan koefisien -0,828184, yang berarti bahwa perubahan RLS tidak langsung mempengaruhi jumlah orang miskin,

melainkan butuh jeda waktu (*time* lag) satu tahun. Kenaikan RLS tahun ini sebesar 1 persen, mampu menurunkan jumlah orang miskin tahun ini sebesar 0,828184 persen.

Hasil penelitian Hadi (2019) terdapat hubungan negatif signifikan antara rata-rata lama sekolah dengan presentase penduduk miskin di Jawa Timur 2017, dimana rata-rata lama sekolah merupakan variabel yang dapat mempengaruhi jumlah prosentase penduduk miskin di suatu wilayah. Hubungannya negatif yang sangat kuat ini menjelaskan bahwa semakin tinggi angka RLS maka semakin rendah persentase penduduk miskinnya. Namun, untuk meningkatkan capaian rata-rata lama sekolah ini membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga perlu dicari faktor-faktor lain yang dapat mempercepat penurunan presentase penduduk miskin.

Berdasarkan hasil analisis dengan melihat dampak RLS pada tahun berikutnya, RLS di Kota pulau Jawa efektif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini dimungkinkan setelahs selesai sekolah, masyarakat di Kota pulau Jawa langsung bisa mengakses pekerjaan. Hal ini bisa terjadi karena kota-kota di pulau Jawa telah tersedia luas lapangan pekerjaan, akibat pertumbuhan ekonomi yang sudah merata di seluruh pulau Jawa.

5. Pembahasan IPM terhadap Jumlah penduduk miskin Kota di Pulau Jawa

Berdasarkan hasil uji panel statis *(Least Squared)* dan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota seluruh pulau Jawa. Uji data panel statis *(Least Squared)* menunjukkan probabilitas 0,0007, dimana 0,0007 < 0,05. Nilai koefisien

sebesar -4,453556, yang artinya bahwa jika terjadi kenaikan IPM sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin turun sebesar 4,453556 persen di Kota pulau Jawa. Uji data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, menunjukkan probabilitas 0,0000, dengan nilai α (0,05), maka 0,0000 < 0,05, koefisien sebesar -6,818802, yang artinya apabila IPM naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin turun sebesar 6,818802 persen di Kota pulau Jawa.

IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, karena IPM merupakan tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, sehingga semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka semakin berkurang orang miskin. Hasil analisis di atas, sesuai dengan hasil penelitian Syaifullah (2017) yang mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif (Syifullah 2017). Hal ini menunjukkan bahwa IPM sebagai bentuk kebijakan pemerintah Daerah yang efektif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota pulau Jawa.

6. Pembahasan Variabel Jumlah Penduduk Miskin (-1) terhadap Variabel Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pulau Jawa

Variabel jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya (-1), setelah dilakukan uji dengan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, diperoleh hasil probabilitas 0,0000, sehingga 0,0000 < 0,01. Dengan demikian jumlah penduduk miskin tahun lalu, akan berpengaruh pada kemiskinan tahun ini. Kemiskinan tahun berjalan sangat dipengaruhi oleh kemiskinan tahun sebelumnya. Tingkat pengaruh jumlah penduduk miskin (-1) dengan jumlah penduduk miskin tahun berjalan sebesar nilai koefisien 0,560196. Artinya jika jumlah penduduk miskin (-1) naik 1

persen, maka jumlah penduduk miskin tahun berjalan naik sebesar 0,560196 persen di Kabupaten luar pulau Jawa.

Dengan demikian, jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya (-1) di akhir tahun penghitungan, akan menjadi dasar dalam penentuan penghitungan kemiskinan tahun berjalan. Apabila terjadi penurunan jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya, maka tahun berjalan akan menurun angka kemiskinannya.

4.12.5 Pembahasan Variabel Independent terhadap Variabel Dependent Menurut Kota di Luar Pulau Jawa

Pembahasan hasil analisis ini, akan menguraikan menganai pengaruh variabel independent terhadap jumlah penduduk miskin pada Kota di luar pulau Jawa. Jumlah Kota di luar pulau Jawa sebanyak 64 Kota yang tersebut di seluruh pulau di luar Jawa. Pembahasan dilakukan seperti pembahasan sebelumnya dengan menguraikan setiap variabel independent.

1. **Pembahasan BPNT terhadap Jumlah penduduk miskin Kota di Luar Pulau Jawa**

Uji dengan menggunakan metode data panel statis *(Least Squared)*, BPNT tidak tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kota luar pulau Jawa. Hasil uji menunjukkan probabilitas 0,8139, dimana 0,8139 > 0,05. Begitu juga dengan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, BPNT tidk berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dengan probabilitas 0,7215, maka 0,7215 > 0,05. Hasil uji ini menunjukkan bahwa BPNT di Kota luar pulau Jawa, tidak berpengaruh langsung terhadap jumlah penduduk miskin dalam tahun berjalan.

BPNT membutuhkan waktu jeda 1 (*time lag*) tahun untuk dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kota luar pulau Jawa, yang dibuktikan dengan dengan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, diperoleh probabilitas 0,0504, dengan nilai α (0,10), maka 0,0504 < 0,10, koefisien -0,022528. Dengan demikian diketahui bahwa perubahan BPNT tidak langsung mempengaruhi jumlah penduduk miskin, melainkan butuh jeda waktu 1 tahun. Kenaikan BPNT tahaun lalu sebesar 1 persen, mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,022528 persen.

Hal ini sesuai dengan penelitian Sulistyaningsih dan Kamil (2020) menyimpulkan bahwa hasil penelitiaannya menyatakan bahwa BPNT efektif menurunkan jumlah orang miskin di Kota Batu karena BPNT tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan dimana pada tahun 2018 penerima BPNT sebanyak 5.649 KPM, turun pada tahun 2019 sebanyak 3.992 KPM. Faktor yang menghambat adalah SDM dan waktu (Sulistyaningsih dan Kamil, 2020).

2. Pembahasan PKH terhadap Jumlah penduduk miskin Kota di Luar Pulau Jawa

Berdasar uji panel statis *(Least Squared)*, PKH di Kota luar pulau Jawa tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Setelah dilakukan analisis diperoleh probabilitas 0,8839, dimana 0,8839 > 0,10. Sedangkan uji metode panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, dengan nilai α (0,10), maka dengan probabilitas 0,8948, maka 0,8948 > 0,10. Hasil uji dengan menggunakan jeda waktu (*time lag*), dengan model panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*,

diperoleh probabilitas sebesar 0,0869, dengan nilai α (0,10), maka 0,0869 < 0,10, dengan koerfisien 0,019603, yang berarti bahwa PKH tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tahun berikutnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan PKH tidak langsung mempengaruhi jumlah orang miskin, melainkan membutuhkan jeda waktu 1 tahun, sehingga kenaikan BPNT tahun lalu sebesar 1 persen akan menaikkan jumlah penduduk miskin tahun ini sebesar 0,019603 persen di Kota luar pulau Jawa.

PKH tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kota luar pulau Jawa, karena bantuan transfer tunai PKH yang diterima sasaran bisa dimanfaatkan untuk konsumsi lain. Argumen ini didasarkan pada kenyataan di lapangan bahwa untuk kegiatan pendidikan telah diakses oleh BOS, KIP dan BKM, sedang untuk akses posyandu seluruh warga sasaran gratis pelayanan posyandu. Begitu juga untuk pemenuhan gizi keluarga telah diakses dengan program PMT. Selain itu akses kesehatan telah difaislitasi oleh BPJS.

PKH memiliki pengaruh posistif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dikarenakan penambahan jumlah bantuan, akan menambah anggota baru penerima PKH, sehingga terjadi penambahan baru jumlah penduduk miskin. Bantuan tambahan PKH akan diterima sasaran baru, sedang penerima lama tetap. Dengan demikian fenomena seperti ini bisa menyebabkan PKH salah sasaran. Berkaitan dengan hal ini, maka kebijakan pemerintah berbentuk PKH kurang efektif, perlu dilakukan peninjauan kembali melalui evaluasi.

3. Pembahasan PDRB terhadap Jumlah penduduk miskin pada Kota di Luar Pulau Jawa

PDRB tidk berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kota luar pulau Jawa. Uji dengan menggunakan metode panel statis *(Least Squared)*, dibuktikan dengan probabilitas 0,4990. Nilai 0,4990 > 0,05. Begitu juga dengan uji menggunakan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, PDRB tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kota luar pulau Jawa, dengan probabilitas 0,8709, sehingga 0,8709 > 0,05. Alasan PDRB tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Pada dasarnya kenaikan PDRB belum tentu tidak terjadi ketimpangan penghasilan. Potret kenaikan PDRB bisa saja dipengaruhi kenaikan penghasilan kelompok kapital atau kelompok tertentu, sedangkan kelompok miskin mendapatkan penghasilan jauh menyedihkan. Ketimpangan bisa saja terjadi, walaupun kenaikan PDRB di suatu Daerah mengalami kenaikan pesat.

4. Pembahasan RLS terhadap Jumlah penduduk miskin papda Kota di Luar Pulau Jawa

Variabel RLS setelah dilakukan uji dengan menggunakan panel statis *(Least Squared)*, tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang memperoleh probabilitas sebesar 0,4478, maka 0,4478 > 0,05. Begitu juga dengan hasil analisis dengan metode panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, diperoleh hasil probabilitas sebesar 0,6216, dimana 0,6216 > 0,05. Hasil uji dengan melihat dampak RLS tahun sebelumnya terhadap jumlah penduduk miskin tahun berikutnya, RLS juga tidak berpengaruh terhadap jumlah

penduduk miskin, dimana hasil probabilitas sebesar 0,2660, sehingga 0,2660 > 0,05.

Hal tersebut dikarenakan angka lama sekolah tidak bisa memberikan kontribusi pendapatan kepada keluarga, dan setelah lulus belum bisa mengakses pekerjaan yang mendatangkan pendapatan di atas rata-rata garis kemiskinan. Selain itu orang miskin yang bersekolah dengan orang miskin yang tidak bersekolah tidak memberikan dampak apapun terhadap kemiskinannya. Kemiskinan di Kota luar pulau Jawa, tidak dipengaruhi oleh kondisi pendidikan anggota keluarga.

5. Pembahasan IPM terhadap Jumlah penduduk miskin Kota di Luar Pulau Jawa

Hasil analisis dengan menggunakan metode panel statis *(Least Squared)*, IPM pada Kota di luar pulau Jawa memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini ditunjukkan oleh probabilitas sebesar 0,0026. Dengan demikian 0,0026 < 0,05. Hasil koefisien yang dihasilkan sebesar -2,421752, yang berarti bahwa jika IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 2,421752 persen pada Kota di luar pulau Jawa.

Argumentasi kenaikan IPM berdampak negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sebagaimana telah diuraikan pada analisis-analisis sebelumnya. Sedangkan berdasarkan hasil uji dengan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan probabilitas sebesar 0,1028, dimana 0,1028 > 0,05. IPM tidak signifikan pada Kota di luar pulau Jawa, karena kenaikan IPM di kota luar pulau Jawa masih rendah di bawah angka nasional. Sedangkan kriteria kemiskinan ditetapkan secara

nasional. Kategorisasi orang sebagai kelompok miskin atau tidak menggunakan standar kemiskinan yang ditetapkan secara nasional.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kahar (2018) yang menyatakan bahwa IPM khususnya di wilayah Indonesia Timur pada tiga tahun terakhir terus meningkat namun angkanya selalu berada di bawah angka nasional. Salah satu dimensi yang masih rendah pencapaiannya adalah dimensi pendidikan. HLS merupakan salah satu indikator pada dimensi pendidikan yang masih rendah pencapaiannya (Kahar, 2018). Selalin itu, tingkat kesejahteraan masyarakat belum tentu diikuti tingkat kemakmuran. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi masyarakat dalam keadaan aman, tenteram dan nyaman, sedang kemakmuran selalu berkaitan dengan pendapatan dan konsumsi yang berada di atas garis kemiskinan. IPM diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan, angka harapan hidup dan standar hidup layak. Standar hidup di luar pulau Jawa dimungkinkan lebih rendah dibanding dengan standar hidup di pulau Jawa sebaliknya. Dimana standar hidup yang tinggi, akan menjadi beban bagi keluarga miskin.

IPM tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Efendi, *et al* (2019) menyatakan bahwa; *pertama*, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Indonesia; *kedua*, Kesehatan memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Indonesia; *ketiga*, Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Indonesia (Efendi, 2019).

6. Pembahasan Variabel Jumlah Penduduk Miskin (-1) terhadap Variabel Jumlah Penduduk Miskin

Variabel jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya (-1), setelah dilakukan uji dengan panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, diperoleh hasil probabilitas 0,0000, sehingga 0,0000 < 0,01. Dengan demikian jumlah penduduk miskin tahun lalu, akan berpengaruh pada jumlah penduduk miskin tahun ini. Kemiskinan tahun berjalan sangat dipengaruhi oleh kemiskinan tahun sebelumnya. Tingkat pengaruh jumlah penduduk miskin (-1) dengan jumlah penduduk miskin tahun berjalan sebesar nilai koefisien 0,523408. Artinya jika jumlah penduduk miskin (-1) naik 1 persen, maka jumlah penduduk miskin tahun berjalan akan naik sebesar 0,523408 persen di Kabupaten luar pulau Jawa.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka kesimpulan atau temuan dari penelitian ini adalah:

1. Kebijakan asimetris lebih tepat diterapkan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Kebijakan ini dengan menetapkan program yang berbeda antara Kabupaten/Kota yang satu dengan Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan permasalahan masing-masing. Keberagaman dengan keseragaman kebijakan terbukti belum menghasilkan hasil maksimal. Kebijakan ini tindakan *positive discrimination* untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. Keberagaman suku, bahasa, geografi, karakter, kultur dan latar belakang membutuhkan kebijakan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.

   Penerapan kebijakan asimetris dapat dilakukan:

   a. Resentralisasi seperti di Norwegia dan Swedia dengan melakukan pemindahan keuangan dan kewenangan penanganan kemiskinan didelegasikan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota (Minas, R, *et al*, 2016). Hal ini sangat tepat diterapkan di era reformasi desentralisasi seperti saat ini. Kebijakan ini diambil mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas, agar program yang diberikan sesuai dengan keinginan, kondisi dan penyebab kemiskinan di Kabupaten dan Kota..

b. *Affirmative*-Proporsional (diskriminasi positif), kebijakan sentral tetap, distribusi anggaran dan program yang bersifat khusus untuk kelompok marginal dengan keikutsertaan Kabupaten/Kota memiliki kesamaan wewenang menentukan standar kemiskinan, penyebab kemiskinan, penentuan kebijakan sesuai lokalitas daerah masing-masing. Standar kemiskinan ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Standar kemiskinan, penyebab kemiskinan, pengelompokan jenis kemiskinan dan penetapan kebijakan program ditetapkan masing-masing Kabupaten/Kota. Semakin tinggi tingkat kemiskinan semakin besar anggaran dan semakin bervariasi program kemiskinan, begitu juga sebaliknya. Kebijakan proporsional merumuskan hal sama, dengan pengenaan tindakan yang berbeda pada wilayah yang berbeda. Perspektif kemiskinan berangkat dari Daerah, sehingga keberagaman tidak selamanya membutuhkan keseragaman kebijakan.

2. Variabel BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.
3. Bantuan sosial BPNT sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan, memiliki dampak yang berbeda-beda di Kabupaten dan Kota:
   a. Secara nasional BPNT berpengaruh positif signifikan, baik menggunakan metode data panel statis *(Least Squared)* dan data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*.

b. BPNT di Kabupaten pulau Jawa berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, baik menggunakan metode data panel statis *(Least Squared)* dan data panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*.

c. BPNT di Kabupaten di luar pulau Jawa dengan panel statis *(Least Squared)* tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskinnya. Dengan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, BPNT berpengaruh positif signifikan pada kemiskinan, BPNT tahun sebelumnya berpengaruh positif pada jumlah penduduk miskin.

d. BPNT di Kota di pulau Jawa, tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

e. BPNT di Kota di luar pulau Jawa, tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Dampak BPNT (-1) di Kota luar pulau Jawa membutuhkan waktu jeda 1 tahun, sehingga penambahan BPNT tahun sebelumnya akan menurunkan kemiskinan tahun berikutnya.

4. PKH sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan memiliki beberapa dampak di beberapa wilayah :

a. PKH cecara nasional, tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia (LS). dengan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, PKH berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan PKH tahun sebelumnya tidak berpengaruh pada jumlah penduduk miskin tahun berikutnya.

b. PKH di Kabupaten pulau Jawa, berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (LS), dengan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, PKH berpengaruh posistif signifikan, Sedangkan PKH tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin tahun berikutnya.

c. PKH di Kabupaten luar pulau Jawa tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin (LS), dengan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, PKH berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, PKH tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin tahun berikutnya.

d. PKH di Kota pulau Jawa, tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (LS), dengan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, PKH berpengaruh posifitf signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. PKH tahun sebelumnya juga berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tahun berikutnya.

e. PKH di Kota luar pulau Jawa, tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. PKH tahun sebelumnya (-1) berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tahun berikutnya.

5. PDRB sebagai salah satu ukuran kinerja pemerintah Daerah dalam memotret kemajuan pembangunannya, berdampak pada kemiskinan yang berbeda-beda di beberapa wilayah:

   a. Secara nasional, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

b. PDRB di Kabupaten pulau Jawa, berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

c. PDRB di Kabupaten luar pulau Jawa, tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (LS), dengan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

d. PDRB di Kota pulau Jawa, berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (LS), dengan uji panel dinamis *(Generalized Method of Moments)*, PDRB tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

e. PDRB di Kota luar Jawa, tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

6. RLS memiliki beberapa dampak terhadap jumlah penduduk miskin pada beberapa wilayah:

a. Secara nasional, RLS tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

b. RLS di Kabupaten pulau Jawa, tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

c. RLS di Kabupaten luar pulau Jawa, berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

d. RLS di Kota pulau Jawa tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. RLS tahun sebelumnya (-1) berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

e. RLS di Kota di luar pulau Jawa tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang miskin.

7. IPM berpengaruh negatif signifikan secara nasional dan di semua wilayah Indonesia, kecuali diuji dengan metode panel dinamis *(Generalized Method of Moments)* IPM tidak berpengaruh di Kota luar Jawa.
8. Secara nasional dan di semua wilayah Indonesia, jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya (-1) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin tahun berikutnya untuk seluruh Indonesia, Kabupaten di pulau Jawa, Kabupaten di luar pulau Jawa, Kota di pulau Jawa, Kota di luar pulau Jawa.

5.2 Implikasi

Berdasarakn kesimpulan di atas, maka implikasi penelitian ini:

1. Kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah saatnya bersifat asiemtris, melalui kebijakan yang berbeda disesuaikan dengan kondisi dan penyebab kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota, agar sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat miskin yang tersebar di kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Sifat asimetris ini suatu kebijakan ditetapkan secaara berbeda antara kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten /kota lainnya, bisa ditempuh dengan redesentralisasi dan/atau afirmatif-proporsional.
2. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang efekfif, adalah meningkatkan peran pemerintah Pusat (pemerintah Republik Indonesia) dan pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kotamadya, melalui peningkatan PDRB dan IPM dengan melakukan intervensi peningkatan

penghasilan dan daya beli, serta peningkatan gratis layanan kesehatan, pendidikan, dan penghidupan layak agar usiah harapan hidup meningkat.

3. Peran masyarakat miskin agar memiliki tanggungjawab memanfaatkan bantuan sosial sesuai dengan tujuan kebijakan, bukan untuk konsumtif, serta rasa tanggungjawab untuk melaporkan jika telah mampu secara ekonomi.
4. Kebijakan program-program bantuan sosial perlu dilakukan redesign, yang mendorong *competitiveness*, yaitu bantuan sosial disertai modal kerja, modal usaha dan pengetahuan yang cukup untuk menjadi manusia yang terampil serta didampingi oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya.

5.3 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder, maka saran penulis adalah :

1. Program pengentasan kemiskinan menghasilkan penurunan kemiskinan yang lambat, disebabkan program penanggulangan kemiskinan menghasilkan outcome yang berbeda-beda di Kabupaten/Kota, maka perlu ditinjau ulang program-program yang sudah berjalan. Seperti halnya Brasil dan Amerika Latin memberikan bantuan transfer tunai (CCT) yang diarahkan untuk layanan kesehatan dan layanan pendidikan kurang efektif, sehingga tidak diperpanjang (Delgado, *et al*, 2018).
2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi, verifikasi dan validasi data kemiskinan. Agar data kemiskinan reliebel dan valid sehingga diketahui

dampak program penganggulangan kemiskinan tahun berikutnya, dan agar program tidak salah sasaran.

3. Penyeragaman program masih menyisakan ketimpangan, maka perlu telaah ulang kebijakan penanggulangan kemiskinan di setiap kabupaten/kota, mengingat wilayah Indonesia sarat dengan keragaman, dimungkinkan kategori dan jenis program akan beragam untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
4. Perlu pederhanaan data kemiskinan dengan satu data untuk semua, sehingga setiap instansi tidak memiliki data yang berbeda-beda yang memunculkan kebijakan program kemiskinan yang berbeda-beda tetapi memiliki obyek sama agar tidak terjadi tumpang tindih program yang diterima masyarakat miskin.
5. Berdasarkan hasil penelitian ini, manfaat untuk pemerintah pusat menjadi bahan pertimbangan untuk konsisten menaikkan IPM secara cepat. Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan bahan pertimbangan menaikkan PDRB dan menginisiasi munculnya distribusi kewenangan pusat dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Sedangkan masyarakat hendaknya bisa menanamkan nilai-nilai kearifan lokal agar kemiskinan penanggulangan kemiskinan bisa berhasil dengan melakukan intropeksi diri jika menerima bantuan sementara kondisinya sudah mampu. Dunia usaha atau swasta dapat berperan memberikan pelatihan kewirausahaan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) agar masyarakat miskin memiliki produktivitas dan jiwa kewirausahaan.

6. Penelitian ini masih memiliki kelemahan, dimana data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga memiliki keterbatasan analisis secara mendalam. Untuk peneliti berikutnya, hendaknya melakukan penelitian dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan sampel di masing-masing pulau melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, kelemahan penelitian ini baru membedakan pulau Jawa dan pulau luar Jawa, maka perlu dilakukan penelitian per kabupaten/kota dan pulau.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Akhsyim, Wahyuni, Dwi, Sriyana, Jaka, 2017, Policies to Eliminate Poverty Rate in Indonesia.*International Journal of Economics and Financial*7 (1) :

Anatanyu, Sapja, 2011, Kelembagaan Petani Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya, *SEPA*7 (2): : 102 – 109.

Adepoju, Razaq Idowu, dan Oyekolade Sodiq Oyesanya, 2014, A Critical Analysis of Poverty Alleviation Strategies of AlHayat Relief Foundation in Nigeria,*Journal of Islamic Finance*, 3 (2)

Andykha, Ridho, Handayani, Herniwati, Retno, dan Woyanti, Nenik, 2018, AnalisisPengaruhPdrb, Tingkat Pengangguran, Dan IpmTerhadap Tingkat Kemiskinan Di ProvinsiJawa Tengah. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33 (2): 113-123

Bangun. Heriana, Siagian Matias dan Humaizi, 2019, The Effectiveness of the Ministry of Social Family's Hope Program (Program Keluarga Harapan) in Increasing the Welfare of the District of Medan Johor, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6 (4); 125 – 134.

Beik, Irfan Syauqi, dan Arsyianti,Laily, Dwi, 2015, *Construction of Cibest Model As Measerement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perpective*,.*Al-Iqtishad***,** VII (1)

Brajshor, Behxhet, Prof. Dr., 2017, Public Policy Analysis and The Criteria for Evaluation of The Public Policy**,** *European Journal of Economics, Law and Social Sciences IIPCCL Publishing, Graz-Austria*, 1 (2).

Cahyono, AlmujabSaiful, dan Yogaswara, S Marten, 2019, Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Subang Tahun 2017/2018. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan IlmuEkonomi*. III (1)

Chaiklin, Harris, 2011, Attitudes, Behavior, and Social Practice, *The Journal of Sociology & Social Welfare*. 38 (1)

Dalimunthe, Desy Yuliana, 2017, Analisis Peramalan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sebagai Tolak Ukur Kinerja Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Integrated Journal of Business and Economics (IJBE),* 1 (1)

Delgado, Odra Angélica Saucedo, Kadelbach, Vivian, Mata, Leovardo Mata, 2018, Effects of Conditional Cash Transfers (CCT) in Anti-Poverty Programs. An Empirical Approach with Panel Data for the Mexican Case of PROSPERA-Oportunidades (2002–2012). *Economies*, 6 (29).

Diana dan Seprina, Iin, 2019, Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Bantuan Sosial Menerapkan *Weighted Product Method* (WPM). J*urnalEdukasi dan PenelitianInformatika*, 5 (3).

Dye, T.R. 1995. *Understanding Public Policy.* Englewood Cliff, N.J.Printice-Hall 2nd ed.,

Efendi, Riyanto, Setyabudi Indartono, dan Sukidjo, 2019, The Relationship of Indonesia's Poverty Rate Based on Economic Growth, Health, and Education,

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. 6 (2),

Edward III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy. Washington*. D.C: ConressionalQuaterly Inc

Emet GÜREL, Merba TAT, 2017, SWOT Analysis : A Theoretical Review, *The Journal of International Social Research*, 10 (1)

Fajriyah, Nur dan Rahayu, Santi Puteri, 2016, Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menggunakan Regresi Data Panel. *Jurnal Sains Dan Seni Its*. 5, (1), 45 – 50.

Fatony, Achmad, 2011, Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assessment: Kasus Yogyakarta, *Sosiokonsepsia*, 16 (02).

Fitriyani, Rusgiyono, Agus dan Wuryandari, Triastuti, 2013, Perhitungan Dan Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Berdasarkan Harga Konstan, *Jurnal Gaussian*, 2 (2); 109-118.

Ginting, Ari Mulianto, dan Dewi, GaluhPrila, 2013, The Influence of Economic Growth and Financial Sector on Poverty Alleviaton in Indonesia. *JurnalEkonomi&KebijakanPublik***,** 4 (2).

Guritno, DanurCondro, Samudro, BhimoRizky, dan Soesilo, Albertus Magnus, 2018, Does Political Dynasty Cause Poverty? . *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 11 (2): 429-446

Hadi, Abdul, 2019, Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Terhadap Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. *Media Trend, Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14 (2): 148 – 153.

Hadna, Agus Heruanto, Kartika, Dyah, 2017, Evaluation of poverty alleviation policy: Can conditional cash transfers improve the academic performance of poor students in Indonesia? *Cogent Social Sciences, 3: 1295548*,

Hong Ng, Alex Hou, Farinda, Abdul Ghani, Kan, FockKui, Ling Lim, Ai, Ming Ting, Teo,2013, Poverty: Its Causes and Solutions, World Academy of Science, Engineering and Technology**.***International Journal of Humanities and Social Sciences***,** 7 (8).

Hakim, Al Asy Ari Adnan, Sukmana, Raditya, 2017, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 16 Negara Organisasi Konfrensi Islam (OKI), *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam,Volume 2 (1)*:67 – 91.

Heliany, Ina, 2019, *Public Policy In Legal Services At Bekasi City*. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 4 (1): 32 – 44.

Iryanti, Irma, 2012, *Strategi Dalam Pencapaian Target Pengurangan Kemiskinan 2019, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, Jakarta.

Istiqamah, Syaparuddin, dan Rahmadi, Selamet, 2018, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan (Studi Provinsi-Provinsi di Indonesia). *Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7 (3); 111 – 126.

Jatmiko, 2018, Analisis Regresi Kuantil B-Splines Monoton Naik pada Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah dan PengeluaranRumahTangga Per Kapita di Provinsi Yogyakarta. *JurnalMatematika "Mantik"*, 04 (02) 128-136.

Jenkins, Williams J, Martin Robertson. 1978. *PolicyAnalysis: A Political and Organizational Perspective*. London:.

Kahar, Arifin M., 2018, Analisis Angka Harapan Lama Sekolah di Indonesia Timur Menggunakan Weighted Least Squares Regression. *JURNAL MATEMATIKA "MANTIK"*, IV (01) 32 – 41.

Khemili, Hasnadan Mounir Belloumi, 2018, Socia Security and Fighting Poverty in Tunisia, *Economies*, 6(1).

Kiwang, Amir Syarifudin, Pandie, David D. W., dan Gana Frans, 2015, Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* (JKAP), 19 (1); 71 – 81.

Korankye, Alex Addae**,** Causes of Poverty in Africa: A Review of Literature**,** *Central Business School, Central University College, Accra Ghana*. American International Journal of Social Science,3 (7) : 435 – 441.

Kuswantoro, dan Dewi, Indah Giyant Permata, 2016, Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB Dan Upah Minimum Regional TerhadapKemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JEQu)*. 6 (1); 18 – 35.

Kwan, Crystal, dan Walsh, Christine A., *Old age poverty: A scoping review of the literature*. *Cogent Social Sciences*, 4. 1 – 21

Lestanata, Yudhi dan Pribadi, Ulung, 2016, Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 3 (3); 368 – 389.

Lolang, Enos, 2015, Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif, *Jurnal KIP*, III (3); 685 – 695.

Marinho, Emerson, Campelo, Guaracyane, Franc, Joao, and Araujo, Jair, 2017, Impact of infrastructure expenses in strategic sectors for Brazilian poverty, *EconomiA*, 18 : 244–259.

Mahembe, Edmore, Odhiambo, Nicholas Mbaya, 2019, Foreign aid, poverty and economic growth in developing countries: A dynamic panel data causality analysis. *Cogent Economics & Finance*, 7 :1626321

Mahroji, Dwi, 2019, Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten, Jurnal Ekonomi-Qu (JEQu) (Jurnal Ilmu Ekonomi), 9 (1); 51 – 72.

Minas, R., Jakobsen, V., Kauppinen, T., Korpi, T. &Lorentzen, T, 2016, The Governance of Poverty: Welfare Reform, Activation Policies, and Social Assistance Benefits and Caseloads in Nordic Countries, *Working Paper/Department of Social Work*,

Mohammad, KaziDeen , Dr., 2015, Alleviation of Poverty in Bangladesh: An Islamic Approach.*Global Journal of Human Social Science: A Arts & Humanities – Psychology*, 15 (10)

Munadi, Muhammad, 2008, Community Participation In The Public Policy Making In Education Sector InSurakarta Municipality**.** *JurnalPenelitian dan Evaluasi Pendidikan*, XII (2): 269 -284

Nainggolan, Togiaratua dan Susantyo, Badrun, 2017, Poverty Reduction Acceleration Through Family Hope Pograms:Study On Four Regions In Indonesi. *Sosio Konsepsia*, 7,(01), 31 – 46.

Novitasari, Diana, Khikmah, Laelatul,*2019,* Penerapan Model RegresiSpasial pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah**,** *Statistika*, 19 (2): 123 – 134

Nurwati, Nunung, 2008, Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan, *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10 (1); 1 – 11.

Paramita Sari, Sindi, dan Anwar, Deky, 2016, Analisis PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013. *I-Economic*, 2 (1); 86 – 101.

Possumah, Bayu Taufiq, Muhammad, Zikri, Padli, Jaharudin, Abu Talib, Jasmi, Md. Shah, Kamarul, 2020, Local Knowledge, Public Policy and Poverty Reduction: A Review on Indonesia Experiences. *SHS Web of Conferences 45*; 1 – 8.

Probosiwi, Ratih, 2016, Unemployment and Its Influence on Poverty Level. *Jurnal PKS*, 15 (2)

Putra, Edo Pramana, Purnamadewi, Yeti Lis, dan Sahara, 2015, The effect Of Social Aid To Economic Growth and Poverty On Underdeveloped Areas in Indonesia. *Tata Loka*, 17 (3).

Qurratu'ain, Almira Qattrunnada, dan Ratnasari, Vita, 2016, Analisis Indikator Tingkat Kemiskinan di JawaTimur Menggunakan Regresi Panel. *JURNAL SAINS DAN SENI ITS*. 5 (2)

Rachman, Benny, Agustian, Adang dan Wahyudi, 2018, Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16 (1); 1-18.

Rahayu, Yuyun P., Waimbo Danny E. , dan Kabiay, Marco, 2019, Evaluasi Kebijakan pro masyarakat miskin (studi kasus program raskin di Kabupaten Manokwari). *JurnalEkonomi dan Bisnis*, 22 (1)

Rahman, Yozi Aulia dan Chamelia, Ayunda Lintang, 2015, Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012, *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 8 (1); 88-99.

Ramdani, Martiyan, 2015, Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012, *Economics Development Analysis Journal*, 4 (1); 58 – 64.

Ramdhani dan Ramdhani, 2017, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, , 11 (01); 1-12.

Rika S, Munawaroh, dan Puruwita, Dita, 2012, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Per Kapita dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Econo Sains*, X (2); 144 – 157.

Ridzky Giovani, AnalisisPengaruh PDRB, 2018, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di PulauJawaTahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*.

Risnandar dan Broto, Aditya Wisnu, 2018, *Implementation Of Non-Cash Social Assistance Program In Indonesia. Sosio Konsepsia*, VII (03*)* 146 – 161

Riyadi, Agung dan Widojono, 2011, Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Responsibilitas Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Sragen, *JEJAK*, 4 (2): 91 – 101.

Rodin, Dede, 2015, Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Economica*, VI (1): 71 – 103.

Rustiadi, Ernan, Nasution, Ahmadrewan, 2017, Can Social Capital Investment Reduce Poverty in Rural Indonesia?.*International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 109-117.

Salesman, Frans, Juraman, Stefanus Rodrick, Paun, Rafael, dan Setiawan, Leonardus W.D., 2018, Poverty and society health status in East Nusa Tenggara Indonesia. International Research Journal of Public and Environmental Health, 5 (7); 125-130.

Samudro, BhimoRizky, Guritno, Danur Condro, dan Soesilo, Albertus Magnus, 2018, *Does Political Dynasty Cause Poverty?*. *Journal of Economics and Policy*, 11 (2).

Saragih, Juli Panglima, 2015, Government Policy to Reduce Poverty in the Special Region of Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6 (1).

Saragih, Risma, 2017, Effectiveness of State Property Administration Policy at Medan Agricultural Extension College, *Jurnal Administrasi Publik*, 7 (1); 77-93.

Sari, Sindi Paramita, 2016, Analisis PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat PengangguranTerhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013. *I-Economic, 2* .(1):86 – 101.

Sayifullah, dan Gandasari, Tia Ratu, 2016, Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, (2): p 115-273

Sayuti, Hendri, 2013, Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan). *Menara*, Vol. 12 (1); 41 – 47.

Setiawan Hari Purnomo, 1996, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sirageldin, Ismail, 2020, Ellmination of Poverty : Challenges And Islamic Strategies. *Islamic Economic Studies*,8 (1).

Sriyana, Jaka, 2018, Reducing Regional Poverty Rate in Central Java. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*. 11 (1) : 1-11

Sugiyarto, Mulyo, Jangkung Handoyo, Seleky, dan Natalia, Rosalia, *Poverty and Income Inequality Among Households in Bojonegoro Regency*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. JurusanSosialEkonomiPertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada.

Sulistyaningsih, Wiwit Tri, dan Kamil, Muhammad, 2020, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Baru, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13 (1); 1 – 12.

Suntiana, Liawati, Sanggar Kanto, Soenyono, 2015, Rancangan Model Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan (Kajian Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberbaru KabupatenJember), *Wacana*–18, (3).

Supriyanto, Nunung Nurhayati, dan Wuryatmo, A Sidik,2019, Analisis Sosial, Ekonomi dan Kependudukan di Jawa Tengah Menggunakan Model Persamaan Simultan Data Panel Dinamis. JurnalSainsSosial dan Humaniora. 3 (1),.

Susanti, Susy, 2018, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat

dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, IX (1) : 1 – 18

Sutikno, Bayu, Faruk, Alfensi, Dwipurwani, Oki, 2017, Penerapan Regresi Data Panel Komponen Satu Arah untuk Menentukan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Matematika Integratif*. 13 (1), 1-10.

Vijayakumar, Sinnathurai, Březinová Olga, 2012, *Poverty Incidence and its Determinants in the Estate Sector of Sri Lanka*, Journal of Competitiveness, 4 (1) :44-55.

Vijayakumar, Sinnathurai, 2013, An Empirical Study on the Nexus of Poverty, GDP Growth, Dependency Ratio and Employment in Developing Countries. *Journal of Competitiveness*. 5, (2): 67-82

Vishal Jain, 2014, 3D Model Of Attitude, *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*. 3. (3).

Widodo, Edy, Surianib, Eli, Ristyaningrum, Intan Putri, dan Kusumandari, Gita Evi, 2019, AnalisisRegresi Panel pada Kasus Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Matematika*.. PRISMA 2 710-717.

Wahyu Supriyanto ,RiniIswandiri, 2017, Kecenderungan Sivitas Akademika dalam Memilih Sumber Referensi untuk Penyusunan Karya Tulis, *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 13 (1).

WestiRiani, 2006, Pembangunan Pendidikan Sebagai Motor Penggerak IPM Jawa Barat. *Mimbar*, XXII (3).

Wiyono, M., 2016, *Tanggung Jawab Sosialdalam Al Qur'an.*; Analisis Kritis Tafsir TematikKemenag RI. *Diya al-Afkar*, 4 (02).

Yamin, Sofyan, Dartanto, Teguh, 2016, Poverty Alleviation in Indonesia: The Missing Link of Social Capital. *JurnalEkonomi dan Pembangunan Indonesia*. 17 (1): 88-102.

Yozi Aulia Rahman, Ayunda Lintang Chamelia, 2015, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2008 – 2012.*Journal of Economics and Policy*, 8 (1): 88 – 99.

Zulyanto, Aan, 2016, Pengeluaran Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Bengkulu. *JurnalEkonomi-Qu (JEQu)*, 6 (2): 115-139.

Buku, Peraturan, dan Website:

Buku:

Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making. New York*: Holt, Rinehart and Winston.

Anwar Arifin, 1984, *StrategiKomunikasi*, Bandung: Armilo,

Badan Pusat Statistik, 2019, *Indeks Pembangunan Manusia*, Jakarta.

Badudu, J.S, 1986, *KamusUmum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Dunn, W., 1999,*Analisa Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Yogyakarta :Gadjah Mada Press.

Howlett, M, and Ramesh, M. 1995. *Studying Public Policy. Policy Cycless and Policy Subsystem*. Oxford University Press. Toronto

Islamy, I. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.

Islamy, Irfan, dan Muh, Prof., Dr., MPA, *Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka

Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019,* Direktorak Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Jakarta.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2019,* Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, Jakarta.

Nugroho, R.D. 2009. *KebijakanPublik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluai)*, Gramedia. Jakarta

Putra, F. 2003. *Partai Politik & Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar. Malang.

Salusu, J. 2003. *Pengambilan keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Rasindo.

Sayagyo, P..*Tehnologi Pertanian dan Peluang Kerja Wanita di Pedesaan SuatuStudi Kasus Padi Sawah*, Yogyakarta: BPFE-UGM, 1985

Sriyana, Jaka, 2014, *Metode Regresi Data Panel*, Ekonosia Cetakan I,Yogyakarta:FE UII

Todaro, Michael P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga,* Erlangga, 2004, Jakarta.

Widarjono, Agus, 2018, *Ekonometrika. Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews.* Edisi Kelima, Yogyakarta :UPP STIM YKPN.

Widjaja, Gunawan, dan Pratama, YeremiaArdi, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat: Jakarta

Winarno, Budi, 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik,* Yogyakarta: Media Press.

Peraturan:

Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Jakarta.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018, Peraturan Menteri Sosial Republik Indoneisa Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Jakarta.

Republik Indonesia, 2014, *PeraturanPresidenNomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulan Kemiskinan*, Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM

Republik Indonesia, 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM

.

Web:

Adam, Felecia P., *TrenUrbanisasi di Indonesia*, Program StudiAgrobisnisFakultasPertanianUniversitasPattimurahttps://www.researchgate.net/publication/ , diaksestanggal 1 Agustus 2020.

Bappenas, 2020, Kemiskinan, https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi, diakses tanggal 30 April 2020

BPS, 2020, Rata-rata Lama Sekolah, https://sirusa.bps.go.idr, *diakses 1 September 2020.*

BPS, 2020, Indeks Pembangunan Manusia, https://www.bps.go.id, *diakses tanggal 1 September 2020*

BPS, 2018, Kemiskinan dan Ketimpangan, https://www.bps.go.id, *diaksestanggal 27 Nopember 2018*

Possumah, Bayu Taufiq, Zikri Muhammad, Jaharudi Padli, Jasmi Abu Talib and Kamarul Md. Shah, *Local Knowledge, Public Policy and Poverty Reduction: A Review on Indonesia Experiences*,https://www.shs-onferences.org/, diaksestanggal 27 Nopember 2018

Republik Indonesia, *Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional 2015 – 2019*, Jakarta, 2014. https://www.bappenas.go.id/ , diakses 30 April 2020

Republik Indonesia, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024*, Jakarta, 2020. https://www.bappenas.go.id/ , diaksestanggal 30 April 2020.

Badan Pusat Statistik, 2018, *Persentase penduduk miskin*, https://www.bps.go.id, diakses 20 Oktober 2018.

Kementerian Komunikasi dan Informasi, *Program BantuanSosialuntuk Rakyat*, https://kominfo.go.id/,diaksestanggal 12 Agustus 2019.

Kementerian SosialRepubik Indonesia, *PedomanUmum BPNT*, https://www.kemsos.go.id/ , diaksestanggal 30 Juli 2020

Wikepedia, *KebijakanPublik*, **https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik,** diakses 28 Nopember 1999

Risalah Rapat Materi Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 2018